



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

panganbiru

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, dan Adaptif Kolaboratif

KKP
2025
PROGETOGETHER

LKU

LAPORAN KINERJA
TAHUN 2025

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2025 ini dapat disusun.

Laporan Kinerja (LKj) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2025 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2025 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian Perikanan Budidaya. LKj Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2025 ini mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok menyesuaikan dengan DJPB KKP berikut pencapaian IKU melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 oleh masing-masing kelompok kerja yang ada di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

LKj Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, LKj Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2025 dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat.

Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan perikanan budidaya di masa mendatang.

Lombok Barat, 23 Januari 2026

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok



Sarwono, S.St.Pi.,M.Si

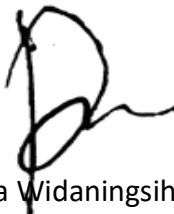
PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Satker Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok Tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat menjadi tanggung jawab Satker Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami tersebut, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan ini.

Jakarta, 23 Januari 2026

Tim Reviu Laporan Kinerja DJPB
Kementerian Kelautan dan Perikanan



(Ida Widaningsih)
Analisis Kebijakan Muda

Tim Reviu Laporan Kinerja DJPB
Kementerian Kelautan dan Perikanan



(Insan Kamil)
Analisis Perencanaan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	8
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	9
BAB 1. PENDAHULUAN.....	12
1.1. Latar Belakang	12
1.2. Maksud dan Tujuan	12
1.3. Tugas dan Fungsi	13
1.4. Isu Strategis dan Permasalahan Utama	16
1.4.1 Isu Strategis Pengembangan Budidaya Laut.....	16
1.4.2 Permasalahan Utama Pencapaian Indikator Kinerja Utama di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.	16
1.5. Sistematika LKj.....	17
BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	18
2.1. SASARAN KEGIATAN	18
2.2. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN.....	19
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	20
2.4. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025.....	24
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	25
3.3 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	75
3.4 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	75
BAB 4. PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	25
Tabel 2. Capaian Sarana dan Prasarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat BPBL Lombok Tahun 2025	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. Rekapitulasi bantuan sarana dan prasarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat (Bioflok) Tahun 2025	29
Tabel 4. Perbandingan Capaian Sarana dan Prasarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat BPBL Lombok Tahun 2025 dengan UPT DJPB lain.	32
Tabel 5. Capaian benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat BPBL Lombok Tahun 2025	35
Tabel 6. Rekapitulasi Bantuan Benih Ikan Air Laut Yang Didistribusikan Ke Masyarakat Tahun 2025	35
Tabel 7. Perbandingan Capaian Benih Ikan Air Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat BPBL Lombok Tahun 2025 Dengan UPT DJPB Lain	38
Tabel 8. Capaian Produksi Calon Induk Unggul Untuk Operasional UPT BPBL Lombok Tahun 2025	40
Tabel 9. Realisasi Capaian Produksi Induk Unggul Satker BPBL Lombok Tahun 2025	41
Tabel 10. Perbandingan Produksi Calon Induk Unggul Ikan Laut Untuk Operasional BPBL Lombok Tahun 2025 Dengan UPT DJPB Lain	41
Tabel 11. Realisasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Satker BPBL Tahun 2025 ..	44
Tabel 12. Capaian Sampel Penyakit Ikan Air Laut yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Satker BPBL Lombok Tahun 2025	44
Tabel 13. Perbandingan Capaian Sampel Penyakit Ikan Air Laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Tahun 2025 dengan UPT DJPB lain	45
Tabel 14. Capaian Sampel Surveilans AMR yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Satker BPBL Lombok Tahun 2025	47
Tabel 15. Perbandingan Capaian Sampel Surveilans AMR Yang Diuji Satker BPBL Lombok Tahun 2025 Dengan UPT DJPB Lain	48
Tabel 16. Bibit Rumput Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat Satker BPBL Lombok Tahun 2025.....	50
Tabel 17. Perbandingan Capaian Bibit Rumput Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat Satker BPBL Lombok Tahun dengan UPT DJPB lain.	51
Tabel 18. : Nilai PM SAKIP Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	54
Tabel 19. Perbandingan Nilai PM SAKIP BPBL Lombok dibandingkan dengan Satker lainnya.....	54
Tabel 20. Indeks profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Lombok	56
Tabel 21. Perbandingan Indeks profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Lombok dengan SatkerDJPB Lain	57
Tabel 22. Hasil penilaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	58
Tabel 23. Perbandingan Hasil penilaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi BPBL Lombok dengan UPT DJPB Lain	59
Tabel 24. Prosentase penyelesaian LHP BPK atas Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.....	60
Tabel 25. Perbandingan Prosentase penyelesaian LHP BPK atas Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dengan UPT DJPB Lain.....	60

Tabel 26. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker BPBL Lombok.....	62
Tabel 27. Perbandingan Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BPBL Lombok Dengan Satker DJPB Lain	62
Tabel 28. Nilai IKPA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	63
Tabel 29. Nilai IKPA BPBL Lombok Dibandingkan Dengan Satker UPT Laut Lainnya	64
Tabel 30. Nilai Kinerja Perencana Anggaran BPBL Lombok.....	65
Tabel 31. NKA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	66
Tabel 32. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPBL lombok dibandingkan dengan Satker UPT Laut lainnya	66
Tabel 33. Indeks Pengelolaan Kepegawaian BPBL lombok	68
Tabel 34. nilai Indeks Pengelolaan Kepegawaian BPBL lombok dibandingkan dengan Satker UPT Laut lainnya	68
Tabel 35. Perbandingan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Lombok dengan UPT DJPB Lain	69
Tabel 36. Nilai Pengawasan Kearsipan BPBL Lombok	73
Tabel 37. nilai Pengawasan Kearsipan BPBL lombok dibandingkan dengan Satker lainnya	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 2025	14
Gambar 2. Grafik Jumlah Pegawai di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Berdasarkan jabatan per Desember 2025	14
Gambar 3 Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan tingkat pendidikan per Desember 2025	15
Gambar 4 . Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan pangkat/gol per Desember 2025	15
Gambar 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
Gambar 6. Screenshoot Aplikasi Kinerjaku	24
Gambar 7. Distribusi Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar	31
Gambar 8. Distribusi Bantuan Benih Ikan Air Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat.	37
Gambar 9. Calon Induk Ungul Yang Diproduksi Untuk Operasional UPT BPBL Lombok	43
Gambar 10. Pengujian Ikan Air Laut Dalam Rangka Layanan Laboratorium Penguji	45
Gambar 11. Pengujian AMR	48
Gambar 12. Penyaluran bantuan bibit rumput kultur jaringan	51
Gambar 10. Screenshot Aplikasi OMSPAN	75
Gambar 11. Screenshot Aplikasi SMART DJA	76

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKJ) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok yang memuat rencana, capaian dan realisasi anggaran dan kegiatan BPBL Lombok pada Tahun 2025. Berdasarkan Surat Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (BPBL Lombok) dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2025, maka telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai oleh satker BPBL Lombok terdiri dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Ringkasan penjelasan pencapaian IKU dalam setiap Sasaran Strategis sebagaimana berikut :

Sasaran Kegiatan 1, yaitu : “Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar” didukung oleh 1 (satu) IKU yaitu : (i) Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok

Sasaran Kegiatan 2, yaitu : “Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut” didukung oleh 4 (empat) IKU, yaitu : (i) Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (ii) Produksi Calon Induk Unggul Ikan Laut Satker BPBL Lombok (iii) Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Lombok (iv) Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Lombok

Sasaran Kegiatan 3, yaitu : “Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut” didukung oleh 1 (satu) IKU yaitu: Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok.

Sasaran Kegiatan 4, yaitu : “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok” didukung oleh 12 (dua belas) IKU yaitu (i) Nilai PM SAKIP Satker BPBL Lombok; (ii) Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBL Lombok; (iii) Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Lombok; (iv) Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBL Lombok; (v) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Lombok; (vi) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker BPBL Lombok; (vii) Nilai Kinerja

Perencanaan Anggaran Satker BPBL Lombok; (viii) Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Lombok;(ix) Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Lombok; (x) Persentase Layanan Perkantoran Satker BPBL Lombok; (xi) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Satker BPBL Lombok; (xii) Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBL Lombok.

Sampai dengan Tahun 2025, telah tercapai target dari 18 indikator kinerja yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok sebanyak 26 paket dari target 26 paket (100% dari target)
2. Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok sebanyak 213.900 ekor dari target 165.386 ekor (129,33% dari target)
3. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT BPBL Lombok sebanyak 1.155 ekor dari target 948 ekor (121,84% dari target)
4. Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Lombok sebanyak 3.825 sampel dari target 374 sampel (1022,73% dari target)
5. Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Lombok sebanyak 17 sampel dari target 16 sampel.(106,25% dari target)
6. Jumlah Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok sebanyak 2.760 kg dari target 1.623 kg (170,06% dari target)
7. Nilai PM SAKIP Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebesar 84 dari target 84. (100% dari target)
8. Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBL Lombok sebesar 81,63 dari target 81 (100,78% dari target)
9. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi sebesar 82.20 dari target 76.00 (108,16% dari target)
10. Prosentase penyelesaian LHP BPK atas Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebesar 100% dari target 100% (100% dari target)

11. Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebesar 100% dari target 85% (117,65% dari target)
12. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 96.46 dari target 92.00 (104,85% dari target)
13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 97.00 dari target 71.50 (135,66% dari target)
14. Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Lombok sebesar 6.00 dari target 3.00 (200% dari target)
15. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik sebesar 99.50 dari target 80.00 (124,38% dari target)
16. Persentase Layanan Perkantoran Satker BPBL Lombok sebesar 100% dari target 80% (125% dari target)
17. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Satker BPBL Lombok sebesar 100% dari target 76% (131.58 % dari target)
18. Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBL Lombok sebesar 80.86 dari target 70.00 (115,51% dari target)

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, dapat diketahui bahwa BPBL Lombok telah mencapai target yang ditentukan. Meskipun demikian, BPBL Lombok ke depan akan meningkatkan kualitas kinerja supaya tercapai target-target yang telah ditetapkan.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya mempunyai tugas yaitu melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang perikanan budidaya laut, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan guna mendukung berbagai program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun rencana kerja tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebagai salah satu UPT Ditjen Perikanan Budidaya telah melakukan penyusunan target kinerja Tahun 2025, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sampai dengan Tahun 2025, dan kemudian dituangkan dalam LKj Tahun 2025. LKj BPBL Lombok ini menginformasikan *input, output, outcome, dan benefit* dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan LKj BPBL Lombok Tahun 2025 yaitu : (i) sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi BPBL Lombok kepada seluruh *stakeholders*; (ii) sebagai sarana monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja BPBL Lombok

Tahun 2025; dan (iii) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.3. Tugas dan Fungsi

BPBL Lombok bertugas melaksanakan uji terap teknik dan kerjasama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan serta bimbingan teknis perikanan budidaya laut, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KP No. 67/MEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya yang diuraikan lebih rinci dalam fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perikanan budidaya laut;
2. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut;
3. pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi perikanan budidaya laut;
4. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya laut;
5. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya laut;
6. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya laut;
7. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
8. pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut;
9. pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya laut;
10. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut; dan
11. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, berdasarkan peraturan menteri tersebut, susunan organisasi BPBL Lombok terdiri dari :

1. Subbagian Umum, yang mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan

masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

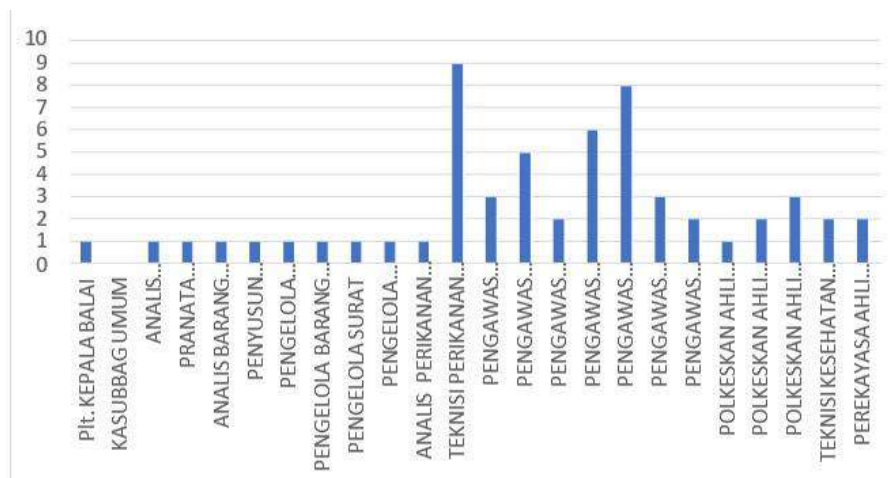
2. Kelompok jabatan fungsional, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Susunan organisasi BPBL Lombok tergambar pada susunan organisasi di bawah ini :

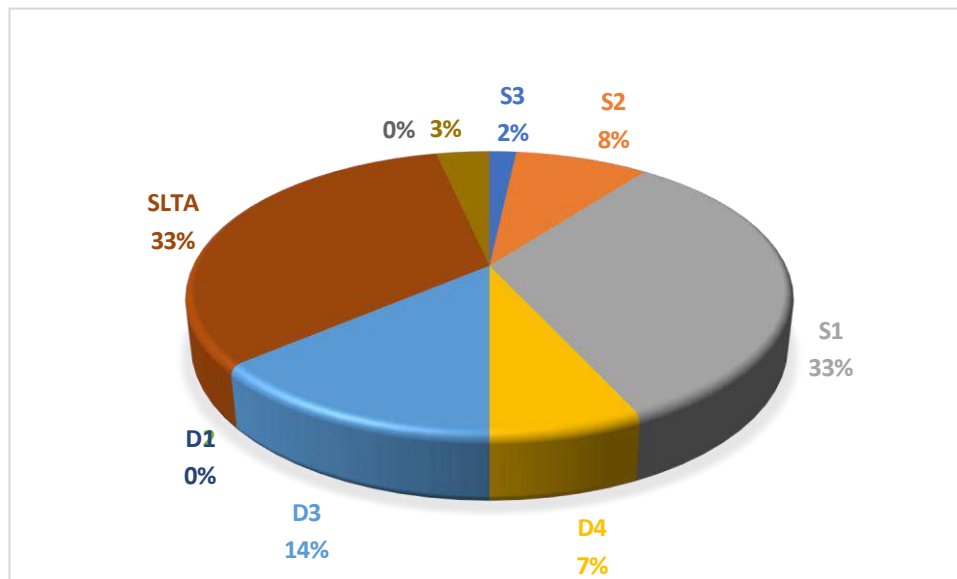


Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 2025

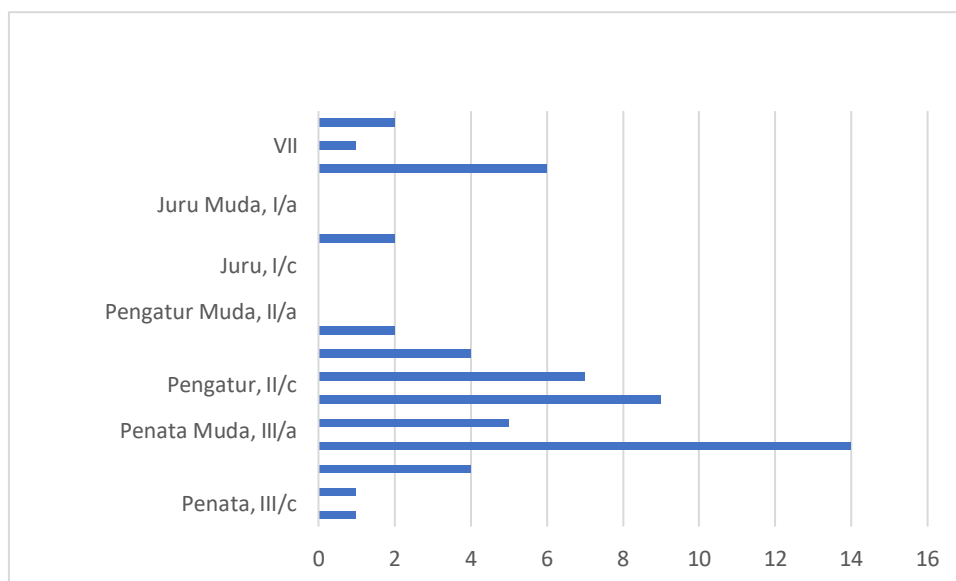
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok didukung oleh SDM sejumlah 66 orang dengan rincian sejumlah 46 orang PNS dan 17 PPPK Penuh waktu serta 3 orang PPPK Paruh waktu dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik Jumlah Pegawai di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Berdasarkan jabatan per Desember 2025



Gambar 3 Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan tingkat pendidikan per Desember 2025



Gambar 4 . Grafik jumlah pegawai BPBL Lombok berdasarkan pangkat/gol per Desember 2025

1.4. Isu Strategis dan Permasalahan Utama

1.4.1 Isu Strategis Pengembangan Budidaya Laut

Budidaya laut (Marine Culture) di Indonesia merupakan bagian dari sektor kelautan dan perikanan yang mempunyai kontribusi penting dalam memenuhi target produksi perikanan. Potensi sumber daya perikanan budidaya laut khususnya di Propinsi NTB dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan komoditas-komoditas yang memiliki nilai ekonomis penting, diantaranya: rumput laut, mutiara, lobster, kerapu, kakap dan bawal bintang (Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTB). Lebih lanjut lagi data statistik perikanan budidaya di Propinsi NTB diketahui pada tahun 2021, potensi areal budidaya laut seluas 171.010,51 hektar dengan jumlah Rumah Tangga Produksi berjumlah 10.033 unit.

Dalam pengembangan budidaya laut di wilayah tengah dan timur Indonesia (Bali, NTT, dan Papua) khususnya di propinsi NTB yang menjadi wilayah kerja BPBL Lombok terdapat beberapa isu dan permasalahan yang dihadapi, antara lain: (i) harga pakan untuk komoditas ikan laut sangatlah tinggi (pakan segar dan pakan buatan); (ii) penyakit; (iii) akses permodalan yang terbatas karna ketidak stabilan produksi dan resiko kegagalan yang tinggi; (iv) standar kompetensi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan; (v) tingkat kelulushidupan (SR) biota yang dipelihara saat panen yang masih rendah karena berbagai macam faktor mulai dari lingkungan budidaya, tidak konsistennya penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) hingga kualitas benih yang masih rendah dari segi pertumbuhan.

Selain permasalahan tersebut diatas juga terdapat beberapa tantangan yang dihadapi BPBL Lombok dalam pengembangan budidaya ikan air laut, diantaranya: (i) pengembangan teknologi budidaya dari jenis kekerangan, ikan bersirip dan juga lobster yang bernilai ekonomis tinggi belum optimal dilakukan; (ii) keterbatasan sarana prasarana, anggaran, dan SDM; dan (iii) wilayah kerja yang sangat luas.

1.4.2 Permasalahan Utama Pencapaian Indikator Kinerja Utama di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

Secara umum, permasalahan-permasalahan/ kendala yang dihadapi pada Tahun 2025 di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, diantaranya :

1. Adanya efisiensi anggaran di akhir tahun sehingga berdampak pada penyesuaian target

di beberapa kegiatan.

2. Adanya beban kerja yang tidak seimbang pada SDM BPBL Lombok

1.5. Sistematika LKj

LKj ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Balai Perikanan Budiaya Laut Tahun 2025. LKj ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 dengan target dan kinerja pada tahun sebelumnya. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance gap*) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut :

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja BPBL Lombok Tahun 2025 , permasalahan yang dihadapi, dan upaya mengatasi hal tersebut.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang BPBL Lombok serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi BPBL Lombok, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan tapja yang memuat sasaran kegiatan berikut indikator kinerja utama (IKU) pada Tahun 2025.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan rincian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBL Lombok serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang efisiensi.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama.

BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. SASARAN KEGIATAN

Tujuan strategis pembangunan perikanan budidaya laut akan dicapai melalui sejumlah sasaran kegiatan yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada Tahun 2025.

Sasaran Kegiatan pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai dijabarkan dalam lima perspektif dengan masing-masing IKU sebagai berikut :

1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok
2. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah :
 - a. Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok
 - b. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Laut Satker BPBL Lombok
 - c. Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Lombok
 - d. Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Lombok
3. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok
4. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah :
 - a. Nilai PM SAKIP Satker BPBL Lombok;
 - b. Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBL Lombok;
 - c. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Lombok;
 - d. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBL Lombok

- e. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Lombok;
- f. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker BPBL Lombok;
- g. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker BPBL Lombok;
- h. Indeksi Pengelolaan SDM Satker BPBL Lombok;
- i. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Lombok;
- j. Persentase Layanan Perkantoran Satker BPBL Lombok
- k. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Satker BPBL Lombok
- l. Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBL Lombok;

2.2. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN

Pelaksanaan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok pada Tahun 2025 difokuskan pada program pencapaian Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Pengelolaan budidaya rumput laut
2. Pengelolaan budi daya ikan air laut
3. Pengelolaan budi daya ikan air tawar
4. Dukungan manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Dimana dalam mencapai hal tersebut, telah didistribusikan melalui Klasifikasi Rincian Output yaitu : (i) Bantuan tumbuhan; (ii) Bantuan peralatan/sarana; (iii) Bantuan hewan; (iv) Penyidikan dan Pengujian penyakit; (v) Bantuan hewan; (vi) Penyidikan dan Pengujian penyakit; (vii) Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan; (viii) Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan; (ix) Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi; (x) Layanan dukungan manajemen internal; (xi) layanan manajemen SDM internal; (xii) layanan manajemen kinerja internal.

Dalam mendukung rencana kerja tersebut, BPBL Lombok mendapatkan pagu anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 sebesar **Rp. 18.331.755.000- (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)**. Berikut adalah nilai pagu berdasarkan kegiatan :

1. Pengelolaan budidaya rumput laut (Rp. 145.590.000)

2. Pengelolaan budi daya ikan air laut (Rp. 1.407.469.000)
3. Pengelolaan budi daya ikan air tawar (Rp. 5.322.889.000)
4. Dukungan manajemen internal lingkup DJPB (Rp. 11.455.807.000)

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, penetapan kinerja BPBL Lombok tahun 2025. Berikut adalah perjanjian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2025 sebelum dan sesudah perubahan indikator kinerja Tahun 2025 :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Wawan Cahyono Ashuri**
Jabatan : **Pt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok**
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budidaya**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Pt. Kepala Balai Perikanan
Budidaya Laut Lombok



Wawan Cahyono Ashuri

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK 1 Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1 Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat Saker BPBL Lombok (unit)	12
SK 2 Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	2 Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat Saker BPBL Lombok (ekor)	289.531
	3 Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional LPT BPBL Lombok (ekor)	948
	4 Sosialisasi/Deminas/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Saker BPBL Lombok (orang)	300
	5 Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Saker BPBL Lombok (Sampel)	374
	6 Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Saker BPBL Lombok (Sampel)	16
SK 3 Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumpul Laut	7 Sarana budi daya rumpul laut yang disalurkan ke masyarakat Saker BPBL Lombok (Unit)	26
SK 4 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	8 Benih Rumpul Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Saker BPBL Lombok (kg)	7129
	9 Nilai PM SAK-P Saker BPBL Lombok (nilai)	85
	10 Indeks Profesionalitas ASN Saker BPBL Lombok (indeks)	81
	11 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Saker BPBL Lombok (nilai)	76
	12 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBL Lombok (persen)	100
	13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan	85

Data Anggaran

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pengelolaan Budi Daya Rumpul Laut	1.825.030.000
2	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	2.230.340.000
3	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	2.580.080.000
4	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2025	11.555.906.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2025		18.191.356.000

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Pt. Kepala Balai Perikanan
Budidaya Laut Lombok



Wawan Cahyono Ashuri

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	14 Untuk Puncak Kinerja Saker BPBL Lombok (persen)	92
	15 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Saker BPBL Lombok (Nilai)	71,5
	16 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Saker BPBL Lombok (Nilai)	3
	17 Indeks Pengelolaan SDM Saker BPBL Lombok (indeks)	280
	17 Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Saker BPBL Lombok (Nilai)	80
	18 Persentase Layanan Perantara Saker BPBL Lombok	76
	19 Nilai pengisian keanggotaan internal Saker BPBL Lombok (Nilai)	65
	20 Persentase Penyelesaian SOP Saker BPBL Lombok (persen)	

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Pt. Kepala Balai Perikanan
Budidaya Laut Lombok



Wawan Cahyono Ashuri

Gambar 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum perubahan



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKS/MILE (021) 3514772
LAMARAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sarwono**

Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan
Budidaya Laut Lombok



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarwono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK 1 Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1 Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (unit)	26
SK 2 Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	2 Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (ekor)	165.386
	3 Produksi Calon Induk Unggul Ikan Laut Satker BPBL Lombok (ekor)	948
	4 Sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Lombok (Sampel)	374
	5 Sampel monitoring penyakit ikan air laut dan AMR yang diuji Satker BPBL Lombok (Sampel)	16
SK 3 Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	6 Jumlah Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (kg)	1.623
SK 4 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	7 Nilai PM SAKIP Satker BPBL Lombok (nilai)	84
	8 Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBL Lombok (indeks)	81
	9 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Lombok (nilai)	76
	10 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBL Lombok (persen)	100
	11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Lombok (persen)	85
	12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker BPBL Lombok (Nilai)	92

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	13 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker BPBL Lombok (Nilai)	71,5
	14 Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Lombok (Indeks)	3
	15 Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Lombok (Nilai)	280
	16 Persentase Layanan Perikantoran Satker BPBL Lombok	80
	17 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Satker BPBL Lombok (persen)	76
	18 Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBL Lombok (Nilai)	70

Data Anggaran

NO.	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	145.590.000
2	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	1.407.469.000
3	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	5.322.889.000
4	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	11.455.807.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2025		18.331.755.000

Jakarta, 1 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarwono

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 setelah perubahan

Perubahan Target Kinerja dan Indikator Kinerja kegiatan BPBL Lombok adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Sebelum dan Sesudah Perubahan Target Kinerja dan IKK BPBL Lombok

SEBELUM			SESUDAH		
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN (2025)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN (2025)
Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok	12	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok	26
Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok	269.531 ekor	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok	165.386 ekor
Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya (Orang)	300	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	Jumlah Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok	7129 kg	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	Jumlah Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok	1.623 kg
Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	26	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik	Persentase Penyelesaian SOP Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	65 %	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Lingkup Balai Perikanan					
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Satker BPBL Lombok	76%

2.4. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implementasi aplikasi BSC “kinerjaku” yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian rata-rata Indikator Kinerja Utama (IKU)+IKM Pada Tahun 2025 ini adalah sebesar 112.00 % atau masuk dalam kategori ISTIMEWA (Biru). Berikut adalah hasil *Screenshot* dari aplikasi Kinerjaku BPBL Lombok.



Gambar 7. Screenshoot Aplikasi Kinerjaku

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan Tahun 2025, berdasarkan sistem aplikasi Kinerjaku, diperoleh Nilai sebesar 112.00%. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN (2025)	SATUAN TARGET KEGIATAN	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TERHADAP TARGET 2025 (%)
Terkelolanya system perikanan budi daya ikan air tawar	Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat satker BPBL Lombok	26	unit	26	100
Terkelolanya system perikanan budi daya ikan air laut	Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat satker BPBL Lombok	165.386	Ekor	213.900	129.33
Terkelolanya system perikanan budi daya ikan air laut	Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT BPBL Lombok	948	Ekor	1.155	121.84
Terkelolanya system perikanan budi daya ikan air laut	Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Lombok (Sampel)	374	Sampel	3.825	1022.73
Terkelolanya system perikanan budi daya ikan air laut	Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Lombok (Sampel)	16	Sampel	17	106.25
Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (kg)	1.623	Kg	2.760	170.06

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN (2025)	SATUAN TARGET KEGIATAN	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TERHADAP TARGET 2025 (%)
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Nilai PM SAKIP Satker BPBL Lombok (nilai)	84	Nilai	84	100
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Satker BPBL Lombok	76	Persen	100	131.58
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBL Lombok (indeks)	81	Indeks	81.63	100.78
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Lombok (nilai)	76	Nilai	82.20	108.16
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBL Lombok (persen)	100	Persen	100	100
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Lombok (persen)	85	Persen	100	117.65

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN (2025)	SATUAN TARGET KEGIATAN	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TERHADAP TARGET 2025 (%)
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker BPBL Lombok (Nilai)	92	Nilai	96.46	104.85
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker BPBL Lombok (Nilai)	71.50	Nilai	97.00	135.66
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Indeksi Pengelolaan SDM Satker BPBL Lombok (Indeks)	3	Indeks	6	200
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Lombok (Nilai)	≥80	Nilai	99.50	124.38
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Persentase Layanan Perkantoran Satker BPBL Lombok	80	Persen	100	125
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBL Lombok (Nilai)	70	Nilai	80.86	115.51

3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA

3.2.1 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 1

TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR

Sasaran terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar di BPBL Lombok hanya memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

1) Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat satker BPBL Lombok

Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang dimanfaatkan merupakan sarana dan prasarana bioflok dimana berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 301 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah sarana dan prasarana budi Daya ikan lele atau ikan nila sistem bioflok Tahun Anggaran 2025, BPBL Lombok sebagai Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab menyalurkan bantuan bioflok sebanyak 12 paket dengan kriteria sebagai berikut :

- a. benih ikan ;
- b. pakan ikan *starter 1*;
- c. pakan ikan *starter 2*;
- d. Pakan ikan *Grower* dan *finisher*;
- e. obat ikan dan vitamin;
- f. prasarana dan sarana operasional;
- g. peralatan perikanan;

• Capaian Kinerja

Sarana dan prasarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat sudah direalisasikan pada Triwulan 4 Tahun 2025. Capaian sarana dan prasarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Triwulan 4 Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Sarana dan Prasarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat BPBL Lombok Tahun 2025

Nama SK : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Air Tawar								
Nama Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan								
Triwulan IV Tahun 2025			Realisasi		Target 2025	Realisasi Terhadap		Renstra DJPB 2025-2029
Target	Realisasi	Capaian (%)	Triwulan IV Tahun 2024	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 thd Tahun 2024 (%)		Target Tahunan (%)	Target 2025	%Capaian terhadap target akhir renstra
26	26	100	100	100	26	100	230	11%

Keterangan :

- 1) Terdapat IK yang sama di tahun 2024, perhitungan capaian IK juga dilakukan pada Triwulan IV

• Perbandingan Capaian Kinerja (Tahun 2024 dan Satker)

Dari table 3 dapat diketahui bahwa capaian sarana dan prasarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 sebesar 100 % atau sudah disalurkan 26 paket bantuan sarana dan prasarana budi daya air tawar yang disalurkan ke masyarakat (Bioflok), serta dapat juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni capaian yang sama sebesar 100% pada tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan renstra BPBL Lombok maka capaian yang sudah tercapai tidak dapat dibandingkan karena belum ditetapkannya target dalam renstra BPBL Lombok Tahun 2025-2029.

Berikut ini adalah rekapitulasi bantuan sarana dan prasarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat (Bioflok) Tahun 2025 :

Tabel 4. Rekapitulasi bantuan sarana dan prasarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat (Bioflok) Tahun 2025

No	Jenis Bantuan	Komoditas	Nama Kelompok	Kab/Kota	Provinsi	Tanggal BAST	SK Penerima	Tanggal Distribusi
1	Bansapras Bioflok	Lele	Pokdakan Mina Leguni Mandiri	Magetan	Jawa Timur	12 September 2025	B.1328/BPBL-L/PB.340/VII/2025	12 September 2025
2	Bansapras Bioflok	Lele	Pokdakan Nekmese	Timor Tengah Selatan (TTS)	Nusa Tenggara Timur	15 September 2025	B.1233/BPBL-L/PB.340/VII/2025	15 September 2025
3	Bansapras Bioflok	Nila	Pokdakan Mina Tani Lestari	Tabanan	Bali	22 September 2025	B.1399/BPBL-L/PB.340/VII/2025	22 September 2025
4	Bansapras Bioflok	Lele	Pokdakan Inovasi Sejahtera	Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	28 Oktober 2025	B.1557/BPBL-L/PB.340/VIII/2025	28 Oktober 2025
5	Bansapras Bioflok	Lele	Bintang Terang	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	29 November 2025	B.1937/BPBL-L/PB.340/X/2025	29 November 2025
6	Bansapras Bioflok	Lele	Pemuda Patas	Ngada	Nusa Tenggara Timur	29 November 2025	B.1936/BPBL-L/PB.340/X/2025	29 November 2025
7	Bansapras Bioflok	Lele	Melu Mizo	Ngada	Nusa Tenggara Timur	29 November 2025	B.1936/BPBL-L/PB.340/X/2025	29 November 2025
8	Bansapras Bioflok	Lele	Taruna Kiak	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	19 Desember 2025	B.2211/BPBL-L/PB.340/XI/2025	19 November 2025
9	Bansapras Bioflok	Lele	Tirta Samudra	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	19 Desember 2025	B.2211/BPBL-L/PB.340/XI/2026	19 November 2025
10	Bansapras Bioflok	Lele	Keban Iwes	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	19 Desember 2025	B.2211/BPBL-L/PB.340/XI/2027	19 November 2025

No	Jenis Bantuan	Komoditas	Nama Kelompok	Kab/Kota	Provinsi	Tanggal BAST	SK Penerima	Tanggal Distribusi
11	Bansapras Bioflok	Lele	Brang Katelas	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	19 Desember 2025	B.2211/BPBL-L/PB.340/XI/2028	19 November 2025
12	Bansapras Bioflok	Lele	Mina Sari Kencana	Tabanan	Bali	19 Desember 2025	B.2209/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
13	Bansapras Bioflok	Lele	Pangkung Bacang	Tabanan	Bali	19 Desember 2025	B.2209/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
14	Bansapras Bioflok	Lele	Mina Yukti	Tabanan	Bali	19 Desember 2025	B.2209/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
15	Bansapras Bioflok	Lele	Narabe Manik Gangga	Tabanan	Bali	19 Desember 2025	B.2209/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
16	Bansapras Bioflok	Nila	Yayasan Ibadurrohman	Tasikmalaya	Jawa Barat	30 Desember 2025	B.2212/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
17	Bansapras Bioflok	Lele	Kunti Tentram	Ponorogo	Jawa Timur	30 Desember 2025	B.2212/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
18	Bansapras Bioflok	Lele	Emak-Emak Sehat Berdaya	Trenggalek	Jawa Timur	30 Desember 2025	B.2212/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
19	Bansapras Bioflok	Lele	Yayasan Asy Syafa'ah Karangjati	Ngawi	Jawa Timur	30 Desember 2025	B.2212/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
20	Bansapras Bioflok	Lele	Dalong Jaya	Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	30 Desember 2025	B.2208/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
21	Bansapras Bioflok	Lele	Nore Gore	Ngada	Nusa Tenggara Timur	30 Desember 2025	B.2208/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
22	Bansapras Bioflok	Lele	Mbola Bombang	Ngada	Nusa Tenggara Timur	30 Desember 2025	B.2208/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
23	Bansapras Bioflok	Lele	Adikara	Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	31 Desember 2025	B.2210/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
24	Bansapras Bioflok	Lele	Mandiri Kesetnana	Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	31 Desember 2025	B.2210/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
25	Bansapras Bioflok	Lele	Elshaday	Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	31 Desember 2025	B.2210/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
26	Bansapras Bioflok	Lele	Pemancar	Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	31 Desember 2025	B.2210/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025

Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan penyaluran bantuan sarana dan prasarana bioflok.



Gambar 8. Distribusi Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar

Tabel 5. Perbandingan Capaian Sarana dan Prasarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat BPBL Lombok Tahun 2025 dengan UPT DJPB lain.

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	26	26	100.00
BPBL Ambon	22	22	100,00
BPBL Batam	11	11	100,00
BBPBL Lampung	41	43	104.87

Perbandingan capaian sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat BPBL Lombok sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 dengan UPT DJPB lain dapat dilihat pada Tabel 5, prosentase capaian BPBL Lombok sama dengan BPBL Ambon dan BPBL batam yakni sebesar 100% sedangkan BBPBL Lampung memiliki capaian yang lebih tinggi yakni sebesar 104.87%.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

BPBL Lombok telah merealisasikan anggaran sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 untuk Indikator Kinerja Sarana dan Prasarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat sebesar Rp. 5.322.625.569,- atau sebesar 100% yang merupakan serapan atas realisasi kontrak dari paket pengadaan bioflok sebesar Rp.5.135.239.278,-. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2025, sumber anggaran sarana dan prasarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat berasal dari rupiah murni (RM).

- **Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

Pada Tahun 2025 ini sudah dilakukan penyaluran bantuan sarana dan prasarana bioflok sebanyak 26 paket di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Bali, dikarenakan adanya efisiensi anggaran maka kegiatan penyaluran bantuan sarana dan prasarana budi daya air tawar yang disalurkan ke masyarakat (Bioflok) baru dapat direalisasikan pada Triwulan 4 Tahun 2025 sesuai dengan arahan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk melakukan revisi anggaran dari kegiatan lainnya untuk refocusing kegiatan bantuan sarana dan prasarana budi daya air tawar yang disalurkan ke masyarakat (Bioflok).

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya**

Pada triwulan sebelumnya (TW 3 tahun 2025) terdapat permasalahan berupa belum dilakukannya identifikasi dan verifikasi calon penerima untuk paket tambahan setelah relaksasi anggaran. Untuk mengatasi masalah tersebut telah dilakukan identifikasi dan verifikasi baik secara daring maupun dating langsung kelokasi calon penerima, dan juga telah dilakukan pengadaan barang dan jasa untuk paket bantuan sarana dan prasarana budi daya air tawar yang disalurkan ke masyarakat pada triwulan 4 tahun 2025.

Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya

Rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat lingkup BPBL Lombok demi menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dapat dilakukan apabila semua calon penerima dan calon lokasi sudah dilakukan verifikasi dan sudah sesuai secara teknis dan kelembagaan dengan juknis penyaluran bantuan pemerintah sarana dan prasarana budi daya ikan lele atau ikan nila system bioflok tahun anggaran 2025 nomor 301 tahun 2024, sehingga rencana aksi dapat dilakukan berupa :

- a) Melakukan koordinasi dengan kelompok dan pihak terkait dalam memahami juknis bantuan baik terkait persyaratan administrasi dan teknis agar tidak ada kekurangan/kesalahan dalam pemenuhan persyaratan sebagai calon penerima bantuan.
- b) Melakukan proses pengadaan barang/jasa untuk paket bansarpras bioflok yang disesuaikan dengan Juknis dan ketersediaan anggaran BPBL Lombok untuk paket sesuai pagu anggaran setal revisi.

3.2.2 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 2 TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT

Sasaran Terkelolanya Sistem Perikanan Budidaya Ikan Air Laut di BPBL Lombok memiliki 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

1) Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat UPT BPBL Lombok

Indikator Kinerja “ Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat UPT BPBL Lombok” merupakan salah satu kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB), dimana Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki tugas dan fungsi untuk memproduksi dan menyediakan

benih ikan bermutu. Hasil produksi benih ikan bermutu dapat dipergunakan untuk : (1) bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan yang terverifikasi berdasarkan usulan dari masyarakat; (2) penjualan untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ataupun penerimaan badan layanan umum (BLU); dan (3) operasional balai.

Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat lingkup BPBL Lombok berasal dari benih ikan air laut yang diproduksi oleh UPT BPBL Lombok. Adapun komoditas yang diproduksi dan digunakan sebagai komoditas benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat berupa ikan bawal bintang, kakap putih, abalone, ikan hias dan tiram Mutiara, ataupun jenis ikan lainnya dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang bersumber dari DIPA BPBL Lombok, prospek usaha, serta penugasan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya terutama terkait dengan komoditas prioritas untuk mendukung Ekonomi Biru.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 311 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Tahun Anggaran 2025 , BPBL Lombok sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB bertanggung jawab mendistribusikan bantuan benih ikan kepada masyarakat. Spesifikasi benih yang diberikan yaitu :

- a. Bawal bintang ukuran minimal 2,5 cm
- b. Kakap putih ukuran minimal 2,5 cm
- c. Abalone ukuran minimal 2 cm
- d. Ikan hias laut ukuran minimal 2 cm
- e. Tiram mutiara ukuran minimal 1 cm

- **Capaian Kinerja**

Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat UPT BPBL Lombok ditargetkan sebesar 165.386 ekor di Triwulan 4 Tahun 2025. Indikator Kinerja Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat realisasinya sebesar 213.900 ekor dan sudah melebihi target yang sebesar 165.386 ekor pada triwulan 4 ini yang disalurkan ke wilayah Lombok Timur Lombok Barat, Dompu dan Sumbawa. Capaian kinerja benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat Tahun 2025 dapat dilihat pada table 5.

Tabel 6. Capaian benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat BPBL Lombok Tahun 2025

Nama SK : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Air Laut								
Nama Indikator : Benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat								
Triwulan IV Tahun 2025			Realisasi	Perbandingan Realisasi		Realisasi Terhadap	Renstra DJPB 2025-2029	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV Tahun 2024	Tahun 2025 thd Tahun 2024 (%)	Target 2025	Target Tahunan (%)	Target 2025	%Capaian terhadap target akhir renstra
165.386	213.900	129.33%	120%	7.77%	165.386	129.33%	1.949.063	10.97

Keterangan :

- 1) Terdapat IK yang sama di tahun 2024, pada triwulan 4 tahun 2024 dilakukan perhitungan dengan prosentase, berbeda dengan tahun ini satuan target menggunakan (ekor), namun perbandingan tetap dilakukan berdasarkan nilai prosentase capaian 2025.

• Perbandingan Capaian Kinerja (Tahun 2024 dan Satker)

Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa capaian bantuan benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat UPT BPBL Lombok sampai dengan Triwulan 4 tahun 2025 jika dibandingkan dengan target tahun 2025 realisasinya mencapai 129,33% dan jika dibandingkan dengan realisasi triwulan 4 tahun 2025 realisasinya mencapai 7.77 %. Berikut adalah tabel capaian dan dokumentasi bantuan benih ikan.

Tabel 7. Rekapitulasi Bantuan Benih Ikan Air Laut Yang Didistribusikan Ke Masyarakat Tahun 2025

No	Penerima	Nama Kelompok	Provinsi	Kab/Kota	Tanggal Distribusi	Komoditas	Jumlah Benih (ekor)	Keterangan BAST
Jumlah Total							196,400	
1	Awan	Sari Laut	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	13 Januari 2025	Abalone	1,500	B.95/BPBL-L/PB.140/I/2025
2	Awan	Sari Laut	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	13 Januari 2025	Abalone	2,000	B.95/BPBL-L/PB.140/I/2025
3	Abdul Rauf	Muara Biru	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	17 Januari 2025	Kakap Putih	11,000	B.137/BPBL-L/PB.140/I/2025
4	Ahmad	Mutiara Teluk Saleh	Nusa Tenggara Barat	Dompu	24 Februari 2025	Tiram Mutiara	20,000	B.392/BPBL-L/PB.140/II/2025

No	Penerima	Nama Kelompok	Provinsi	Kab/Kota	Tanggal Distribusi	Komoditas	Jumlah Benih (ekor)	Keterangan BAST
5	Esmandoro	Lumba-Lumba	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	24 Februari 2025	Tiram Mutiara	10,000	B.393/BPBL-L/PB.140/II/2025
6	Karimuddin	Suka Maju	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	24 Februari 2025	Tiram Mutiara	10,000	B.394/BPBL-L/PB.140/II/2025
7	Hanan	Kaung Malasso	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	14 April 2025	Tiram Mutiara	10,000	B.698/BPBL-L/PB.140/IV/2025
8	Doni Damara	Civo Putra	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	14 April 2025	Tiram Mutiara	10,000	B.699/BPBL-L/PB.140/IV/2025
9	Syamsul Bahri	Kaung Lestari	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	14 April 2025	Tiram Mutiara	10,000	B.700/BPBL-L/PB.140/IV/2025
10	Abdul Karim	Bawak Waru	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	25 April 2025	Bawal Bintang	20,000	B.784/BPBL-L/PB.140/IV/2025
11	Abdul Karim	Bawak Waru	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	25 April 2025	Bawal Bintang	20,000	B.784/BPBL-L/PB.140/IV/2025
12	H.Erdy	Beriuk Tunas	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	2 Mei 2025	Kakap Putih	20,000	B.834/BPBL-L/PB.140/V/2025
13	Nursin Idris	Kembang Lamun	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	5 Mei 2025	Bawal Bintang	6,000	B.844/BPBL-L/PB.140/V/2025
14	Hamdan	Cantang Berkembang	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	9 Mei 2025	Kakap Putih	5,500	B.898/BPBL-L/PB.140/V/2025
15	Saini	Gedang Siang Bersatu	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	9 Mei 2025	Kakap Putih	5,500	B.899/BPBL-L/PB.140/V/2025
16	Lalu Fajar	Fajar Jaya	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	16 Mei 2025	Bawal Bintang	24,000	B.923/BPBL-L/PB.140/V/2025

No	Penerima	Nama Kelompok	Provinsi	Kab/Kota	Tanggal Distribusi	Komoditas	Jumlah Benih (ekor)	Keterangan BAST
17	Sahman	Bertong Bersatu	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	23 Mei 2025	Bawal Bintang	14,400	B.978/BPBL-L/PB.140/V/2025
18	Samsuddin	Irama Bahari	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	22 September 2025	Bawal Bintang	4,000	B.1785/BPBL-L/PB.140/IX/2025
19	Mujitahid	Gunung Ketapang Jaya	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	31 Oktober 2025	Abalone	3,000	B.2009/BPBL-L/PB.140/X/2025
20	Wawan Nuryahya	Tanjung Kelor	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	24 Oktober 2025	Ikan hias (ocellaris)	2.000	B.2009/BPBL-L/PB.140/X/2025
21	Wawan Nuryahya	Tanjung Kelor	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	24 Oktober 2025	Bawal Bintang	5.000	B.2009/BPBL-L/PB.140/X/2025



Gambar 9. Distribusi Bantuan Benih Ikan Air Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat.

Perbandingan capaian realisasi bantuan benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat oleh UPT BPBL Lombok jika dibandingkan dengan UPT DJPB lainnya seperti BBPBL Lampung, BBPBL Ambon dan BPBL Batam dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 8. Perbandingan Capaian Benih Ikan Air Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat BPBL Lombok Tahun 2025 Dengan UPT DJPB Lain

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	165,386	213,900	129.33
BPBL Ambon	212,256	214,000	100.82
BPBL Batam	250,211	279,000	111.51
BBPBL Lampung	402,368	404,900	100.62

Sampai dengan Triwulan ke-4 Tahun 2025 prosentase capaian realisasi indikator kinerja benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat jika dibandingkan dengan UPT laut DJPB lainnya yakni BPBL Ambon, BPBL Batam dan BPBL Lampung, BPBL Lombok mendapat prosentase realisasi tertinggi yakni 129.33%, dan diikuti oleh BPBL Batam sebesar 111.51%, BPBL Ambon sebesar 100.82% dan BBPBL Lampung (100.62%).

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Indikator kinerja benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat didukung dengan anggaran sebesar Rp 992.315.000 dimana pada Triwulan 4 Tahun 2025 ini telah terealisasi sebesar Rp.991.167.702 atau sebesar 99.88% dari pagu untuk kegiatan perencanaan dan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2025, sumber anggaran benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat berasal dari rupiah murni (RM).

Penyerapan anggaran produksi benih ikan air laut yang akan disalurkan ke masyarakat pada Triwulan ke 4 Tahun 2025 masuk kategori *on the track* dan sudah mensupport capaian indikator kinerja benih ikan air laut yang didistribusikan ke masyarakat. Anggaran yang tersedia mensupport untuk kegiatan persiapan produksi, pelaksanaan produksi dan evaluasi. Selain itu, kegiatan produksi benih ikan yang disalurkan ke masyarakat oleh satker BPBL Lombok mendapat efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

- **Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

Tidak terdapat kendala yang cukup berarti dalam realisasi Indikator Kinerja ini pada triwulan ke-4, distribusi benih Abalone dan ikan hias untuk realisasi capaian benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat hingga periode ke 4 Tahun 2025 telah terdistribusi kepada kelompok masyarakat pada bulan Oktober tahun 2025.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya**

Pada triwulan 3 tahun 2025, komoditas abalone dan ikan hias belum melaksanakan distribusi benih karena ditargetkan pada triwulan ke-4 tahun 2025. Telah dilakukan optimalisasi dari sisi teknis produksi untuk menunjang produksi komoditas bawal bintang, kakap putih, ikan hias, tiram Mutiara dan abalone dan juga sudah dilakukan koordinasi dengan penyuluh perikanan setempat terkait penyaluran program benih ikan air laut yang didistribusikan ke masyarakat, dan distribusi telah dilaksanakan pada awal triwulan ke-4.

- **Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan pelaksanaan kegiatan benih ikan air laut yang akan didistribusikan ke masyarakat oleh satker BPBL Lombok demi menunjang keberhasilan pencapaian kinerja rencana aksi yang dapat dilakukan berupa :

- Melakukan koordinasi dengan penyuluh dan dinas kelautan dan perikanan setempat guna mendukung kelancaran pelaksanaan program bantuan benih ikan yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2026.

2) Produksi Calon Induk Unggul untuk Operasional UPT BPBL Lombok

Indikator Kinerja “ Produksi Calon Induk Unggul untuk Operasional UPT BPBL Lombok” merupakan salah satu kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), di mana Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki tugas dan fungsi untuk memproduksi dan menyediakan calon induk unggul. Hasil produksi calon induk unggul dapat dipergunakan untuk : (1) bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan yang terverifikasi berdasarkan usulan dari masyarakat; (2) penjualan untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP); dan (3) operasional untuk balai memperbanyak indukan.

Calon induk unggul yang diproduksi lingkup BPBL Lombok berasal dari calon induk ikan air laut. Adapun komoditas calon induk unggul ikan air laut yang diproduksi BPBL Lombok untuk

indicator ini adalah komoditas bawal bintang, kakap putih, abalone, ikan hias dan tiram Mutiara, tentunya dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang bersumber dari DIPA BPBL Lombok, prospek usaha serta penugasan DJPB terutama terkait dengan komoditas prioritas untuk mendukung Ekonomi Biru.

Adapun capaian indikator ini ini dihitung persemester dengan target produksi calon induk ikan air laut tahunan sebesar 948 ekor. Cara penghitungan IKU ini adalah dengan menghitung hasil produksi calon Induk BPBL Lombok yaitu : Tiram Mutiara, Abalone, Ikan Hias, bawal bintang dan kakap putih.

- **Capaian kinerja**

Produksi calon induk di UPT BPBL Lombok di targetkan sebanyak 948 ekor pada Triwulan ke-4 Tahun 2025. Pada triwulan ini target produksi calon induk untuk operasional UPT BPBL Lombok dan dilakukan perhitungan secara semesteran pada semester ke-2 atau Triwulan ke-4 Tahun 2025 sebanyak 948 ekor.

Tabel 9. Capaian Produksi Calon Induk Unggul Untuk Operasional UPT BPBL Lombok Tahun 2025

Nama SK : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Air Laut								
Nama Indikator : Produksi Calon Induk Unggul untuk operasional UPT BPBL Lombok								
Triwulan IV Tahun 2025			Realisasi		Target 2025 (ekor)	Realisasi Terhadap	Renstra DJPB 2025-2029	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Triwulan IV Tahun 2024	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 thd Tahun 2024 (%)		Target Tahunan (%)	Target 2025	% Capaian terhadap target akhir renstra
948	1.155	121.83	4.042	-71.42%	948	121.83	370.727	0.31%

Keterangan :

1) Terdapat IK yang sama di tahun 2024, perhitungan dilakukan pada triwulan ke 4

Berikut adalah tabel capaian produksi calon induk unggul dan dokumentasi kegiatan produksi calon induk unggul.

Tabel 10. Realisasi Capaian Produksi Induk Unggul Satker BPBL Lombok Tahun 2025

No	Produksi Calon Induk	Bulan												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Bawal Bintang	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
2	Kakap Putih	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
3	Tiram Mutiara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	224
4	Abalone	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	0	100
5	Ikan Hias	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	33	0	43
6	Lobster	0	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0	0	188
					0	0	50	188	0	610	0	83	224	1.155

- Perbandingan Capaian Kinerja (Tahun 2024 dan Satker)**

Dari Tabel 10 dapat diketahui bahwa capaian produksi calon induk unggul untuk operasional UPT BPBL Lombok Tahun 2025 mencapai 1.155 ekor calon induk dari target sebanyak 948 ekor atau mencapai 121.83% dari target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan renstra BPBL Lombok maka capaian yang sudah tercapai tidak dapat dibandingkan karena belum ditetapkannya target dalam renstra BPBL Lombok Tahun 2025-2029.

Tabel 11. Perbandingan Produksi Calon Induk Unggul Ikan Laut Untuk Operasional BPBL Lombok Tahun 2025 Dengan UPT DJPB Lain

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	948	1.155	121.83
BPBL Ambon	1.134	1.278	112.69
BPBL Batam	1.820	2.206	121.21
BBPBL Lampung	902	915	101.44

Capaian produksi calon induk unggul untuk operasional UPT BPBL Lombok jika dibandingkan dengan UPT Laut DJPB lainnya, dikategorikan paling tinggi diantara tiga UPT laut lainnya yakni BPBL Batam, BPBL Lampung dan BPBL Batam indikator kinerja ini bersifat semesteran dan dilakukan penghitungan pada semester kedua atau Triwulan ke-4 Tahun 2025.

- Realisasi Penggunaan Anggaran**

BPBL Lombok telah merealisasikan anggaran sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 untuk memproduksi calon induk untuk operasional UPT sebesar Rp. 255.201.249,- atau sebesar 99.70% dari pagu anggaran sebesar Rp. 255.960.000,-. Sumber anggaran produksi calon induk unggul untuk operasional UPT BPBL Lombok berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNP).

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

Produksi calon induk unggul untuk operasional UPT BPBL Lombok pada Triwulan ke-4 Tahun 2025 tidak mengalami kendala yang cukup berarti, Indikator kinerja ini berjalan on the track dan BPBL Lombok telah mengupayakan produksi calon induk pada komoditas lainnya seperti tiram Mutiara, ikan hias, bawal bintang dan kakap putih yang sudah ditargetkan pada Semester ke-2 atau Triwulan ke-4 Tahun 2025 terealisasi sesuai dengan target.

Hasil produksi calon induk unggul untuk operasional UPT BPBL Lombok dapat mendukung kegiatan produksi budi daya untuk bantuan dan operasional UPT BPBL Lombok dalam mendukung keberhasilan kegiatan prioritas nasional berbasis ekonomi biru.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya**

Pada periode sebelumnya (TW 3 2025) terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah pakan dan serangan penyakit pada triwulan ke-3. Telah dilakukan optimalisasi anggaran yang bersumber dari PNP dengan upaya pemenuhan PNBK agar belanja kegiatan yang bersumber dari anggaran ini dapat dilaksanakan, sehingga kebutuhan pakan untuk calon induk dapat terlaksana, sedangkan serangan penyakit pada triwulan-3 telah dilakukan upaya penanganan berupa penambahan penggunaan vitamin dan suplemen pada pakan sehingga dapat meningkatkan ketahanan komoditas terhadap penyakit.

- **Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan pelaksanaan kegiatan produksi calon induk unggul untuk operasional lingkup UPT BPBL Lombok demi menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dapat dilakukan apabila parameter untuk pemenuhan capaian produksi calon induk dapat terkendali, upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung semua faktor kendali produksi tersebut agar produksi calon induk unggul untuk operasional UPT BPBL Lombok di triwulan selanjutnya dapat tercapai sehingga perlu dilakukan Langkah strategis berupa :

- a) Perlu dilakukan prosedur pemeliharaan sesuai anjuran CBIB dan biosecurity pada fasilitas produksi calon induk

Dibawah ini adalah dokumentasi calon induk yang diproduksi sampai dengan triwulan ke-4 Tahun 2025



Gambar 10. Calon Induk Ungul Yang Diproduksi Untuk Operasional UPT BPBL Lombok

4) Sampel Penyakit Ikan Air Laut yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Satker BPBL Lombok

Indikator kinerja “Sampel Penyakit Ikan Air Laut yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan satker BPBL Lombok” merupakan salah satu kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) dimana Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan.

Capaian indicator ini dihitung berdasarkan jumlah sampel layanan Kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji terdiri dari pengujian sampel kualitas air, mikrobiologi dan biologi molekuler. Sampel layanan Kesehatan ikan berasal dari hasil monitoring pengambilan sampel internal UPT maupun dari masyarakat umum. Adapun pengukuran indicator kinerja ini bersifat triwulanan dengan target tahunan sebanyak 374 sampel. Realisasi pelayanan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Lombok Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 11 dibawah ini.

Tabel 12. Realisasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Satker BPBL Tahun 2025

No	Ruang Lingkup	Triwulan 4			% Capaian
		Satuan	Target	Realisasi	
1	Kualitas Air	Sampel	238	3.322	1.395
2	Patologi	Sampel	22	61	277
3	Mikrobiologi	Sampel	70	76	108
4	Biologi Molekuler	sampel	44	366	831

Capaian sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan satker BPBL Lombok sampai dengan triwulan 4 tahun 2025 dapat dilihat Tabel 12.

• Capaian Kinerja

Capaian sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan satker BPBL Lombok sampai dengan triwulan ke-4 Tahun 2025 sebanyak 3.825 sampel dari target Triwulan ke-4 sebesar 374 sampel atau tercapai sebesar 1022% dibanding target.

Tabel 13. Capaian Sampel Penyakit Ikan Air Laut yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Satker BPBL Lombok Tahun 2025

Nama SK : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Air Laut								
Nama Indikator : Sampel Penyakit ikan yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Lombok								
Triwulan IV Tahun 2025			Realisasi Triwulan IV Tahun 2024	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 thd Tahun 2024 (%)	Target 2025 (sampel)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Renstra DJPB 2025-2029	
Target	Realisasi	Capaian (%)					Target 2025	%Capaian terhadap target akhir renstra
374	3.825	1.022	390.47	162	374	1.022	1.993	191.92

Keterangan :

1) Terdapat IK yang sama di tahun 2024

• Perbandingan Capaian Kinerja (Tahun 2024 dan satker)

Dari Tabel 13 dapat diketahui bahwa capaian sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Lombok sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 mencapai 162 %. Apabila dibandingkan dengan renstra BPBL Lombok maka capaian yang sudah tercapai tidak dapat dibandingkan karena belum ditetapkannya target dalam renstra BPBL Lombok Tahun

2025-2029. Di bawah ini adalah capaian sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan satker BPBL Lombok jika dibandingkan dengan UPT laut lainnya.

Tabel 14. Perbandingan Capaian Sampel Penyakit Ikan Air Laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Tahun 2025 dengan UPT DJPB lain

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	374	3.825	1022
BPBL Ambon	296	622	210
BPBL Batam	744	1348	181.18
BBPBL Lampung	529	1.676	316

Perbandingan capaian sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan satker BPBL Lombok sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 berdasarkan Tabel 14 dapat diketahui bahwa capaian BPBL Lombok baik secara volume maupun prosentase memiliki nilai lebih tinggi dari ketiga UPT laut lainnya. Di bawah ini adalah dokumentasi kegiatan pengujian sampel di BPBL Lombok Tahun 2025.



Gambar 11. Pengujian Ikan Air Laut Dalam Rangka Layanan Laboratorium Penguji

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

BPBL Lombok telah merealisasikan anggaran pengujian penyakit ikan air laut dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan satker BPBL Lombok sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 sebesar Rp. 144.561.027,- atau persentasenya mencapai 99,9% dari pagu sebesar Rp. 144.570.000,-. Sumber anggaran kegiatan pelayanan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan satker BPBL Lombok berasal dari penerimaan negara bukan pajak PNBP (PNP) BPBL Lombok dan tidak ada lock pagu anggaran untuk efisiensi pada kegiatan ini.

- **Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

Kegiatan pengujian penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan satker BPBL Lombok berjalan on the track hingga triwulan ke-4 Tahun 2025, tidak terdapat permasalahan teknis yang cukup berarti pada triwulan ke-4 untuk pemenuhan target pada indikator kinerja ini.

- **Tindak lanjut triwulan sebelumnya**

Permasalahan teknis berupa alat-alat pengujian yang berusia tua dan anggaran yang terbatas dalam pembelian bahan/reagen telah ditanggulangi dengan optimalisasi penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran PNBP.

- **Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan pelaksanaan kegiatan pengujian sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan satker BPBL Lombok demi menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dengan rencana aksi berupa :

- a) Perlu dilakukan koordinasi kepada PPK dan pihak terkait untuk pelaksanaan pengadaan peralatan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan untuk Tahun Anggaran 2026, terutama untuk bahan reagensia dan peralatan yang bersifat indent atau perlu dilakukan pemesanan dengan jangka waktu tertentu, agar proses pemenuhan target kinerja untuk indikator kinerja ini di tahun 2026 tidak terkendala.

5) Sampel Monitoring Penyakit Ikan dan AMR yang Diuji Satker BPBL Lombok

Indikator kinerja "Sampel Monitoring Penyakit Ikan dan AMR yang diuji satker BPBL Lombok" merupakan salah satu kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

(DJPB), dimana Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan pengujian *Antimicrobial Resistance* (AMR).

Indikator ini merupakan jumlah sampel yang diuji untuk mengetahui nilai resistensi antibiotik terhadap bakteri yang diisolasi dari ikan dan air budi daya. Resistensi antimikroba adalah resistensi terhadap antimikroba yang efektif untuk terapi infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur, virus dan parasite. Bakteri adalah penyebab infeksi terbanyak maka penggunaan antibakteri yang dimaksud adalah penggunaan antibiotik. Pemilihan dan penggunaan antibakteri tidak akan menjadi permasalahan yang serius apabila digunakan secara tepat sesuai dengan jenis bakteri yang menginfeksi, dosis dan sesuai dengan mekanisme kerja antibakteri tersebut.

Indikator kinerja sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji satker BPBL Lombok dihitung berdasarkan jumlah sampel hasil Surveilans Resistensi Antimikroba (AMR) yang diuji dihitung berdasarkan jumlah sampel . Sampel layanan pengujian AMR berasal dari monitoring dan pengambilan sampel internal UPT maupun dari masyarakat umum. Adapun pengukuran indikator kinerja ini bersifat triwulanan dengan target tahunan sebanyak 16 sampel.

• Capaian Kinerja

Capaian sampel surveilan AMR yang diuji satker BPBL Lombok sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 sebanyak 17 sampel atau tercapai 106.25% dibanding target triwulan 4 yakni 16 sampel. Capaian sampel surveilan AMR yang diuji satker BPBL Lombok Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Capaian Sampel Surveilans AMR yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Satker BPBL Lombok Tahun 2025

Nama SK : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Air Laut								
Nama Indikator : Sampel Surveilans AMR yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Lombok								
Triwulan IV Tahun 2025			Realisasi		Target 2025 (sampel)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Renstra DJPB 2025-2029	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Triwulan IV Tahun 2024	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 thd Tahun 2024 (%)			Target 2025	%Capaian terhadap target akhir renstra
16	17	106.25	125.71	-15.48%	16	106.25	145	11.72

Keterangan :

- 1) Terdapat IK yang sama di tahun 2024 namun target maupun capaian dihitung dengan jumlah sampel
- 2)

- **Perbandingan Capaian Kinerja (Tahun 2024 dan satker)**

Dari Tabel 15 dapat diketahui bahwa capaian sampel surveilan AMR yang diuji satker BPBL Lombok sampai dengan triwulan 4 Tahun 2025 terhadap capaian di 2024 lebih rendah sebanyak -15.48%. Apabila dibandingkan dengan renstra BPBL Lombok maka capaiannya tidak dapat dibandingkan karena belum ditetapkannya target dalam renstra BPBL Lombok Tahun 2025-2030.

Tabel 16. Perbandingan Capaian Sampel Surveilans AMR Yang Diuji Satker BPBL Lombok Tahun 2025 Dengan UPT DJPB Lain

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	16	17	106.25
BPBL Ambon	17	22	129.41
BPBL Batam	16	19	118.75
BBPBL Lampung	26	32	123.07

Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pengujian sampel surveilan AMR



Gambar 12. Pengujian AMR

Perbandingan capaian sampel surveilan AMR yang diuji satker BPBL Lombok sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 berdasarkan Tabel 16, dapat diketahui bahwa prosentase capaian BPBL Lombok masih lebih rendah dari BPBL Ambon, BPBL Batam dan BBPBL Lampung, prosentase capaian BPBL Ambon mencapai 129.41 % , BPBL Batam 118.75% dan BBPBL Lampung sebesar 123.07% sedangkan BPBL Lombok hanya sebesar 106.25%.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

BPBL Lombok telah merealisasikan anggaran sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 untuk pelayanan pengujian sampel surveilan AMR yang diuji satker BPBL Lombok sebesar Rp.14.623.251,- atau sebesar 99,99% dari pagu sebesar Rp.14.624.000,-. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2025, sumber anggaran pelayanan pengujian sampel surveilan AMR yang diuji satker BPBL Lombok berasal dari penerimaan negara bukan pajak PNBP (PNP) BPBL Lombok dan tidak ada lock pagu anggaran pada kegiatan ini.

- **Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

Sampai dengan Triwulan ke-4 Tahun 2025 capaian indikator ini telah memenuhi target sebesar 141%. Adapun pelayanan pengujian sampel surveilan AMR yang diuji satker BPBL Lombok terkendala berupa keterbatasan anggaran perjalanan dinas untuk monitoring dan sampling penyakit ikan untuk mendapatkan komoditas target untuk pengujian AMR.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya**

Pada periode sebelumnya (TW ke 3 Tahun 2025) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja berupa Presentase Pengujian Antimikrobia Resistance (AMR) yang diuji satker BPBL Lombok.

- **Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian sampel surveilan AMR yang diuji satker BPBL Lombok demi menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dapat dilakukan berupa :

- Melakukan pengujian AMR pada sampel ikan yang terindikasi penyakit guna pemenuhan realisasi indikator pengujian AMR ini.

a) 3.2.3 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 3 TERKELOLANYA SISTEM PERIKANAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT

Sasaran Terkelolanya Sistem Perikanan Budidaya Rumput Laut di BPBL Lombok hanya memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

1) Bibit Rumput Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Lombok

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 297 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah berupa Bibit Rumput Laut Tahun Anggaran 2025, BPBL Lombok sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB bertanggung jawab mendistribusikan bantuan bibit rumput laut kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan kepada kelompok penerima bantuan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Strannya terdiri atas :

- *Kappaphycus alvarezzi* / *Eucheuma cottonii*
- *Kappaphycus Striatum*/Sakul
- *Eucheuma Spinosum*
- *Gracilaria Sp* dan/atau
- Jenis lainnya sesuai dengan karakteristik perairan.

Bibit hasil kultur jaringan atau bibit lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan asal atau hasil verifikasi oleh UPT DJPB atau dinas prov/kab/kota; Thalus : Bercabang banyak, bersih, tidak berlendir, tidak patah, sehat dantidak ditempli lumut dan organisme lainnya

• Capain Kinerja

Indikator Kinerja Bibit Rumput Laut baru akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun, ditargetkan sebanyak 1.623 Kg yang ditargetkan pada triwulan ke-4 tahun 2025. Namun demikian sebelumnya perlu dilakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima Bantuan Bibit Rumput Laut tahun 2025.

Tabel 17. Bibit Rumput Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat Satker BPBL Lombok Tahun 2025

Nama SK : Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut								
Nama Indikator :Bibit Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok								
Triwulan IV Tahun 2025			Realisasi		Perbandingan Realisasi Tahun 2025 thd Tahun 2024 (%)	Realisasi Terhadap	Renstra DJPB 2025-2029	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Triwulan IV Tahun 2024	Target 2025 (Kg)		Target Tahunan (%)	Target 2025	%Capaian terhadap target akhir renstra
1 623	2.760	170	100	70	1.623	2.760	37.500	7.36

Keterangan

1). Terdapat IK yang sama di tahun 2024 namun target dihitung pada akhir tahun 2025

- **Perbandingan Capaian Kinerja (Tahun 2024 dan Satker)**

Dari Tabel 17 dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat satker BPBL Lombok sampai dengan Triwulan ke-4 Tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai 70%. Apabila dibandingkan dengan renstra BPBL Lombok maka capaian yang sudah tercapai tidak dapat dibandingkan karena belum ditetapkan target dalam renstra BPBL Lombok Tahun 2025-2029.

Tabel 18. Perbandingan Capaian Bibit Rumput Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat Satker BPBL Lombok Tahun dengan UPT DJPB lain.

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	1.623	2.760	170
BPBL Ambon	3.135	3.180	101.43
BPBL Batam	0	0	0.00
BBPBL Lampung	1.797	2.400	133.55

Perbandingan capaian indikator kinerja bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat satker BPBL Lombok sampai dengan Triwulan ke 4 Tahun 2025 berdasarkan Tabel 18 dapat diketahui bahwa capaian BPBL Lombok secara prosentase jika dibandingkan dengan UPT laut lainnya memiliki prosentase tertinggi. Dibawah ini adalah dokumentasi kegiatan penyaluran bantuan bibit rumput laut kultur jaringan ke masyarakat Tahun 2025.



Gambar 13. Penyaluran bantuan bibit rumput kultur jaringan.

Realisasi Penggunaan Anggaran

BPBL Lombok telah merelisasikan anggaran sampai dengan Triwulan ke 4 Tahun 2025 untuk indikator kinerja bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat satker BPBL Lombok sebesar Rp.113.515.410,- atau sebesar 99,95% dari pagu anggaran sebesar Rp.113.574.000,- untuk belanja kebutuhan sarana budidaya rumput laut skala massal dan intermediate, belanja bahan mikropropagul dan peralatan kerja. Lock pagu anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.371.000,-.

- **Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

Tidak terdapat kendala yang berarti dalam indikator kinerja bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat satker BPBL Lombok target ditetapkan pada triwulan ke-4 tahun 2025 dan terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun anggaran yang telah terealisasi dari rupiah murni (APBN) dan dipergunakan untuk kegiatan belanja sarana budidaya rumput laut skala massal dan intermediate, belanja bahan mikropropagul dan peralatan kerja yang mendukung kegiatan produksi bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat satker BPBL Lombok.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya**

Pada periode sebelumnya (TW ke 3 Tahun 2025) tidak terdapat permasalahan disebabkan target capaian indikator kinerja bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat dan sudah terjadwalkan pada akhir tahun 2025 (TW ke 4 Tahun 2025).

- **Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya**

Rekomendasi untuk perbaikan/peningkatan pelaksanaan bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat satker BPBL Lombok demi menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, sehingga rencana aksi yang dapat dilakukan berupa :

- a) Melaksanakan kegiatan produksi bibit rumput laut kultur jaringan dan menyalurkan ke masyarakat sesuai target rencana kerja setelah dilakukan penetapan lokasi calon penerima bantuan di tahun 2026.
- b) Perlu dilakukan tata kelola budidaya rumput laut sesuai anjuran.

3.2.4 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 4

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok memiliki 12 (dua) indikator kinerja yaitu :

1) Nilai PM SAKIP Satker BPBL Lombok

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penilaian PM SAKIP yang dilakukan melalui LKE Inspektorat Jenderal dengan tujuan agar pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntabilitas dan peraturan yang ada

Nilai PM SAKIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

Nilai PM SAKIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . Terdapat 5 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%).

• Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, Berdasarkan surat Ditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.4387/DJPB.1/TU.210/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025, BPBL Lombok memperoleh nilai 84 dari Target sebesar 84.

• Perbandingan Capaian Kinerja (Tahun 2024 dan Satker)

IKU PM SAKIP naik sebesar 2.38% dibandingkan dengan Tahun 2024, adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 19. : Nilai PM SAKIP Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : Nilai PM SAKIP Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Tahun 2025			Realisasi	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 thd Tahun 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap	Renstra DJPB 2025-2029	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Triwulan IV Tahun 2024			Target Tahunan (%)	Target 2025	%Capaian terhadap target akhir renstra
84	84	100	82	2.38	84	100	84	100

Tabel 20. Perbandingan Nilai PM SAKIP BPBL Lombok dibandingkan dengan Satker lainnya

Nilai Akuntabilitas Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025							
NO	UNIT KERJA	2025					
		PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	25,20	24,00	13,50	22,50	85,20	A
2	DIREKTORAT IKAN AIR LAUT	25,20	24,00	12,75	22,50	84,45	A
3	DIREKTORAT RUMPUT LAUT	25,20	24,00	13,50	22,50	85,20	A
4	DIREKTORAT IKAN AIR TAWAR	25,20	24,00	13,05	22,50	84,75	A
5	DIREKTORAT IKAN AIR PAYAU	25,20	23,10	12,75	22,50	83,55	A
6	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	25,20	24,00	13,50	22,50	85,20	A
7	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	24,00	24,00	13,50	22,50	84,00	A
8	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	25,20	24,00	13,50	22,50	85,20	A
9	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	25,20	26,10	13,80	20,50	85,60	A
10	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	25,20	24,00	13,50	22,50	85,20	A
11	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR JAMBI	25,20	24,00	13,50	22,50	85,20	A
12	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDANGIN	25,20	24,00	13,50	22,50	85,20	A
13	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	25,20	24,60	12,30	22,50	84,60	A
14	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	24,00	24,00	13,50	22,50	84,00	A
15	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	25,50	24,00	13,50	20,50	83,50	A
16	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	25,20	24,00	13,50	22,50	85,20	A
17	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	25,20	26,10	13,80	20,50	85,60	A
18	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA, KARAWANG	27,00	27,00	12,00	22,50	88,50	A
19	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM, BALI	25,20	25,20	13,50	22,50	86,40	A
20	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN, SERANG	24,00	24,00	13,50	22,50	84,00	A

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran pada IKU ini

- **Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

Tahun 2025 nilai PM SAKIP adalah 84% dimana capaian tersebut sama dengan target PM SAKIP Tahun 2025 dikarenakan BPBL Lombok mampu menyusun indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dan relevan serta pelaporan serta ketersediaan dokumen SAKIP yang relatif lengkap. Namun demikian Perencanaan Kinerja dianggap masih kurang tinggi nilainya terutama dalam menyusun Matriks Peran Hasil Pegawai

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya**

Permasalahan pada Triwulan sebelumnya adalah perubahan perjanjian kinerja dan dokumen-dokumen pendukung lainnya karena adanya pergantian pimpinan dan juga melakukan penginputan dalam menu yang baru di aplikasi *kinerjaku*, sehingga Tindak lanjut yang dilakukan pada Triwulan ini adalah menyesuaikan dokumen-dokumen yang terbaru serta dilakukan pembagian tugas dalam mengisi menu yang baru di aplikasi *kinerjaku* yaitu realisasi rencana aksi

- **Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya**

Rencana Aksi Triwulan selanjutnya adalah menyusun Perjanjian Kinerja 2026 dan melakukan Dialog Kinerja Organisasi untuk membentuk Tim Kerja dan pembagian peran hasil ke seluruh pegawai BPBL Lombok.

2) Indeks Profesionalitas ASN lingkup satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu :

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS,
2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis;

3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

- **Capaian Kinerja**

Pada Tahun 2025, Berdasarkan surat Ditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.209/DJPB.1/KP.160/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Capaian IKU IP-ASN Tahun 2025 Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya, BPBL Lombok memperoleh nilai 81,63 dari Target sebesar 81.

- **Perbandingan Capaian Kinerja (Tahun 2024 dan Satker)**

IKU PM SAKIP turun sebesar 4.99% jika dibandingkan dengan Tahun 2024, adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Indeks profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : Indeks profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Lombok								
Tahun 2025			Realisasi	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 thd Tahun 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap	Renstra DJPB 2025-2029	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV Tahun 2024			Target Tahunan (%)	Target 2025	%Capaian terhadap target akhir renstra
		(%)						
81	81.63	100.78%	85.92	-4.99	81	100.78%	81	100

Tabel 22. Perbandingan Indeks profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Lombok dengan SatkerDJPB Lain

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total	Kategori
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin		
1.	Sekretariat DJPB	22,12	26,23	25,30	5,00	78,66	Sedang
2.	Dit Ikan Air Tawar	23,51	26,06	25,95	5,00	80,52	Sedang
3.	Dit Ikan Air Payau	22,57	28,01	25,71	5,00	81,29	Tinggi
4.	Dit Ikan Air Laut	23,19	27,35	25,69	5,00	81,24	Tinggi
5.	Dit Rumput Laut	23,09	29,43	25,75	5,00	83,26	Tinggi
6.	Dit Prasarana dan Sarana	22,34	30,55	25,16	5,00	83,05	Tinggi
7.	BBPBAP Jepara	22,78	30,22	25,31	5,00	83,30	Tinggi
8.	BPBAT Sukabumi	21,98	32,57	25,47	5,00	85,01	Tinggi
9.	BBPBL Lampung	22,11	34,27	27,89	5,00	89,27	Tinggi
10.	BPBAP Situbondo	22,20	30,12	25,49	5,00	82,80	Tinggi
11.	BPBAP Takalar	21,74	34,36	26,14	5,00	87,24	Tinggi
12.	BPBAP Ujung Batee	22,29	32,43	25,85	5,00	85,64	Tinggi
13.	BPBAT Mandiangin	21,86	32,65	25,00	5,00	84,52	Tinggi
14.	BPBAT Sei Gelam, Jambi	22,19	34,84	25,16	5,00	87,19	Tinggi
15.	BPBAT Tatelu	22,31	33,30	25,58	5,00	86,18	Tinggi
16.	BPBL Ambon	22,36	32,43	25,85	5,00	85,64	Tinggi
17.	BPBL Batam	21,67	34,38	26,57	5,00	87,62	Tinggi
18.	BPBL Lombok	21,55	30,09	25,00	5,00	81,63	Tinggi
19.	BLUPPB Karawang	21,00	35,71	26,18	5,00	87,90	Tinggi
20.	BPIUUK Karangasem	22,26	31,57	25,00	5,00	83,83	Tinggi
21.	BPKIL Serang	22,12	31,88	25,00	5,00	84,00	Tinggi
Rata-Rata		22,18	31,52	25,68	5,00	84,37	Tinggi

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran pada IKU ini

- **Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

Tahun 2025 nilai IP ASN adalah 81.63% dimana lombok mampu melampaui target karena semua pegawai telah mengikuti diklat atau bimtek atau in house training yang diselenggarakan oleh Balai maupun melalui secara mandiri melalui online.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya**

Permasalahan pada triwulan sebelumnya adalah masih adanya pegawai yang bernilai “rendah” atau “sedang”.dan Tindak lanjut pada Triwulan ini adalah mendorong pegawai tersebut untuk mengikuti beberapa bimtek secara online.

- **Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya**

Rencana Aksi Triwulan selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Ditjen PB terkait adanya disparitas data pendidikan yang membuat nilai IP ASN BPBL Lombok kurang maksimal.

3) Hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK di Satker Balai Perikanan Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Lombok

Unit Kerja yang berpredikat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan pelayanan publik.

• Capaian Kinerja

Berdasarkan surat Ditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.526/ITJ.5/KP.730/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan KKP Tahun 2022, BPBL Lombok memperoleh nilai 82,20 dari Target sebesar 76.

• Perbandingan Capaian Kinerja (Tahun 2024 dan Satker)

IKU ini nilainya sama dengan Tahun 2024 yaitu sebesar 82,20 , adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 23. Hasil penilaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : Hasil penilaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi								
Tahun 2025			Realisasi	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 thd Tahun 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap	Renstra DJPB 2025-2029	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV Tahun 2024			Target Tahunan (%)	Target 2025	%Capaian terhadap target akhir renstra
		(%)						
76	82.2	108.16%	82.20	0	76	108.16%	76	108.16

Tabel 24. Perbandingan Hasil penilaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi BPBL Lombok dengan UPT DJPB Lain

UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Prosentase
BPBL Lombok	76	82.2	108.16
BPBL Ambon	76	79.78	104.97
BPBL Batam	76	81.51	107.25
BBPBL Lampung	76	83.13	109.38

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran pada IKU ini

- **Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

nilai Hasil Pembangunan Zona Integritas adalah 82.2% dimana capaian tersebut nilainya lebih tinggi dari target dikarenakan telah dilaksanakan pengumpulan dokumen di 6 area dan konsistensi pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BPBL Lombok. Namun demikian, permasalahan dalam pengumpulan dokumen tersebut adalah masih adanya dokumen yang kurang tepat sehingga perlu dilakukan monitoring secara berkala atas hasil dokumen yang disampaikan.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya**

Pada Triwulan sebelumnya dilakukan pembentukan Tim WBK yang baru sesuai dengan arahan pimpinan yang baru dan mulai rutin dilaksanakan rapat internal dan diskusi antar ketua tim area.

- **Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya**

Rencana Aksi Pada Tahun 2026 adalah akan dilakukan pembentukan Tim di awal tahun, pengusulan agen perubahan Tahun 2026 dan penyusunan rencana kerja Tahun 2026.

4) Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBL Lombok

Prosentase penyelesaian LHP BPK BPBL Lombok merupakan penghitungan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan/ LHP BPK yang dilaksanakan di BPBL Lombok sebagai bentuk komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas yang dapat berpengaruh pada persepsi laporan keuangan BPBL Lombok.

- **Capaian Kinerja**

Berdasarkan surat Ditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.205/DJPB.1/KU.520/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Capaian IKU Prosentase Penyelesaian LHP BPK-RI, BPBL Lombok memperoleh nilai 100 dari Target sebesar 100.

- **Perbandingan Capaian Kinerja (Tahun 2024 dan Satker)**

IKU Penyelesaian Temuan BPK capaiannya sama dengan Tahun 2024, adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 25. Prosentase penyelesaian LHP BPK atas Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : Prosentase penyelesaian LHP BPK atas Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Tahun 2025			Realisasi	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 thd Tahun 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap	Renstra DJPB 2025-2029	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Triwulan IV Tahun 2024			Target Tahunan (%)	Target 2025	%Capaian terhadap target akhir renstra
100	100	100.00%	100	0	100	100.00%	100	100

Berikut dilampirkan juga nilai IKU Prosentase penyelesaian LHP BPK BPBL Lombok dibandingkan dengan Satker lainnya :

Tabel 26. Perbandingan Prosentase penyelesaian LHP BPK atas Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dengan UPT DJPB Lain

No	Unit Kerja	Temuan LHP BPK TA 2025	Temuan yang diselesaikan	Tuntas (%)	Sisa
1	BBPBL Lampung	-	-	100%	-
2	BBPBAT Sukabumi	161.831.881	161.831.881	100%	-
3	BBPBAP Jepara	-	-	100%	-
4	BPBL Ambon	-	-	100%	-
5	BPBAP Ujung Batee	-	-	100%	-
6	BPBAP Takalar	-	-	100%	-
7	BPBAT Sungai Gelam	-	-	100%	-
8	BPBAT Tatelu	-	-	100%	-
9	BPBAP Situbondo	17.180.031	17.180.031	100%	-
10	BPBAT Mandiangin	-	-	100%	-
11	BPBL Lombok	-	-	100%	-
12	BPBL Batam	-	-	100%	-
13	BLUPPB Karawang	69.360.003	69.360.003	100%	-
14	BPIUUK Karangasem	-	-	100%	-
15	BPKIL Serang	-	-	100%	-

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran pada IKU ini

- **Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

Nilai LHP BPK BPBL Lombok adalah 100% dikarenakan BPBL Lombok telah melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan dokumen dan ketentuan yang berlaku.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya**

Tidak ada permasalahan sehingga tidak ada yang harus ditindak lanjuti, penyusunan dokumen keuangan tetap dilakukan sesuai prosedur yang berlaku

- **Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya**

Penyusunan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker BPBL Lombok

Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPBL Lombok adalah prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan di BPBL Lombok yang telah ditindaklanjuti dengan status tuntas. Cara perhitungan ini adalah dokumen yang tindak lanjutnya telah tuntas diselesaikan dibandingkan dengan jumlah temuan hasil pengawasan.

- **Capaian Kinerja**

Berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor B.200/DJPB.1/TU.140/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Capaian IKU "Persentase Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB"Triwulan IV Tahun 2025 (Revisi), disampaikan bahwa capaian IKU BPBL Lombok adalah 100% dari target 85%.

- **Perbandingan Capaian Kinerja (Tahun 2024 dan Satker)**

IKU ini pada Tahun 2025 capaiannya sama dengan Tahun 2024. Adapun tampilan singkat atas capaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 27. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker BPBL Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Tahun 2025			Realisasi	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 thd Tahun 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap	Renstra DJPB 2025-2029	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Triwulan IV Tahun 2024			Target Tahunan (%)	Target 2025	%Capaian terhadap target akhir renstra
85	100	117.65%	100	4.16	85	117.65%	85	117.65

Berikut dilampirkan juga nilai Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dibandingkan dengan Satker lainnya :

Tabel 28. Perbandingan Prosentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BPBL Lombok Dengan Satker DJPB Lain

No	Unit Kerja	Capaian IKU
1	Direktorat Ikan Air Laut	100,00%
2	Direktorat Rumput Laut	94,59%
3	Direktorat Ikan Air Tawar	93,75%
4	Direktorat Ikan Air Payau	100,00%
5	Direktorat Prasarana dan Sarana	98,28%
6	BBPBAP Jepara	100,00%
7	BBPBL Lampung	100,00%
8	BBPBAT Sukabumi	100,00%
9	BPBAP Situbondo	100,00%
10	BPBAP Takalar	100,00%
11	BPBAT Sungai Gelam	100,00%
12	BPBAT Mandiangin	100,00%
13	BPBL Batam	100,00%
14	BPBL Lombok	100,00%
15	BPBL Ambon	100,00%
16	BPBAP Ujung Batee	98,28%
17	BPBAT Tatelu	100,00%
18	BLUPPB Karawang	100,00%
19	BPIJUK Karangasem	100,00%
20	BPKIL Serang	100,00%

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran pada IKU ini

- **Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

Pada Tahun 2025 BPBL lombok mampu menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi itjen di aplikasi SIDAK karena telah dilakukan koordinasi antar pegawai untuk segera menindaklanjuti

dan mengunggah dokumen tersebut serta berkomunikasi intens dengan inspektorat jenderal apabila ada kendala dalam menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya**

Tidak ada permasalahan sehingga tidak ada yang harus ditindak lanjuti, penyusunan dokumen keuangan tetap dilakukan sesuai prosedur yang berlaku

- **Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya**

Penyusunan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker BPBL Lombok

Nilai IKPA adalah Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 8 (delapan) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Devisiasi RDP, Penyerapan anggaran, belanja kontraktual, Penyelesaian Tagihan, pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.

- **Capaian Kinerja**

Berdasarkan surat Ditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.201/DJPB.1/KU.520/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun Anggaran 2025, BPBL Lombok memperoleh nilai 96,46 dari Target sebesar 92.

- **Perbandingan Capaian Kinerja (Tahun 2024 dan Satker)**

IKU IKPA turun sebesar 1.28% dibandingkan dengan Tahun 2024, adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 29. Nilai IKPA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator :Nilai IKPA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Tahun 2025			Realisasi	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 thd Tahun 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap	Renstra DJPB 2025-2029	
Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV Tahun 2024			Target Tahunan (%)	Target 2025	%Capaian terhadap target akhir renstra
		(%)						
92	96.46	104.85%	97.71	-1.28	92	104.85%	92	104.85

Berikut dilampirkan juga nilai IKPA BPBL lombok dibandingkan dengan Satker UPT Laut lainnya :

Tabel 30. Nilai IKPA BPBL Lombok Dibandingkan Dengan Satker UPT Laut Lainnya

UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Prosentase
BPBL Lombok	92	96.46	104.85
BPBL Ambon	92	96.99	105.42
BPBL Batam	92	98.11	106.64
BBPBL Lampung	92	97.56	106.04

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran pada IKU ini

- **Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

nilai IKPA BPBL Lombok adalah 96,46% dimana capaian tersebut melebihi dari target 2025 yaitu sebesar 92% dikarenakan BPBL Lombok memperoleh nilai maksimal di revisi DIPA, Belanja kontraktual, dan capaian output sehingga secara keseluruhan kinerja anggaran telah berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, deviasi Hal III DIPA BPBL Lombok memperoleh nilai 81,48 dimana artinya masih menunjukkan ketidak sesuaian antara perencanaan dan realisasi kegiatan.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya**

Permasalahan pada Triwulan sebelumnya adalah adanya perubahan target capaian output dan revisi hal III DIPA sehingga Tindak lanjut pada Triwulan ini adalah merevisi hal III DIPA dan capaian output secara tepat waktu

- **Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya**

Rencana Aksi Triwulan selanjutnya adalah Meningkatkan kualitas perencanaan, khususnya pada penyusunan Halaman III DIPA agar lebih realistis dan selaras dengan kebutuhan kegiatan.

7) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker BPBL Lombok

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya yang perhitungannya diperoleh melalui aplikasi SMART DJA.

Pada aplikasi SMART DJA, pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

• Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, berdasarkan data dari aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id/> nilai BPBL Lombok adalah 97 dari target 71.50 berikut adalah tabel NK Perencanaan Anggaran pada aplikasi tersebut :

Tabel 31. Nilai Kinerja Perencana Anggaran BPBL Lombok

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	032.04.367763	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	97,00	100,00	100,00	80,00

• Perbandingan Capaian Kinerja (Tahun 2024 dan Satker)

IKU Nilai Kinerja Anggaran naik sebesar 12.48% dibandingkan dengan Tahun 2024, adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 32. NKA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator : NKA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Tahun 2025			Realisasi	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 thd Tahun 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap	Renstra DJPB 2025-2029	
Target	Realisasi	Capaian	Tahun 2024			Target Tahunan (%)	Target 2025	%Capaian terhadap target akhir renstra
		(%)						
71.5	97	135.66%	86.24	12.48	71.5	135.66%	81.5	119.02

Berikut dilampirkan juga nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPBL lombok dibandingkan dengan Satker UPT Laut lainnya :

Tabel 33. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPBL lombok dibandingkan dengan Satker UPT Laut lainnya

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	71.5	97	135.66
BPBL Ambon	71.5	91.84	128.45
BPBL Batam	71.5	96.56	135.05
BBPBL Lampung	71.5	94	131.47

- Realisasi Penggunaan Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran pada IKU ini

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah 97 dimana capaian tersebut melebihi target Tahun 2025 sebesar 71,5 dikarenakan BPBL Lombok memperoleh nilai maksimal pada Capaian Realisasi Output dan penggunaan SBK (Standar Biaya Keluaran). Namun demikian efisiensi ABK masih memperoleh nilai 80% yang menandakan bahwa meskipun penggunaan SBK sudah sesuai, masih terdapat potensi peningkatan efisiensi di dalam pemanfaatn anggaran.

- Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya**

Permasalahan pada Triwulan sebelumnya adalah nilai Realisasi Output yang belum maksimal dikarenakan adanya revisi anggaran. Tindak lanjut yang dilakukan pada trwiulan ini adalah

melaksanakan revisi Rincian Output setelah adanya revisi anggaran sehingga BPBL Lombok memperoleh nilai 100%.

- **Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya**

Meningkatkan nilai Capaian Realisasi Output sehingga capaian bisa 100%

8) IKU Indeks Pengelolaan SDM satker BPBL Lombok

IKU indeks Pengelolaan pegawai adalah proses pengelolaan pegawai mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi pegawai lingkup BPBL Lombok. Proses tersebut dibagi dalam 3 (tiga) rumpun, yaitu : (1) proses Mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CANS, pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengangkatan pertama dalam jabatan, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (2) proses ketatausahaan, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan atau sanksi, dan (3) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN. Indeks pengelolaan kepegawaian merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan pegawai, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam standar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Capaian Kinerja**

Berdasarkan surat Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.138/DJPB.1/KP.160/I/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Capaian IKU Indeks Pengelolaan SDM Aparatur, BPBL Lombok memperoleh nilai 6 dari Target sebesar 3.

- **Perbandingan Capaian Kinerja (Tahun 2024 dan Satker)**

IKU Indeks Pengelolaan Kepegawaian naik sebesar 100% dibandingkan dengan Tahun 2024, adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 34. Indeks Pengelolaan Kepegawaian BPBL Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator :Indeks Pengelolaan Kepegawaian								
Tahun 2025			Realisasi	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 thd Tahun 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap	Renstra DJPB 2025-2029	
Target	Realisasi	Capaian	Tahun 2024			Target Tahunan (%)	Target 2025	%Capaian terhadap target akhir renstra
		(%)						
3	6	200.00%	3	100	3	200.00%	3	200

Berikut dilampirkan juga nilai Indeks Pengelolaan Kepegawaian BPBL Lombok dibandingkan dengan Satker UPT Laut lainnya :

Tabel 35. nilai Indeks Pengelolaan Kepegawaian BPBL Lombok dibandingkan dengan Satker UPT Laut lainnya

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	3	6	200.00
BPBL Ambon	3	6	200.00
BPBL Batam	3	6	200.00
BBPBL Lampung	3	6	200.00

- Realisasi Penggunaan Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran pada IKU ini

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

Tahun 2025 nilai Indeks Pengelolaan Kepegawaian adalah 6 dimana capaian tersebut lebih tinggi daripada target Indeks Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2025 dikarenakan BPBL Lombok patuh dalam melengkapi administrasi dan proses kepegawaian.

- Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya**

Tidak ada permasalahan pada Triwulan sebelumnya dan kegiatan rutin seperti penyusunan kenaikan gaji berkala dilaksanakan secara tepat waktu.

- Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya**

Menyusun Surat Penugasan ASN untuk di awal Tahun 2026

9) IKU Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Lombok

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan good governance. Memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan serta sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Perhitungan nilai keterbukaan informasi publik dilakukan dengan memperhatikan indikator penilaian yaitu mengumumkan informasi publik, menyediakan dokumen informasi, sarana prasarana, kelembagaan dan digitalisasi. Selain presentasi uji publik, persentase penilaian terbesar dari instrument penilaian mandiri yang digunakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian dalam hal ini Biro Humas – Sekretariat Jenderal KKP atau Self-Assessment Questionnaire (SAQ).

• Capaian Kinerja

Berdasarkan Keputusan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PPID-KKP/XII/2025 tentang Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, BPBL Lombok memperoleh nilai sebesar 99,50 dari target 80.

• Perbandingan Capaian Kinerja (Tahun 2024 dan Satker)

IKU keterbukaan informasi publik tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2024 karena merupakan IKU baru, sedangkan jika dibandingkan dengan satker lainnya nilai BPBL Lombok lebih rendah daripada BPBL Ambon dan BBPBL Lampung, namun lebih tinggi daripada BPBL Batam. Adapun tampilan secara singkat atas perbandingan dengan UPT satker laut lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 36. Perbandingan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Lombok dengan UPT DJPB Lain

UPT	Target	Realisasi	Prosentase
BPBL Lombok	80	99.5	124.38
BPBL Ambon	80	100	125.00
BPBL Batam	80	96.32	120.40
BBPBL Lampung	80	100	125.00

• Realisasi Penggunaan Anggaran

Tidak ada alokasi anggaran pada IKU ini

- **Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

Tahun 2025 nilai keterbukaan informasi publik adalah 99,50 dimana capaian tersebut lebih tinggi daripada target Tahun 2025 yaitu 80 dikarenakan BPBL Lombok telah memenuhi hampir seluruh indikator penilaian keterbukaan informasi publik, meliputi ketersediaan informasi, kemudahan akses, ketepatan waktu penyampaian informasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun capaian nilai sangat tinggi, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Optimalisasi media publikasi, agar seluruh informasi yang disampaikan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata.
2. Potensi keterbatasan SDM pengelola informasi, terutama pada saat terjadi peningkatan permohonan informasi publik.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya**

Permasalahan pada Triwulan lalu adalah informasi publik di media digital yang tidak terlalu rutin dilaksanakan, sehingga tindak lanjut pada Triwulan ini adalah selalu memperbarui informasi publik yang akan diunggah di media digital minimal seminggu sekali atau ketika ada kegiatan yang dilaksanakan di Balai

- **Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya**

Rencana Aksi Triwulan berikutnya adalah Menyusun jadwal pemutakhiran informasi publik secara berkala dan Melakukan penguatan peran PPID dengan pembentukan tim PPID di Tahun 2026.

10) IKU Persentase Layanan Perkantoran Satker BPBL Lombok

IKU Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan dan layanan-layanan lainnya.

- **Capaian Kinerja**

Berdasarkan Memorandum Nomor 3/BPBL-L/TU.210/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal IKU Persentase Layanan Perkantoran BPBL Lombok memperoleh nilai 100% dari target 80%

- **Perbandingan Capaian Kinerja (Tahun 2024 dan Satker)**

Capaian IKU Layanan perkantoran Tahun 2025 sama dengan dengan Tahun 2024 yaitu 100%, dan jika dibandingkan dengan satker UPT Laut Lainnya, nilainya juga sama yaitu 100%.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran pada IKU ini

- **Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

Secara umum kegiatan pelayanan perkantoran telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku, sehingga mampu mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan teknis dan manajerial di lingkungan satuan kerja.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya**

Pada Triwulan sebelumnya tidak ada permasalahan namun BPBL Lombok rutin melakukan perawatan dan pemeliharaan prasarana kantor.

- **Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya**

Melakukan pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.

11) IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Satker BPBL Lombok

Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Pemerintah yang diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) merupakan salah satu indikator kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan pengadaan pada Satker BPBL Lombok. Pengumuman RUP di SIRUP menjadi wujud komitmen satker dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Capaian persentase RUP yang diumumkan mencerminkan tingkat keterpaduan antara perencanaan program, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan. Indikator ini berperan penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan pengadaan, kelancaran pencapaian output kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran. Oleh karena itu, pengelolaan dan evaluasi pengumuman RUP pada SIRUP menjadi bagian strategis dalam peningkatan kinerja pengadaan dan penguatan akuntabilitas kinerja Satker BPBL Lombok.

- **Capaian Kinerja**

Berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor 41/SJ.7/PL.410/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang

diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025, BPBL Lombok memperoleh nilai 100% dari target 76.

- **Perbandingan Capaian Kinerja (Tahun 2024 dan Satker)**

Capaian IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Tahun 2025 sama dengan dengan Tahun 2024 yaitu 100%, dan jika dibandingkan dengan satker UPT Laut Lainnya, nilainya juga sama yaitu 100%.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran pada IKU ini

- **Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

Berdasarkan hasil penilaian, pengumuman RUP PBJ pada SIRUP memperoleh capaian 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh paket pengadaan telah diumumkan secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai dengan dokumen perencanaan pengadaan. Capaian ini mencerminkan kepatuhan satuan kerja terhadap regulasi pengadaan serta komitmen dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya**

IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak ada Tindak lanjut dari Triwulan sebelumnya

- **Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya**

Melakukan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan secara terintegrasi, berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran satker.

12) IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker BPBL Lombok

Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

- **Capaian Kinerja**

Berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya Nomor B.210/DJPB.1/TU.140/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Capaian IKU “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Budi Daya”, BPBL Lombok memperoleh nilai 80.86 dari target 70.

- **Perbandingan Capaian Kinerja (Tahun 2024 dan Satker)**

IKU Nilai Pengawasan Kearsipan naik sebesar 8.04% dibandingkan dengan Tahun 2024, adapun tampilan secara singkat atas capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 37. Nilai Pengawasan Kearsipan BPBL Lombok

Nama SK :Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok								
Nama Indikator :Nilai Pengawasan Kearsipan BPBL Lombok								
Tahun 2025			Realisasi	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 thd Tahun 2024 (%)	Target 2025	Realisasi Terhadap	Renstra DJPB 2025-2029	
Target	Realisasi	Capaian	Tahun 2024			Target Tahunan (%)	Target 2025	%Capaian terhadap target akhir renstra
		(%)						
70	80.86	115.51%	75	8.04	70	115.51%	80	101.08

Berikut dilampirkan juga nilai Pengawasan Kearsipan BPBL lombok dibandingkan dengan Satker lainnya :

Tabel 38. nilai Pengawasan Kearsipan BPBL lombok dibandingkan dengan Satker lainnya

Data Capaian IKU “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Budi Daya”
Tahun 2025

No	Unit Kerja	Target (Nilai)	Capaian (Nilai)
1	Direktorat Ikan Air Laut	70	84.27
2	Direktorat Rumput Laut	80	73.52
3	Direktorat Ikan Air Tawar	70	79.18
4	Direktorat Ikan Air Payau	70	83.13
5	BBPBAP Jepara	80	99.33
6	BBPBL Lampung	80	96.86
7	BBPBAT Sukabumi	80	75.27
8	BPBAP Situbondo	70	88.50
9	BPBAP Takalar	80	95.95
10	BPBAT Jambi	70	81.12
11	BPBAT Mandiangin	70	86.16
12	BPBL Batam	70	90.72
13	BPBL Lombok	70	80.86
14	BPBL Ambon	70	61.05
15	BPBAP Ujung Batee	70	82.93
16	BPBAT Tatelu	70	76.38
17	BLUPPB Karawang	70	87.78
18	BPIUUK Karangasem	70	80.25
19	BPKIL Serang	80	98.13

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Tidak ada alokasi anggaran pada IKU ini

- **Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

Berdasarkan hasil penilaian, kegiatan pengawasan kearsipan memperoleh nilai 80,86, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan kearsipan telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar pengelolaan arsip dapat lebih tertib, sistematis, dan akuntabel.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan Sebelumnya**

Pada Triwulan sebelumnya direncanakan untuk mengembangkan sistem pengarsipan elektronik sederhana (e-filing) untuk memudahkan pencarian arsip kantor, dan pada Triwulan ini kegiatan tersebut mulai dilaksanakan

- **Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya**

Melakukan penataan dan pembenahan arsip secara menyeluruh, termasuk arsip aktif dan inaktif.

3.3 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dalam membiayai program peningkatan produksi perikanan budidaya laut mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 18.331.755 (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dan dari dana yang dialokasikan tersebut di Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp 18.220.985.288 atau 99.40 % dari pagu.

OM-SPAN

halohat

BALAI BUDIDAYA ...

T.A. 2023

Pagu dan Realisasi Belanja

EXCEL

PDF

FILTER

TIDAK ADA FILTER

CARI DI HALAMAN...

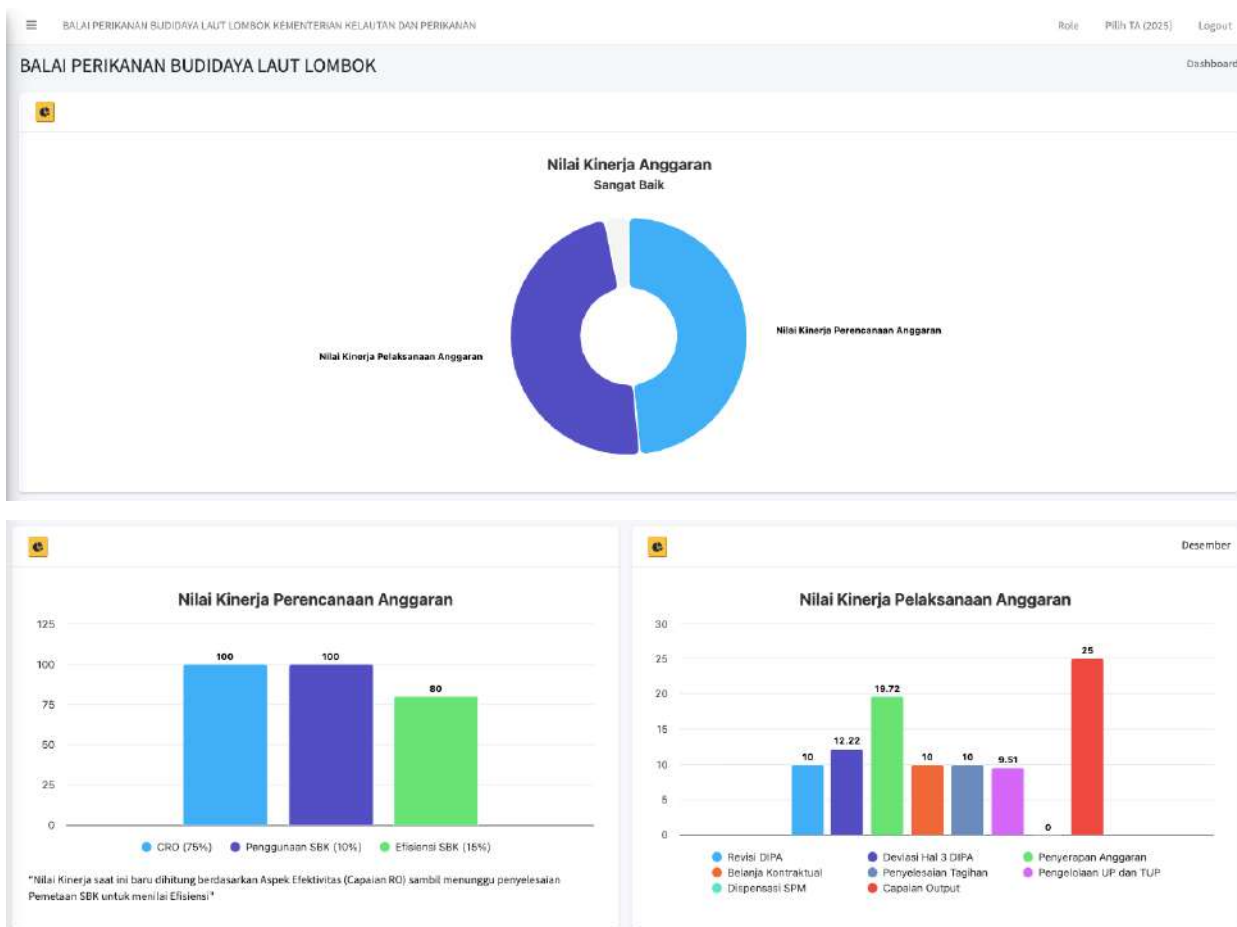
NO	BA-SATKER	NAMA SATKER	KPPN	KET	JENIS BELANJA										TOTAL
					PEGAJAWI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAIN-LAIN	TRANSFER		
1	032-567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	038	PAGU	8,648,347,000	9,683,408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,331,755,000
				REALISASI	8,541,955,804	9,679,029,484	0	0	0	0	0	0	0	0	18,220,985,288
				PERSENTASE	(98.77%)	(99.95%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(99.40%)
				SISA	106,391,196	4,378,516	0	0	0	0	0	0	0	0	110,769,712
			TOTAL	PAGU	8,648,347,000	9,683,408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,331,755,000
				REALISASI	8,541,955,804	9,679,029,484	0	0	0	0	0	0	0	0	18,220,985,288
				PERSENTASE	(98.77%)	(99.95%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(99.40%)
				SISA	106,391,196	4,378,516	0	0	0	0	0	0	0	0	110,769,712

Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)

Gambar 14. Screenshot Aplikasi OMSPAN

3.4 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Pada Tahun 2025 nilai efisiensi BPBL Lombok adalah 80.



Gambar 15. Screenshot Aplikasi SMART DJA

BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2025 sebagaimana diuraikan pada Bab I sampai dengan Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja BPBL Lombok Tahun 2025 secara umum menunjukkan capaian yang sangat baik, ditandai dengan terpenuhinya seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari total 18 IKU, seluruhnya mencapai target bahkan sebagian besar melampaui target yang ditetapkan.
2. Capaian kinerja organisasi berada pada kategori istimewa, dengan nilai capaian rata-rata IKU sebesar 112,00%. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan program, serta pengendalian kinerja yang dilaksanakan oleh BPBL Lombok.
3. Pada sasaran kegiatan teknis, yaitu bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar, ikan air laut, dan rumput laut, BPBL Lombok berhasil meningkatkan dukungan kepada masyarakat melalui penyaluran sarana prasarana, benih, dan bibit rumput laut serta produksi calon induk unggul, serta layanan laboratorium kesehatan ikan.
4. Pada sasaran kegiatan dukungan manajemen, kinerja tata kelola pemerintahan menunjukkan hasil yang sangat positif, antara lain melalui capaian Nilai PM SAKIP, Indeks Profesionalitas ASN, penyelesaian tindak lanjut LHP BPK, pengelolaan anggaran, keterbukaan informasi publik, serta pengawasan kearsipan yang seluruhnya memenuhi atau melampaui target.
5. Meskipun secara umum kinerja telah tercapai dengan baik, masih terdapat beberapa tantangan dan kendala, antara lain adanya penyesuaian target akibat efisiensi anggaran di akhir tahun serta keterbatasan sumber daya manusia dalam mendukung cakupan wilayah kerja yang luas.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja BPBL Lombok Tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada Tahun berikutnya, beberapa hal-hal yang perlu ditindaklanjuti adalah :

No	Permasalahan	Tindak Lanjut
1.	Adanya efisiensi anggaran di akhir tahun sehingga berdampak pada penyesuaian target di beberapa kegiatan.	Menyusun langkah antisipatif dan penyesuaian kegiatan secara proporsional
2.	Adanya beban kerja yang tidak seimbang pada SDM BPBL Lombok	Melakukan penyusunan Matriks Peran Hasil dengan seluruh pegawai terlibat di dalamnya untuk mengukur beban kerja dan peran serta seluruh pegawai di dalam organisasi

Demikian Laporan Kinerja (LKj) BPBL Lombok Tahun 2025 ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Wawan Cahyono Ashuri**

Jabatan : Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Perikanan
Budidaya Laut Lombok



Ditandatangani
Secara Elektronik

Wawan Cahyono Ashuri

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK 1	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1	Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (unit)	12
SK 2	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	2	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (ekor)	269.531
		3	Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional UPT BPBL Lombok (ekor)	948
		4	Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Lombok (Orang)	300
		5	Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Lombok (Sampel)	374
		6	Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Lombok (Sampel)	16
SK 3	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	7	Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (Unit)	26
		8	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (kg)	7129
SK 4	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	9	Nilai PM SAKIP Satker BPBL Lombok (nilai)	85
		10	Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBL Lombok (indeks)	81
		11	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Lombok (nilai)	76
		12	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBL Lombok (persen)	100
		13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan	85

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Lombok (persen)	
		14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker BPBL Lombok (Nilai)	92
		15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker BPBL Lombok (Nilai)	71,5
		16	Indeksi Pengelolaan SDM Satker BPBL Lombok (Indeks)	3
		17	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Lombok (Nilai)	≥80
		18	Persentase Layanan Perkantoran Satker BPBL Lombok	80
		19	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBL Lombok (Nilai)	70
		20	Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBL Lombok (persen)	65

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Perikanan
Budidaya Laut Lombok



Ditandatangani
Secara Elektronik

Wawan Cahyono Ashuri

Data Anggaran

NO.	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	1.929.030.000
2	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	2.332.340.000
3	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	2.580.000.000
4	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	11.555.906.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2025		18.397.276.000

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut
Lombok



Ditandatangani
Secara Elektronik

Wawan Cahyono Ashuri



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sarwono**

Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan
Budidaya Laut Lombok



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarwono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK 1	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1	Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (unit)	26
SK 2	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	2	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (ekor)	165.386
		3	Produksi Calon Induk Unggul Ikan Laut Satker BPBL Lombok (ekor)	948
		4	Sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Lombok (Sampel)	374
		5	Sampel monitoring penyakit ikan air laut dan AMR yang diuji Satker BPBL Lombok (Sampel)	16
SK 3	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	6	Jumlah Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok (kg)	1.623
SK 4	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	7	Nilai PM SAKIP Satker BPBL Lombok (nilai)	84
		8	Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBL Lombok (indeks)	81
		9	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Lombok (nilai)	76
		10	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBL Lombok (persen)	100
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Lombok (persen)	85
		12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker BPBL Lombok (Nilai)	92

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker BPBL Lombok (Nilai)	71,5
		14	Indeksi Pengelolaan SDM Satker BPBL Lombok (Indeks)	3
		15	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Lombok (Nilai)	≥80
		16	Persentase Layanan Perkantoran Satker BPBL Lombok	80
		17	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Satker BPBL Lombok (persen)	76
		18	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBL Lombok (Nilai)	70

Data Anggaran

NO.	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	145.590.000
2	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	1.407.469.000
3	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	5.322.889.000
4	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	11.455.807.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2025		18.331.755.000

Jakarta, 1 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut
Lombok



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarwono

LAMPIRAN 2

DIALOG KINERJA ORGANISASI



DIALOG KINERJA

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

TAHUN 2025

NOTULENSI RAPAT
PEMBAHASAN DIALOG KINERJA Tahun 2025

Hari/Tanggal : Senin /3 Maret 2025
Waktu : 08.00 WITA sampai dengan selesai
Tempat : Aula Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

1. Rapat dibuka oleh Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi, M.Si) dan diikuti oleh seluruh ASN, PJLP BPBL Lombok dengan mensosialisasikan Perjanjian Kinerja BPBL Lombok Tahun 2025 yang terdiri dari 20 IKU pada tahun 2025.
2. Tujuan dari dilakukannya dialog kinerja adalah untuk sosialisasi serta mengevaluasi dan memonitor kinerja organisasi dalam hal ini Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, membahas pencapaian target kinerja pada tahun sebelumnya, mengidentifikasi permasalahan serta mencari solusi dan menentukan rencana aksi tindak lanjut.
3. Pembahasan kinerja, terkait analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya di tahun 2025, mengidentifikasi isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi serta diskusi dan tanya jawab terkait kinerja dan penyusunan MPH BPBL Lombok.
4. Penyusunan rencana aksi terhadap IKU yang telah ditetapkan, penentuan target kinerja yang lebih spesifik dan terukur serta penentuan pihak yang bertanggung jawab dan tenggat waktu yang disepakati bersama antar stake holder. dilanjutkan dengan penjelasan Dialog Kinerja oleh Tim Kinerja tentang Pemanfaatan Dialog Kinerja Individu (DKI) yakni :
 - a. DKI dimanfaatkan untuk menyepakati rencana hasil kerja, target hasil kerja dan perilaku kerja yang tertuang pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
 - b. Pelaksanaan rencana kinerja, pemantauan dan pemberian umpan balik berkelanjutan serta pembinaan kinerja.
 - c. Pengembangan kompetensi pegawai. DKI dimanfaatkan untuk mengevaluasi pengembangan kompetensi pegawai yang telah dilaksanakan sebelumnya.
 - d. Rencana pengembangan karir pegawai

Ruang Lingkup dan pelaksanaan DKI

- a. Perencanaan SKP
Pada tahap ini terjadi dialog yang menghasilkan kesepakatan atas SKP dan rencana aksi yang akan dilakukan
- b. Pelaksanaan Rencana Kinerja

- Pegawai melaksanakan rencana-rencana aksi yang telah disepakati sebagai upaya pencapaian hasil kerja yang tertuang dalam SKP
- c. Pemantauan Kinerja
Pemantauan kinerja dilakukan terhadap proses dan realisasi atas hasil kerja (utama dan tambahan) dan perilaku kerja yang dilakukan setiap bulan atau secara incidental.
 - d. Umpan Balik berkelanjutan
Umpan balik berkelanjutan terhadap hasil kerja diberikan oleh atasan dan umpan balik terhadap perilaku kerja diberikan oleh atasan, peers dan bawahan. Umpan balik berkelanjutan dapat dilakukan secara incidental/terjadwal.
 - e. Pembinaan Kinerja
Pembinaan kinerja dapat dilakukan berdasarkan hasil umpan balik berkelanjutan atasan langsung atau berdasarkan inisiatif pegawai.
5. Tim Kinerja mensosialisasikan Cascading DJPB ke Level 2 dan Draft PK BPBL Lombok Tahun 2025. Pertemuan ini juga membahas Perjanjian Kinerja BPBL Lombok dan Butir kegiatan Matrik Peran Hasil (MPH) ASN dan PJLP serta SKP ASN BPBL Lombok

Lombok barat, 3 Maret 2025



Afni Isriani, S.Pi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

PO BOX I DSN. GILI GENTING, DS. SEKOTONG BARAT, KAB. LOMBOK BARAT
KODE POS 83365, NUSA TENGGARA BARAT
TELEPON: 0818 57 999 7, EMAIL: bpbl.lombok@gmail.com
LAMAN: www.kkp.go.id

Nomor : B.658/BPBL-L/TU.330/II/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Dialog Kinerja Tahun 2025

27 Februari 2025

Yth. Seluruh Pegawai BPBL Lombok (ASN, PJLP)
Di Tempat

Dalam rangka Pelaksanaan Dialog Kinerja Tahun 2025 lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, bersama ini kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/ 3 Maret 2025
Waktu : Pukul 08.00 WITA s/d selesai
Tempat : Aula BPBL Lombok
Agenda : Dialog Kinerja Tahun 2025

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok



Ditandatangani
Secara Elektronik

Wawan Cahyono Ashuri

Dokumentasi









KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

PO BOX 1 DSN. GILI GENTING, DS. SEKOTONG BARAT, KAB. LOMBOK BARAT

KODE POS 83365, NUSA TENGGARA BARAT

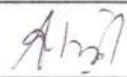
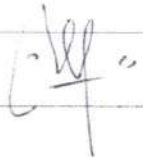
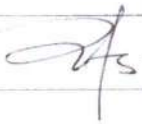
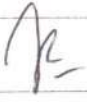
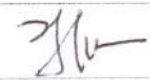
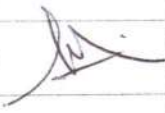
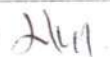
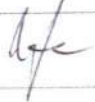
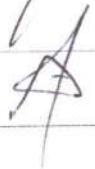
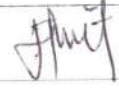
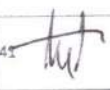
TELEPON: 0818 57 999 7, EMAIL: bpbl.lombok@gmail.com

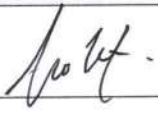
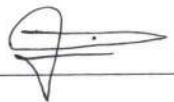
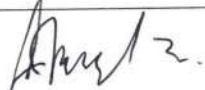
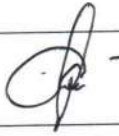
LAMAM: www.kkp.go.id

Nama Kegiatan : DIALOG KINERJA TAHUN 2025

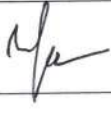
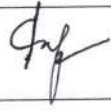
Hari/ Tanggal : Senin/ 3 Maret 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	WAWAN C ASHURI	Ka. Balai	1	
2	Apnsanto	Agams	2	
3	Zaenah	APIC	3	
4	Sunarty	Pengawas	4	
5	THE Hartani	Pegawar	5	
6	Wuluk W	PHPI	6	
7	RUSMINI	.	7	
8	Baia Shafah	Pengawas	8	
9	Imon n	pengawa	9	
10	Juko S	PHPI	10	
11	Wilson	PPI	11	
12	Bangun	Pengawas	12	
13	Riky R	PHPI	13	
14	Danvar Hakan	PHPI	14	
15	Owi Serawan	Poluesur	15	
16	Ni Nyoman Tri Harayandhi	Perekayasa	16	
17	Nini Eka Indrayani	Perekayasa	17	
18	Afni Isriani	Pengawas	18	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
19	WORO K.P	Analisis PB	19	
20	Desy	Analisis BMA	20	
21	Renni K.	Pengelola Kepegawaian	21	
22	Mustapa	PK APBN Penyelia	22	
23	Brue	Peng. Keuangan	23	
24	Hurtacandis	Pengawas	24	
25	Nadia F	Pengusun LK	25	
26	Muhammad Rizal	Pengawas	26	
27	Moh. Budianto	PHPI	27	
28	MUHAMMAD HIDAYAT	Pengawas	28	
29	ANDRY @	"	29	
30	JUMADIL		30	
31	WIRATMAN.		31	
32	Iryun bing		32	
33	Sulastri		33	
34	Ade Yana		34	
35	Marwi		35	
36	Niken N.		36	
37	Uka Yulastika		37	
38	Alumiatun		38	
39	Reman		39	
40	Abu Abas		40	
41	LI BULH		41	

No	Nama	Tanda tangan	
1	M. Irdian	1 	
2	SUTANDI		2 
3	abdel HESIM	3 	
4	ALMAN		4 
5	Badrun	5 	
6	Sutardi		6 
7	MANSYUR	7 	
8	Marai		8 
9	Mustafa	9 	
10	Wahyudin Azhar		10 
11	Lau Bahudin	11 	
12	KUSNADI		12 
13	Sapdi	13 	
14	Marisoh		14 
15	Bawardi	15 	
16	Jumadil		16 

17	Amisah	17	Am	
18	Supriadi		18	Sp
19	Kumayadi	19	df.	
20	farzul fahmi		20	Ranj
21	USWAN H.	21	Hg.	
22	hpu peng		22	df
23	WIKMAN	23	ds	
24	UWL		24	h
25	Herman Pelani	25	Sub	
26	Ifan Jayadi		26	df
27	Lalu Dedi Kusmayadi	27	Sub	
28	Lalu Saepul Hadi		28	ul
29	MUHAMAD AHMADY	29	Si	
30	WIKMAN Jayadi		30	df
31	Mursadin	31	Su	
32	Pranik		32	Sub
33	Sabardi	33	h	
34	Schnan		34	Sub
35	Uhl Azni	35	h	

No	Nama	Tanda tangan	
36	Raodah	36 	
37	Muhardi		37 
38	Anwar	38 	
39	MUNAWIR HARIS		39 
40	Ahmad Zaini	40 	
41	Burhanudin		41 
42	Alfian	42 	
43	Herlan		43 
44	Bagu P	44 	
45	NI MADE WIDYA		45 
46	Seme	46 	
47	Rusman		47 
48	Suherlan Ahmad. S	48 	
49	Zainuddin		49 
50	m. Immanuel	50 	
51			51

LAMPIRAN 3

DATA DUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA

**1. Sarana Budi Daya
Ikan Air Tawar yang
disalurkan ke
masyarakat Satker
BPBL Lombok**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

PO BOX 1 DSN. GILI GENTING, DS. SEKOTONG BARAT, KAB. LOMBOK BARAT
KODE POS 83365, NUSA TENGGARA BARAT TELEPON: 0818 57 999 7
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bpbl.lombok@kkp.go.id

Nomor : B.44/BPBL-L/PB.410/I/2026 11 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Realisasi bantuan sarana budidaya ikan air tawar Tahun 2025

Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Di Jakarta

Berikut terlampir kami sampaikan realisasi dan dokumentasi bantuan sarana budidaya ikan air tawar Tahun 2025 Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarwono

Lampiran Surat Dinas**Nomor Surat : B.44/BPBL-L/PB.410/I/2026****Tanggal : 11 Januari 2026****Realisasi bantuan sarana budidaya ikan air tawar Tahun 2025
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok**

Uraian	Target Tahunan	Realisasi	%
Bantuan Sarana budidaya ikan air tawar	26	26	100

No	Jenis Bantuan	Komoditas	Nama Kelompok	Kab/Kota	Provinsi	Tanggal BAST	SK Penerima	Tanggal Distribusi
1	Bansapras Bioflok	Lele	Pokdakan Mina Leguni Mandiri	Magetan	Jawa Timur	12 September 2025	B.1328/BPBL-L/PB.340/VII/2025	12 September 2025
2	Bansapras Bioflok	Lele	Pokdakan Nekmese	Timor Tengah Selatan (TTS)	Nusa Tenggara Timur	15 September 2025	B.1233/BPBL-L/PB.340/VII/2025	15 September 2025
3	Bansapras Bioflok	Nila	Pokdakan Mina Tani Lestari	Tabanan	Bali	22 September 2025	B.1399/BPBL-L/PB.340/VII/2025	22 September 2025
4	Bansapras Bioflok	Lele	Pokdakan Inovasi Sejahtera	Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	28 Oktober 2025	B.1557/BPBL-L/PB.340/VIII/2025	28 Oktober 2025
5	Bansapras Bioflok	Lele	Bintang Terang	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	29 November 2025	B.1937/BPBL-L/PB.340/X/2025	29 November 2025
6	Bansapras Bioflok	Lele	Pemuda Patas	Ngada	Nusa Tenggara Timur	29 November 2025	B.1936/BPBL-L/PB.340/X/2025	29 November 2025

7	Bansapras Bioflok	Lele	Melu Mizo	Ngada	Nusa Tenggara Timur	29 November 2025	B.1936/BPBL-L/PB.340/X/2025	29 November 2025
8	Bansapras Bioflok	Lele	Taruna Kiak	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	19 Desember 2025	B.2211/BPBL-L/PB.340/XI/2025	19 November 2025
9	Bansapras Bioflok	Lele	Tirta Samudra	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	19 Desember 2025	B.2211/BPBL-L/PB.340/XI/2026	19 November 2025
10	Bansapras Bioflok	Lele	Keban Iwes	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	19 Desember 2025	B.2211/BPBL-L/PB.340/XI/2027	19 November 2025
11	Bansapras Bioflok	Lele	Brang Katelas	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	19 Desember 2025	B.2211/BPBL-L/PB.340/XI/2028	19 November 2025
12	Bansapras Bioflok	Lele	Mina Sari Kencana	Tabanan	Bali	19 Desember 2025	B.2209/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
13	Bansapras Bioflok	Lele	Pangkung Bacang	Tabanan	Bali	19 Desember 2025	B.2209/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
14	Bansapras Bioflok	Lele	Mina Yukti	Tabanan	Bali	19 Desember 2025	B.2209/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
15	Bansapras Bioflok	Lele	Narabe Manik Gangga	Tabanan	Bali	19 Desember 2025	B.2209/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
16	Bansapras Bioflok	Nila	Yayasan Ibadurrohman	Tasikmalaya	Jawa Barat	30 Desember 2025	B.2212/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
17	Bansapras Bioflok	Lele	Kunti Tentram	Ponorogo	Jawa Timur	30 Desember 2025	B.2212/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
18	Bansapras Bioflok	Lele	Emak-Emak Sehat Berdaya	Trenggalek	Jawa Timur	30 Desember 2025	B.2212/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
19	Bansapras Bioflok	Lele	Yayasan Asy Syafa'ah Karangjati	Ngawi	Jawa Timur	30 Desember 2025	B.2212/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
20	Bansapras Bioflok	Lele	Dalong Jaya	Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	30 Desember 2025	B.2208/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
21	Bansapras Bioflok	Lele	Nore Gore	Ngada	Nusa Tenggara Timur	30 Desember 2025	B.2208/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
22	Bansapras Bioflok	Lele	Mbola Bombang	Ngada	Nusa Tenggara	30 Desember 2025	B.2208/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025

					Timur			
23	Bansapras Bioflok	Lele	Adikara	Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	31 Desember 2025	B.2210/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
24	Bansapras Bioflok	Lele	Mandiri Kesetnana	Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	31 Desember 2025	B.2210/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
25	Bansapras Bioflok	Lele	Elshaday	Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	31 Desember 2025	B.2210/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025
26	Bansapras Bioflok	Lele	Pemancar	Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	31 Desember 2025	B.2210/BPBL-L/PB.140/XI/2025	19 November 2025

DOKUMENTASI



2. Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Lombok



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

PO BOX 1 DSN. GILI GENTING, DS. SEKOTONG BARAT, KAB. LOMBOK BARAT
KODE POS 83365, NUSA TENGGARA BARAT TELEPON: 0818 57 999 7
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpbl.lombok@kkp.go.id

Nomor : B.41/BPBL-L/PB.140/I/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Realisasi Bantuan Benih Tahun 2025

11 Januari 2026

Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Di Jakarta

Berikut terlampir kami sampaikan realisasi dan dokumentasi bantuan benih Tahun
2025 Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarwono

**Realisasi Bantuan Benih Tahun 2025
 Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok**

Uraian	Target Tahunan	Realisasi	%
Bantuan benih	165.386	213.900	129.33

No	Komoditas	Jumlah	Lokasi Penerima
1.	Abalone	6.500	Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Barat
2.	Bawal Bintang	88.400	Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Barat
3.	Kakap Putih	47.000	Kab. Lombok Barat
4.	Tiram Mutiara	70.000	Kab. Dompu, Kab Sumbawa
5.	Ikan Hias	2.000	Kab. Lombok Barat
TOTAL		213.900	

DOKUMENTASI



3. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Laut Satker BPBL Lombok



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

PO BOX I DSN. GILI GENTING, DS. SEKOTONG BARAT, KAB. LOMBOK BARAT
KODE POS 83365, NUSA TENGGARA BARAT TELEPON: 0818 57 999 7
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bpbl.lombok@kkp.go.id

Nomor : B.46/BPBL-L/PB.140/I/2026 11 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Hal : Realisasi Produksi Calon Induk Tahun 2025

Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Di Jakarta

Berikut terlampir kami sampaikan realisasi dan dokumentasi Produksi Calon Induk Tahun 2025 Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarwono

Lampiran Surat Dinas**Nomor Surat : B.46/BPBL-L/PB.140/I/2026****Tanggal : 11 Januari 2026****Realisasi Produksi Calon Induk Tahun 2025
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok**

Uraian	Target Tahunan	Realisasi	%
Produksi Calon Induk	948	1.155	121.83

Komoditas	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Realisasi
Abalone						50					50		100
Ikan Hias									10		33		43
Tiram Mutiara												224	224
Bawal Bintang									500				500
Kakap Putih									100				100
Lobster							188						188
TOTAL REALISASI	-	-	-	-	-	50	188	-	610	-	83	224	1,155

DOKUMENTASI



**4. Sampel ikan air laut
yang diuji dalam
rangka pelayanan
laboratorium
kesehatan ikan dan
lingkungan Satker
BPBL Lombok**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

PO BOX I DSN. GILI GENTING, DS. SEKOTONG BARAT, KAB. LOMBOK BARAT
KODE POS 83365, NUSA TENGGARA BARAT TELEPON: 0818 57 999 7
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpbl.lombok@kkp.go.id

Nomor : B.45/BPBL-L/PB.410/I/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Realisasi Sampel Ikan Air Laut Tahun 2025

11 Januari 2026

Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Di Jakarta

Berikut terlampir kami sampaikan realisasi dan dokumentasi realisasi sampel ikan air laut Tahun 2025 Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok



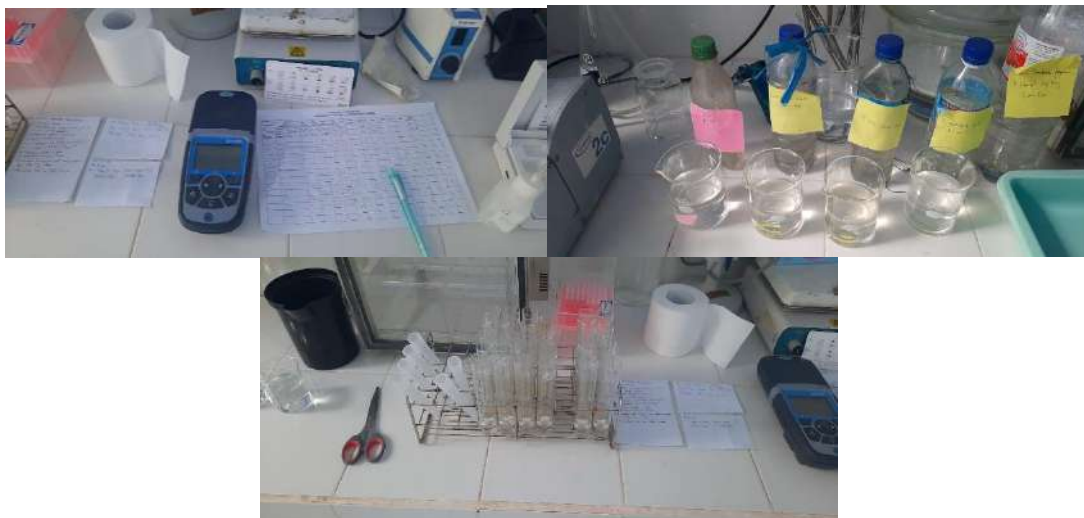
Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarwono

Lampiran Surat Dinas**Nomor Surat : B.45/BPBL-L/PB.410/I/2026****Tanggal : 11 Januari 2026****Realisasi Sampel Ikan Air Laut Tahun 2025****Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok**

Uraian	Target Tahunan	Realisasi	%
Sampel Ikan Air Laut	374	3825	1022.72

No	Bulan	Ruang Lingkup				Jumlah	Kumulatif
		Kualitas Air	Patologi	Mikrobiologi	Biologi Molekuler		
1	Januari	285	8	1	17	311	311
2	Februari	220	0	35	37	292	603
3	Maret	98	18	14	42	172	775
4	April	393	4	0	39	436	1211
5	Mei	194	5	0	48	247	1458
6	Juni	186	0	1	9	196	1654
7	Juli	443	1	7	26	477	2131
8	Agustus	179	0	2	22	203	2334
9	September	289	11	16	43	359	2693
10	Oktober	543	7	0	56	606	3299
11	November	298	1	0	17	316	3615
12	Desember	194	6	0	10	210	3825

DOKUMENTASI

5. Sampel monitoring penyakit ikan air laut dan AMR yang diuji Satker BPBL Lombok



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

PO BOX 1 DSN. GILI GENTING, DS. SEKOTONG BARAT, KAB. LOMBOK BARAT
KODE POS 83365, NUSA TENGGARA BARAT TELEPON: 0818 57 999 7
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bpbl.lombok@kkp.go.id

Nomor : B.47/BPBL-L/PB.230/I/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Realisasi Sampel AMR Tahun 2025

11 Januari 2026

Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Di Jakarta

Berikut terlampir kami sampaikan realisasi dan dokumentasi sampel AMR Tahun 2025 Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarwono

Lampiran Surat Dinas

Nomor Surat : B.47/BPBL-L/PB.230/I/2026

Tanggal : 11 Januari 2026

Realisasi Sampel AMR Tahun 2025 Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Uraian	Target Tahunan	Realisasi	%
Sampel AMR	16	17	106.25

No	Bulan	Capaian AMR	Jumlah	Kumulatif
1	Januari	0	0	0
2	Februari	0	0	0
3	Maret	0	0	0
4	April	0	0	0
5	Mei	8	8	8
6	Juni	0	0	8
7	Juli	1	1	9
8	Agustus	7	7	16
9	September	1	1	17
10	Oktober	0	0	17
11	November	0	0	17
12	Desember	0	0	17

DOKUMENTASI



**6. Jumlah Bibit
Rumput Laut Kultur
Jaringan yang
disalurkan ke
masyarakat Satker
BPBL Lombok**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

PO BOX 1 DSN. GILI GENTING, DS. SEKOTONG BARAT, KAB. LOMBOK BARAT
KODE POS 83365, NUSA TENGGARA BARAT TELEPON: 0818 57 999 7
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bpbl.lombok@kkp.go.id

Nomor : B.42/BPBL-L/PB.140/I/2026 11 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Realisasi bantuan bibit RL kuljar yang disalurkan ke masyarakat Tahun 2025

Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
Di Jakarta

Berikut terlampir kami sampaikan realisasi dan dokumentasi bantuan bibit Rumput Laut Kuktur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Tahun 2025 Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sarwono

Lampiran Surat Dinas
 Nomor Surat : B.42/BPBL-L/PB.140/I/2026
 Tanggal : 11 Januari 2026

Realisasi Bantuan Bibit RL Kultur Jaringan Tahun 2025
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Uraian	Target Tahunan	Realisasi	%
Bantuan Bibit RL	1623	2760	170.05

No	Jenis Bantuan	Komoditas	Jumlah	Satuan	Nama Kelompok	Kab/Kota	Provinsi	Nomor BAST	Tanggal BAST	Tanggal Distribusi
TOTAL			2,760	Kg						
1	Bibit Rumput Laut	E.cottonii	1,000	Kg	Pasir Putih	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	B.409/BPBL-L/PB.140/II/2025	25 Februari 2025	24 Februari 2025
2	Bibit Rumput Laut	E.cottonii	1,000	Kg	Susah Berangen	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	B.410/BPBL-L/PB.140/II/2025	25 Februari 2025	24 Februari 2025
3	Bibit Rumput Laut	Sakul	300	Kg	Iarang Lodong	Alor	Nusa Tenggara Timur	B.1600/BPBL-L/PB.140/VIII/2025	27 Agustus 2025	27 Agustus 2025
4	Bibit Rumput Laut	Sakul	300	Kg	Pesona Tanjung	Lembata	Nusa Tenggara Timur	B.1601/BPBL-L/PB.140/VIII/2025	27 Agustus 2025	27 Agustus 2025
5	Bibit Rumput Laut	Cottonii Kuljar	160	Kg	Pokdakan Ujung Baru Indah	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	B.1787/BPBL-L/PB.140/IX/2025	22 September 2025	22 September 2025

DOKUMENTASI



7. Nilai PM SAKIP Satker BPBL Lombok



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.4387/DJPB.1/TU.210/VII/2025 17 Juli 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat
Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025

Yth.

1. Direktur Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya
2. Kelapa UPT Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya
di Tempat

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja organisasi aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya telah melakukan Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bersama tim dari Inspektorat Jenderal III pada tanggal 7 – 11 Juli 2025. Adapun Penilaian Mandiri SAKIP telah dilaksanakan di Bogor terdiri dari beberapa tahapan antara lain (a) pengantar pelaksanaan pendampingan SAKIP, (b) *Profilling* dokumen SAKIP pada www.esr.menpan.go.id, (c) *kick off* penilaian mandiri SAKIP, (d) penyusunan rekomendasi, (e) pendampingan tindak lanjut, dan (f) penyampaian hasil.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hasil Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2025 Ditjen Perikanan Budi Daya di Bogor sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil *profiling* dokumen SAKIP pada www.esr.menpan.go.id, seluruh dokumen kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya telah diupload pada menu dokumen kinerja yakni Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Kinerja, DIPA, Pohon Kinerja, Tindak Lanjut LHE AKIP, Laporan Monev Rencana Aksi, Pedoman Teknis Perencanaan, Pedoman Teknis Pengukuran dan dokumen lainnya.
2. Tahapan *kick off* penilaian mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, telah dilakukan verifikasi awal hasil penilaian mandiri menggunakan LKE *online* di Kinerjaku yang meliputi aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

3. Hasil *kick off* penilaian mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2025 sebagaimana terlampir.
4. Jika dibandingkan dengan nilai hasil penilaian mandiri SAKIP tahun 2024, terjadi peningkatan nilai rata-rata Satuan Kerja Pusat dan UPT sebesar 2,43 dengan rincian yakni pada aspek perencanaan (naik 1,4), aspek pengukuran kinerja (naik 0,4 poin), aspek pelaporan (naik 0,1 poin) dan aspek evaluasi internal (naik 0,6 poin). Dari hasil sementara tersebut, nilai rata-rata PM SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2025 telah melebihi dari target pada perjanjian kinerja (target 84).
5. Hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya telah memenuhi standar yang baik, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, dan telah ada *crosscutting* dengan bidang lain. Beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti antara lain :

- 1) Format dokumen perencanaan yang sudah menyesuaikan dengan format yang telah ditetapkan pada Permen KP Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP.
- 2) Sebelumnya terdapat beberapa dokumen belum memunculkan tanggal penetapan, hasil penilaian mandiri saat ini sudah dimunculkan untuk melihat kesesuaian penetapan dengan batas waktu pada PermenKP 35 Tahun 2023
- 3) Terdapat perbedaan antara indikator kinerja utama antara dokumen perjanjian kinerja dan rencana strategis, indikator kinerja selalu berubah setiap tahun namun saat ini sudah terdapat justifikasi perubahannya
- 4) Matrik peran hasil yang disusun saat ini sudah sepenuhnya menggambarkan penjenjangan kinerja, satker tersebut.

- b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja telah menjadi perhatian dan kebutuhan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan dilakukan secara berkelanjutan, pengukuran juga telah dijadikan sebagai dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja. Selain itu pimpinan unit kerja terlibat aktif pada seluruh pengukuran kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

c. Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2024 telah disusun sesuai standar dan menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja, informasi tindaklanjut rekomendasi pada periode sebelumnya, serta LKj telah disampaikan tepat waktu kepada atasan. Selain itu, telah dilakukan upaya dalam rangka peningkatan kualitas laporan kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya melalui revidi laporan kinerja oleh Tim Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya. Beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti antara lain :

- 1) Rekomendasi dan tindaklanjut atas keberhasilan/kegagalan periode sebelumnya (triwulanan/tahunan) perlu disusun dalam bentuk rekapitulasi
- 2) Penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja perlu ditunjukkan dalam dokumen renaksi dan evaluasi renaksi sehingga ada pemanfaatan informasi dalam LKj yang telah disusun.

d. Evaluasi Internal

Satker Pusat dan UPT Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai pedoman evaluasi di lingkup DJPB oleh SDM yang memadai dengan memanfaatkan sistem informasi pada Kinerjaku. Seluruh rekomendasi dari evaluasi telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga telah terdapat peningkatan hasil evaluasi di internal. Uraian lengkap hasil evaluasi disajikan pada Lembar Kerja Evaluasi SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada aplikasi kinerjaku.

6. Dalam rangka meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, direkomendasikan untuk mengambil langkah-langkah peningkatan kualitas nilai SAKIP sebagai berikut:

- a. Memperbaiki dokumen manual indikator dan rencana aksi sesuai format Permen KP Nomor 35 Tahun 2023 bagi satker yang belum menyusun Manual indikator sesuai format Permen KP Nomor 35 Tahun 2023
- b. Melengkapi justifikasi perubahan indikator kinerja dan penurunan target dalam periode rencana strategis
- c. Mendokumentasikan dengan baik setiap hasil pengukuran dan pelaporan yang dapat mempengaruhi perubahan dokumen perencanaan seperti perubahan strategi aktivitas dan anggaran pada tahun 2025.

- d. Meningkatkan kualitas narasi pada laporan kinerja terutama dalam pengungkapan faktor keberhasilan dan kegagalan serta dukungan program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja di tahun 2025.
 - e. Bukti dokumen tindak lanjut rekomendasi perlu disampaikan guna meningkatkan capaian IKU yang belum tercapai pada triwulan sebelumnya.
 - f. Menjamin seluruh rencana kerja dan anggaran Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dapat berjalan *on the track* dengan memanfaatkan hasil evaluasi internal sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja di tahun berikutnya.
7. Pengelola kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya agar terus berkoordinasi dengan tim Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya dan Inspektorat mitra dalam melakukan perbaikan-perbaikan guna tindak lanjut pendampingan SAKIP yang telah dilakukan dan kedepannya akan di tindak lanjuti perbaikan yang telah dilakukan oleh Satker Pusat dan UPT Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan Tim SAKIP DJPB guna memperbaiki nilai yang akan lebih baik lagi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dirjen Perikanan Budi Daya
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
- 2. Inspektorat III, Inspektorat Jenderal KKP

Lampiran Surat Dinas
 Nomor : B.4387/DJPB.1/TU.210/VII/2025
 Tanggal : 17 Juli 2025

Nilai Akuntabilitas Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	2025					
		PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	25,20	24,00	13,50	22,50	85,20	A
2	DIREKTORAT IKAN AIR LAUT	25,20	24,00	12,75	22,50	84,45	A
3	DIREKTORAT RUMPUT LAUT	25,20	24,00	13,50	22,50	85,20	A
4	DIREKTORAT IKAN AIR TAWAR	25,20	24,00	13,05	22,50	84,75	A
5	DIREKTORAT IKAN AIR PAYAU	25,20	23,10	12,75	22,50	83,55	A
6	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	25,20	24,00	13,50	22,50	85,20	A
7	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	24,00	24,00	13,50	22,50	84,00	A
8	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	25,20	24,00	13,50	22,50	85,20	A
9	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	25,20	26,10	13,80	20,50	85,60	A
10	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	25,20	24,00	13,50	22,50	85,20	A
11	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR JAMBI	25,20	24,00	13,50	22,50	85,20	A
12	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	25,20	24,00	13,50	22,50	85,20	A
13	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	25,20	24,60	12,30	22,50	84,60	A
14	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	24,00	24,00	13,50	22,50	84,00	A
15	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	25,50	24,00	13,50	20,50	83,50	A
16	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	25,20	24,00	13,50	22,50	85,20	A
17	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	25,20	26,10	13,80	20,50	85,60	A
18	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA, KARAWANG	27,00	27,00	12,00	22,50	88,50	A
19	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM, BALI	25,20	25,20	13,50	22,50	86,40	A
20	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN, SERANG	24,00	24,00	13,50	22,50	84,00	A

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
 Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Tinggal Hermawan

8. Indeks

Profesionalitas ASN

Satker

BPBL

Lombok



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.209/DJPB.1/KP.160/I/2026
Sifat : -
Lampiran : Satu berkas
Hal : Capaian IKU IP-ASN Tahun 2025
Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya

12 Januari 2026

Yth. Daftar Terlampir

Sehubungan dengan nota dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi nomor 8/SJ.3/TU.210/I/2026, tanggal 4 Januari 2026 hal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV/Semester II Tahun 2025 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian IP ASN lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya per tanggal 8 Januari 2024 dari hasil pengukuran Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada *dashboard* IP ASN yang berbasis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP yaitu **84,37 (kategori tinggi)**, yang terdiri dari **Kualifikasi 22,18; Kompetensi 31,52; Kinerja 25,68; dan Disiplin 5,00**. Adapun data capaian dapat dilihat pada *dashboard* di link <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/unker/515>, atau telah kami rangkum sebagaimana pada lampiran 2.
2. Target Pengukuran IP ASN lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada Tahun 2025 adalah 81. Capaian Pengukuran IP ASN lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada Tahun 2025 adalah **84,37**. Dengan Demikian Capaian IP ASN pada tahun 2024 adalah **104,16%** dari target yang telah ditetapkan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya.
2. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi.

Lampiran

Nomor : B.209/DJPB.1/KP.160/I/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT PENERIMA SURAT

1. Direktur Ikan Air Tawar
2. Direktur Ikan Air Payau
3. Direktur Ikan Air Laut
4. Direktur Rumput Laut
5. Direktur Prasarana dan Sarana
6. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
7. Plt. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
8. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
9. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
10. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
11. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
12. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
13. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam, Jambi
14. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
15. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
16. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
17. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
18. Kepala Balai Layanan Produksi dan Usaha Budidaya Karawang
19. Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem
20. Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
21. Ketua Tim Kerja Program dan Kerja Sama

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan

Lampiran

Nomor : B.209/DJPB.1/KP.160/I/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

**REKAPITULASI NILAI INDEKS PROFESIONALITAS ASN
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total	Kategori
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin		
1.	Sekretariat DJPB	22,12	26,23	25,30	5,00	78,66	Sedang
2.	Dit Ikan Air Tawar	23,51	26,06	25,95	5,00	80,52	Sedang
3.	Dit Ikan Air Payau	22,57	28,01	25,71	5,00	81,29	Tinggi
4.	Dit Ikan Air Laut	23,19	27,35	25,69	5,00	81,24	Tinggi
5.	Dit Rumput Laut	23,09	29,43	25,75	5,00	83,26	Tinggi
6.	Dit Prasarana dan Sarana	22,34	30,55	25,16	5,00	83,05	Tinggi
7.	BBPBAP Jepara	22,78	30,22	25,31	5,00	83,30	Tinggi
8.	BPBAT Sukabumi	21,98	32,57	25,47	5,00	85,01	Tinggi
9.	BBPBL Lampung	22,11	34,27	27,89	5,00	89,27	Tinggi
10.	BPBAP Situbondo	22,20	30,12	25,49	5,00	82,80	Tinggi
11.	BPBAP Takalar	21,74	34,36	26,14	5,00	87,24	Tinggi
12.	BPBAP Ujung Batee	22,29	32,43	25,85	5,00	85,64	Tinggi
13.	BPBAT Mandiangin	21,86	32,65	25,00	5,00	84,52	Tinggi
14.	BPBAT Sei Gelam, Jambi	22,19	34,84	25,16	5,00	87,19	Tinggi
15.	BPBAT Tatelu	22,31	33,30	25,58	5,00	86,18	Tinggi
16.	BPBL Ambon	22,36	32,43	25,85	5,00	85,64	Tinggi
17.	BPBL Batam	21,67	34,38	26,57	5,00	87,62	Tinggi
18.	BPBL Lombok	21,55	30,09	25,00	5,00	81,63	Tinggi
19.	BLUPPB Karawang	21,00	35,71	26,18	5,00	87,90	Tinggi
20.	BPIUUK Karangasem	22,26	31,57	25,00	5,00	83,83	Tinggi
21.	BPKIL Serang	22,12	31,88	25,00	5,00	84,00	Tinggi
Rata-Rata		22,18	31,52	25,68	5,00	84,37	Tinggi

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan

**9. Nilai minimal yang
dipersyaratkan untuk
pembangunan unit kerja
berpredikat menuju
wilayah bebas korupsi
Satker BPBL Lombok**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336
LAMAM www.kkp.go.id

Nomor : B. 526/ITJ.5/KP.730/XII/2022 30 Desember 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan KKP
Tahun 2022

Yth.

1. Sekretaris Jenderal KKP;
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
3. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya;
4. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
5. Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
6. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 42/SJ Tahun 2022, tanggal 5 April 2022, Inspektorat V selaku Tim Penilai Internal (TPI) KKP telah melakukan penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkup KKP pada tahun 2022 terhadap 23 unit kerja yang diusulkan oleh masing-masing TPI Unit Eselon I. Penilaian dilakukan melalui tiga tahap yaitu desk evaluasi, penilaian lapangan dan sidang pleno.

Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hasil penilaian, sebagai berikut:

1. **Penilaian pada tahap Desk Evaluasi**, dilakukan secara daring melalui aplikasi e-ZI pada bulan Agustus 2022 dan hasilnya terdapat empat unit kerja yang gugur/tidak memenuhi syarat untuk berlanjut ke penilaian lapangan, yaitu:

No.	Unit Kerja	Nilai	Keterangan
1.	PPS Belawan	63,79	a. Total nilai Komponen Pengungkit dan Hasil sebesar 63,79 kurang dari syarat minimal 75,00 dan nilai Komponen Pengungkit sebesar 25,04 kurang dari syarat minimal 36,00. b. Komponen Pengungkit kurang dari syarat ambang batas minimal 60,00% yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Pengawasan.
2.	BRBIH Depok	75,30	Komponen Pengungkit kurang dari syarat ambang batas minimal 60,00%, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, dan Penguatan Pengawasan.
3.	Stasiun KIPM Medan II	76,72	Komponen Pengungkit kurang dari syarat ambang batas minimal 60,00% yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

No.	Unit Kerja	Nilai	Keterangan
4.	Stasiun KIPM Pangkalpinang	76,86	Komponen Pengungkit kurang dari syarat ambang batas minimal 60,00%, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, dan Penguatan Pengawasan.

2. **Penilaian Lapangan**, dilakukan pada bulan September s.d. Oktober 2022 terhadap 19 unit kerja yang lulus tahap *desk* evaluasi, dengan hasil terdapat satu unit kerja yang tidak memenuhi syarat berpredikat menuju WBK yaitu Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul, disebabkan hasil verifikasi lapangan terdapat dua area Komponen Pengungkit yang tidak memenuhi ambang batas minimal 60% yaitu Manajemen Perubahan dan Penguatan Pengawasan.
3. **Sidang Pleno**, dilaksanakan pada November 2022 terhadap 18 unit kerja dengan hasil seluruhnya dinyatakan lulus dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan KKP Tahun 2022.
4. Rekapitulasi nilai hasil pleno 18 unit kerja sebagaimana terlampir, adapun form Berita Acara Hasil Penilaian dapat diunduh pada tautan <https://bit.ly/BAHPZI-TPI-2022>.

Sehubungan dengan hal tersebut, tanpa mengurangi nilai positif yang sudah dilakukan, maka dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, antikorupsi, dan pelayanan publik yang prima maka dimohon kepada Saudara:

1. Melakukan pendampingan secara berkesinambungan terhadap unit kerja yang telah berpredikat menuju WBK KKP agar dapat diusulkan sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK Nasional Tahun 2023.
2. Melakukan pembinaan terhadap unit kerja yang belum memenuhi syarat menuju WBK KKP agar senantiasa meningkatkan kualitas Pembangunan ZI secara berkelanjutan.
3. Menginstruksikan unit kerja yang belum membangun ZI untuk melaksanakan pembangunan ZI sesuai amanat Permen KP Nomor 49 Tahun 2021.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Inspektur Jenderal
Inspektur V



Ditandatangani
secara elektronik

Cipto Hadi Prayitno

Tembusan:
Plt. Inspektur Jenderal KKP

**DAFTAR UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WBK KKP
TAHUN 2022**

No	Unit Kerja	Nilai	
		Hasil Lapangan (e-ZI)	Hasil Pleno
A. Sekretariat Jenderal			
1.	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	88,61	84,54
B. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap			
1.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	88,07	85,71
C. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya			
1.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam	89,87	88,03
2.	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	88,33	85,73
3.	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	83,46	82,20
D. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
1.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna	90,82	89,91
2.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang	90,55	89,32
3.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan	89,91	88,42
E. Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			
1.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi	88,50	85,03
2.	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	83,94	81,28
3.	Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta	79,83	76,81
F. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan			
1.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan	91,97	89,86
2.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon	89,63	89,25
3.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan	90,24	88,11
4.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I	88,86	87,37
5.	Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I	88,34	86,96

No	Unit Kerja	Nilai	
		Hasil Lapangan (e-ZI)	Hasil Pleno
6.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta	86,16	86,30
7.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Batam	85,83	85,94

10. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBL Lombok



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.205/DJPB.1/KU.520/I/2026 12 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 lembar
Hal : Capaian IKU Prosentase Penyelesaian LHP
BPK-RI

Yth. Daftar Terlampir

Berdasarkan Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”, bersama ini disampaikan capaian IKU “Prosentase Penyelesaian LHP BPK-RI” lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai berikut :

1. Realisasi capaian IKU diperoleh dari Jumlah nilai temuan BPK pada laporan Keuangan KKP Tahun 2025 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran KKP Tahun 2025.
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan hingga periode Triwulan IV Tahun 2025 lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 0,037%.
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dari masing-masing Satker disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan

Tembusan :
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Lampiran

Nomor : B.205/DJPB.1/KU.520/I/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

DAFTAR PEJABAT PENERIMA SURAT DINAS

- 1 Direktur Ikan Air Tawar
- 2 Direktur Ikan Air Payau
- 3 Direktur Ikan Air Laut
- 4 Direktur Rumput Laut
- 5 Direktur Prasarana dan Sarana
- 6 Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
- 7 Plt.Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
- 8 Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
- 9 Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
- 10 Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
- 11 Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
- 12 Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
- 13 Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
- 14 Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
- 15 Plt.Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
- 16 Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
- 17 Plt Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam
- 18 Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
- 19 Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekekaran Karangasem
- 20 Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

a.n.Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Tinggal Hermawan

Lampiran

Nomor : B.205/DJPB.1/KU.520/I/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

**Rincian Capaian Tindak Lanjut LHP BPK atas Laporan
Keuangan KKP Tahun 2025**

No	Unit Kerja	Temuan LHP BPK TA 2025	Temuan yang diselesaikan	Tuntas (%)	Sisa
1	BBPBL Lampung	-	-	100%	-
2	BBPBAT Sukabumi	161.831.881	161.831.881	100%	-
3	BBPBAP Jepara	-	-	100%	-
4	BPBL Ambon	-	-	100%	-
5	BPBAP Ujung Batee	-	-	100%	-
6	BPBAP Takalar	-	-	100%	-
7	BPBAT Sungai Gelam	-	-	100%	-
8	BPBAT Tatelu	-	-	100%	-
9	BPBAP Situbondo	17.180.031	17.180.031	100%	-
10	BPBAT Mandiangin	-	-	100%	-
11	BPBL Lombok	-	-	100%	-
12	BPBL Batam	-	-	100%	-
13	BLUPPB Karawang	69.360.003	69.360.003	100%	-
14	BPIUUK Karangasem	-	-	100%	-
15	BPKIL Serang	-	-	100%	-
16	Direktorat Ikan Air Laut	-	-	100%	-
17	Direktorat Ikan Air Tawar	-	-	100%	-
18	Direktorat Ikut Air Payau	-	-	100%	-
19	Direktorat Rumput Laut	119.635.797	119.635.797	100%	-
20	Direktorat Prasarana dan Sarana	-	-	100%	-
20	Setditjen Perikanan Budi Daya	-	-	100%	-
TOTAL		368.007.712	368.007.712	100%	-

**11. Persentase Rekomendasi
Hasil Pengawasan yang
Dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja Satker
BPBL Lombok**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.200/DJPB.1/TU.140/I/2026 12 Januari 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB" Triwulan IV Tahun 2025 (Revisi)

Yth. (daftar terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan IV Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB" sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 30 September 2025 (Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 31 Desember 2025 (Triwulan IV Tahun 2025).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan IV Tahun 2025 lingkup DJPB sebesar 98,28% (tuntas 401 dari 408 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing Satker disampaikan pada lampiran II.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya,
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Lampiran I Surat Dinas
Nomor : B.200/DJPB.1/TU.140/I/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

Daftar Penerima Surat

1. Direktur Ikan Air Tawar
2. Direktur Ikan Air Payau
3. Direktur Ikan Air Laut
4. Direktur Rumput Laut
5. Direktur Prasarana dan Sarana
6. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
7. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
8. Plt. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
9. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
10. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
11. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi
12. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
13. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
14. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
15. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
16. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
17. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
18. Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
19. Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem
20. Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya,
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan

Lampiran II Surat Dinas
Nomor : B.200/DJPB.1/TU.140/I/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

Data Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP"
Triwulan IV Tahun 2025

No	Unit Kerja	Capaian IKU
1	Direktorat Ikan Air Laut	100,00%
2	Direktorat Rumput Laut	94,59%
3	Direktorat Ikan Air Tawar	93,75%
4	Direktorat Ikan Air Payau	100,00%
5	Direktorat Prasarana dan Sarana	98,28%
6	BBPBAP Jepara	100,00%
7	BBPBL Lampung	100,00%
8	BBPBAT Sukabumi	100,00%
9	BPBAP Situbondo	100,00%
10	BPBAP Takalar	100,00%
11	BPBAT Sungai Gelam	100,00%
12	BPBAT Mandiangin	100,00%
13	BPBL Batam	100,00%
14	BPBL Lombok	100,00%
15	BPBL Ambon	100,00%
16	BPBAP Ujung Batee	98,28%
17	BPBAT Tatelu	100,00%
18	BLUPPB Karawang	100,00%
19	BPIUUK Karangasem	100,00%
20	BPKIL Serang	100,00%

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya,
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan

12. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker BPBL Lombok



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.201/DJPB.1/KU.520/I/2026 12 Januari 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budi
Daya Tahun Anggaran 2025

Yth. (Daftar Terlampir)

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 111/SJ.2/RC.610/I/2026 Tanggal 10 Januari 2026 perihal Penyampaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Penarikan data capaian IKU IKPA DJPB Tahun Anggaran 2025 berdasarkan aplikasi SPAN yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 08.58 WIB.
2. Capaian IKU IKPA DJPB Tahun Anggaran 2025 sebesar 89,57 dari target nilai 92.
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 1 (Unit Eselon 1) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Semester II Tahun 2025 pada Satker lingkup DJPB.

Demikian kami sampaikan, mohon untuk segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya,
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan

Lampiran Surat
Nomor : B.201/DJPB.1/KU.520/I/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

DAFTAR PEJABAT PENERIMA SURAT

1. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
2. Sesditjen Perikanan Budi Daya
3. Direktorat Ikan Air Tawar
4. Direktorat Ikan Air Payau
5. Direktorat Ikan Air Laut
6. Direktorat Rumput Laut
7. Direktorat Prasarana dan Sarana
8. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan IISAP
9. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Bioflok
10. Kepala BBPBAP Jepara
11. Kepala BBPBL Lampung
12. Plt. Kepala BBPBAT Sukabumi
13. Kepala BPBAP Situbondo
14. Kepala BPBAP Takalar
15. Kepala BPBAP Ujung Batee
16. Kepala BPBL Batam
17. Kepala BPBL Lombok
18. Kepala BPBL Ambon
19. Kepala BPBAT Jambi
20. Plt. Kepala BPBAT Mandiangin
21. Kepala BPBAT Tatelu
22. Kepala BLUPPB Karawang
23. Kepala BPIU2K Karangasem
24. Kepala BPKIL Serang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	03204	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	98.46	60.52	85.06	88.13	100.00	98.21	100.00	89.57	100%	0.00	89.57
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.85	9.08	17.01	8.81	10.00	9.82	25.00				
			Nilai Aspek	79.49		92.85				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	136	032	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	Nilai	100.00	94.20	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	89.13	90%	0.00	99.03
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.13	20.00	0.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	97.10		100.00				100.00				
2	045	032	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	Nilai	100.00	88.86	99.05	100.00	100.00	100.00	100.00	98.14	100%	0.00	98.14
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.33	19.81	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.43		99.76				100.00				
3	137	032	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	Nilai	100.00	91.73	100.00	100.00	100.00	93.55	100.00	98.11	100%	0.00	98.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.76	20.00	10.00	10.00	9.36	25.00				
					Nilai Aspek	95.87		98.39				100.00				
4	020	032	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	Nilai	100.00	87.92	100.00	100.00	100.00	98.09	100.00	98.00	100%	0.00	98.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.19	20.00	10.00	10.00	9.81	25.00				
					Nilai Aspek	93.96		99.52				100.00				
5	001	032	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	Nilai	100.00	88.38	100.00	0.00	100.00	99.14	100.00	88.17	90%	0.00	97.97
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.26	20.00	0.00	10.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	94.19		99.71				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA**

6	154	032	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	Nilai	100.00	86.14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.92	100%	0.00	97.92
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.92	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.07		100.00				100.00				
7	129	032	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	Nilai	100.00	91.04	98.68	0.00	100.00	100.00	100.00	58.66	60%	0.00	97.76
					Bobot	10	15	0	0	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.66	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.52		100.00				100.00				
8	179	032	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	Nilai	100.00	89.26	98.38	100.00	100.00	96.88	100.00	97.75	100%	0.00	97.75
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.39	19.68	10.00	10.00	9.69	25.00				
					Nilai Aspek	94.63		98.81				100.00				
9	017	032	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	Nilai	100.00	84.74	99.24	100.00	100.00	100.00	100.00	97.56	100%	0.00	97.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.71	19.85	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.37		99.81				100.00				
10	086	032	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	Nilai	100.00	88.30	99.97	100.00	100.00	100.00	100.00	68.25	70%	0.00	97.49
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.25	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.15		100.00				100.00				
11	061	032	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	Nilai	100.00	85.87	99.59	100.00	100.00	91.92	100.00	96.99	100%	0.00	96.99
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.88	19.92	10.00	10.00	9.19	25.00				
					Nilai Aspek	92.94		97.88				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA**

12	038	032	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	Nilai	100.00	81.48	98.61	100.00	100.00	95.15	100.00	96.46	100%	0.00	96.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.22	19.72	10.00	10.00	9.51	25.00				
					Nilai Aspek	90.74		98.44				100.00				
13	012	032	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	Nilai	100.00	73.49	100.00	100.00	100.00	91.28	99.69	95.07	100%	0.00	95.07
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.02	20.00	10.00	10.00	9.13	24.92				
					Nilai Aspek	86.75		97.82				99.69				
14	035	032	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	Nilai	100.00	100.00	99.67	50.00	100.00	96.54	100.00	65.00	70%	0.00	92.86
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	5.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
15	128	032	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	Nilai	100.00	56.25	100.00	100.00	100.00	92.58	100.00	92.70	100%	0.00	92.70
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.44	20.00	10.00	10.00	9.26	25.00				
					Nilai Aspek	78.13		98.15				100.00				
16	175	032	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	80.00	55.39	78.45	88.80	100.00	85.54	100.00	84.43	100%	0.00	84.43
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	8.31	15.69	8.88	10.00	8.55	25.00				
					Nilai Aspek	67.70		88.20				100.00				

13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker BPBL Lombok

ESELON I

MONEY

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Role: Pilih TA (2025) Logout

NK Perencanaan Eselon I

Monitoring / NK Perencanaan Eselon I

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari:

No.	Kode UEI	UEI	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	01	Sekretariat Jenderal	51.50	100.00	95.85	64.62	63.05
2	02	Inspektorat Jenderal	85.00	90.00	100.00	100.00	100.00
3	03	Badan Perencanaan Strategis	85.83	79.78	95.66	91.01	62.00
4	04	Badan Perencanaan Kebijakan	87.52	77.75	99.55	79.18	76.60
5	05	Badan Pengawasan Standar Daya Kelautan dan Perikanan	85.31	85.71	99.45	85.64	41.90
6	06	Badan Pengawasan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	88.53	75.06	100.00	100.00	71.60
7	07	Badan Pengkajian Risiko dan Dampak Lingkungan	87.09	61.53	100.00	93.42	96.25
8	08	Badan Penyelidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	99.53	100.00	99.99	98.13	91.45
9	09	Badan Pengendali dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	89.11	75.00	98.48	89.71	88.85

Menampilkan 1 sampai 9 dari 9 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2022 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

Aplikasi MONEY KEMENKEU 1.0.0 (2025-01-11 05:47:13)

DJPB

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	032.04.015063	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	032.04.025173	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
3	032.04.039164	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4	032.04.045098	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	032.04.059191	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
6	032.04.069346	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
7	032.04.079137	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
8	032.04.089144	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
9	032.04.099326	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
10	032.04.109133	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
11	032.04.119342	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
12	032.04.129124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
13	032.04.139139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
14	032.04.149125	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
15	032.04.159115	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
16	032.04.169113	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
17	032.04.179114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
18	032.04.189144	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
19	032.04.199138	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
20	032.04.209118	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00
21	032.04.219069	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00
22	032.04.229111	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00
23	032.04.237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	91,76	96,93	83,33	71,50
24	032.04.238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	95,33	100,00	83,33	80,00
25	032.04.239139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
26	032.04.239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	95,00	100,00	50,00	100,00
27	032.04.249170	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
28	032.04.259108	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROPINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	032.04.269121	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00
30	032.04.289113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
31	032.04.299396	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
32	032.04.309171	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
33	032.04.319095	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	032.04.329068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI KEPULAUAN RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
35	032.04.339997	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
36	032.04.349131	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
37	032.04.427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	94,00	100,00	100,00	60,00
38	032.04.445383	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BUPPPB) KARAWANG	95,33	100,00	83,33	80,00
39	032.04.445394	BALAI PRODUKSI INDIK UDANG UNGGUL DAN KERANGKASAN KARANGASEN	96,92	100,00	100,00	79,45
40	032.04.436911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	97,50	100,00	75,00	100,00
41	032.04.567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	97,50	100,00	75,00	100,00
42	032.04.567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	95,00	100,00	50,00	100,00
43	032.04.567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	96,56	100,00	100,00	77,05
44	032.04.587544	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDANGIN	94,25	100,00	80,00	75,00
45	032.04.567480	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAB	74,99	99,98	0,00	0,00
45	032.04.567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAB	74,99	99,98	0,00	0,00
46	032.04.567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	91,84	98,56	66,67	75,00
47	032.04.567782	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	97,00	100,00	100,00	80,00
48	032.04.567890	BALAI PENGIJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	72,50	96,67	0,00	0,00
49	032.04.632462	SETORJEN PERIKANAN BUDIDAYA	90,91	100,00	75,00	56,05
50	032.04.690965	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PAPUA BARAT DAYA	0,00	0,00	0,00	0,00
51	032.04.690967	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN PAPUA PEGUMUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
52	032.04.690968	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI PAPUA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
53	032.04.690969	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI PAPUA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
54	032.04.691247	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00

14. Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Lombok



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.138/DJPB.1/KP.160/I/2026
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Capaian IKU Indeks Pengelolaan SDM Aparatur

8 Januari 2026

Yth. Daftar Terlampir

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025, bersama ini disampaikan bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian Indeks Pengelolaan SDM Aparatur diukur berdasarkan komponen :
 - a. Dokumen kebutuhan ASN.
 - b. Dokumen kompetensi ASN.
 - c. Dokumen layanan mutasi.
 - d. Dokumen layanan ketatausahaan ASN.
 - e. Dokumen informasi ASN.
2. Target Pengukuran Indeks Pengelolaan SDM Aparatur lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada tahun 2025 adalah **70 dengan predikat rata-rata dan level indeks 3.**
3. Capaian Indeks Pengelolaan SDM Aparatur lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya per tanggal 7 Januari 2026 adalah sebagaimana pada lampiran 2.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Tinggal Hermawan

Tembusan :
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya.

Lampiran 1 Surat Dinas
Nomor : B.138/DJPB.1/KP.160/I/2026
Tanggal : 8 Januari 2025

Daftar Penerima Surat

1. Direktur Ikan Air Tawar
2. Direktur Ikan Air Payau
3. Direktur Ikan Air Laut
4. Direktur Rumput Laut
5. Direktur Prasarana dan Sarana
6. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
7. Plt. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
8. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
9. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
10. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
11. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
12. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
13. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam, Jambi
14. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
15. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
16. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
17. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
18. Kepala Balai Layanan Produksi dan Usaha Budidaya Karawang
19. Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem
20. Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
21. Ketua Tim Kerja Program dan Kerja Sama

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Tinggal Hermawan

Lampiran 2 Surat Dinas
Nomor : B.138/DJPB.1/KP.160/I/2026
Tanggal : 8 Januari 2026

Rekapitulasi Capaian Indeks Pengelolaan SDM Aparatur Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Tahun 2024

No	Unit Kerja	Komponen Indeks Pengelolaan SDM						Predikat	Level
		Kebutuhan	Kompetensi	Layanan Mutasi	Layanan Ketatausahaan	Informasi Kepegawaian	Jumlah		
1	Sekretariat DJPB	25	20	22	15	15	92	Sangat Baik	6
2	Dit Ikan Air Tawar	25	20	25	15	15	100	Sangat Baik	6
3	Dit Ikan Air Payau	25	20	25	15	15	100	Sangat Baik	6
4	Dit Ikan Air Laut	25	20	25	15	15	100	Sangat Baik	6
5	Dit Rumput Laut	25	20	20	15	15	95	Sangat Baik	6
6	Dit Prasarana dan Sarana	25	20	25	15	15	100	Sangat Baik	6
7	BBPBAP Jepara	25	20	25	15	15	100	Sangat Baik	6
8	BBPBAT Sukabumi	25	20	25	15	15	100	Sangat Baik	6
9	BBPBL Lampung	25	20	19,64	15	15	94,65	Sangat Baik	6
10	BPBAP Situbondo	25	20	25	15	15	100	Sangat Baik	6
11	BPBAP Takalar	20	20	15	15	15	85	Baik	5
12	BPBAP Ujung Batee	25	20	25	15	15	100	Sangat Baik	6
13	BPBAT Jambi	25	20	22,5	15	15	97,5	Sangat Baik	6
14	BPBAT Mandiangin	25	20	25	15	15	100	Sangat Baik	6

No	Unit Kerja	Komponen Indeks Pengelolaan SDM						Predikat	Level
		Kebutuhan	Kompetensi	Layanan Mutasi	Layanan Ketatausahaan	Informasi Kepegawaian	Jumlah		
15	BPBAT Tatelu	25	20	15,91	15	15	90,91	Baik	5
16	BPBL Ambon	25	20	21,15	15	15	96,15	Sangat Baik	6
17	BPBL Batam	25	20	23,08	15	15	98,08	Sangat Baik	6
18	BPBL Lombok	25	20	25	15	15	100	Sangat Baik	6
19	BLUPPB Karawang	25	20	17,11	15	15	92,11	Sangat Baik	6
20	BPIUUK Karangasem	25	20	25	15	15	100	Sangat Baik	6
21	BPKIL Serang	25	20	25	15	15	100	Sangat Baik	6

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Tinggal Hermawan

15. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Lombok



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 25/PPID-KKP/XII/2025

TENTANG

HASIL PENILAIAN EVALUASI MANDIRI
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa guna mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan rangkaian tahapan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2025 terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana baik pada unit organisasi eselon I maupun unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa salah satu tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a yakni tahap evaluasi mandiri dilakukan melalui pengisian kuesioner, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolak ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TENTANG HASIL PENILAIAN EVALUASI MANDIRI MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terukur, objektif, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.
- KEDUA : Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri dari dua kategori unit kerja yang telah diklasifikasikan berdasarkan tolok ukur yang dihasilkan dari tahapan pengisian kuesioner penilaian mandiri (*Self Assessment Questionnaire/SAQ*) pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 merupakan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan tidak dapat diganggu gugat.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2025

KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA LUAR NEGERI
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

ZAKI MUBAROK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 25/PPID-KKP/XII/2025
TENTANG HASIL PENILAIAN EVALUASI
MANDIRI MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2025

HASIL PENILAIAN EVALUASI MANDIRI
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

A. Informatif (Nilai 90 s.d. 100)

PPID Pelaksana Eselon I

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	100
2.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	100
3.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	100
4.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	100
5.	Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	100
6.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100
7.	Sekretariat Inspektorat Jenderal	100
8.	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	100
9.	Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	100

PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar	100
2.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang	100
3.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong	100
4.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang	100
5.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak	100
6.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar	100
7.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	100
8.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	100
9.	Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	100
10.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	100

11.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	100
12.	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara	100
13.	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	100
14.	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	100
15.	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	100
16.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi	100
17.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu	100
18.	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPP) Karawang	100
19.	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUK) Karangasem	100
20.	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang	100
21.	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Ambon	100
22.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa	100
23.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tual	100
24.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak	100
25.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi	100
26.	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang	100
27.	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRSDI) Jatiluhur	100
28.	Balai Riset Pemuliaan Ikan, Sukamandi	100
29.	Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP)	100
30.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Balikpapan	100
31.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Mataram	100
32.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Sorong	100
33.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Ambon	100
34.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Aceh	100
35.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jakarta II	100
36.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Tarakan	100
37.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Ternate	100
38.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Padang	100
39.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Cirebon	100
40.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bandung	100
41.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan	100

	Hasil Perikanan (BKIPM) Banjarmasin	
42.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Batam	99,90
43.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan	99,90
44.	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	99,88
45.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	99,80
46.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	99,80
47.	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Bogor	99,73
48.	Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee	99,70
49.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Surabaya I	99,70
50.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Merak	99,60
51.	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	99,50
52.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Cilacap	99,40
53.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat	99,38
54.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak	99,35
55.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal	99,35
56.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal	99,30
57.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Merauke	99,11
58.	Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok	99,05
59.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo	98,88
60.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jayapura	98,85
61.	Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Makassar	98,80
62.	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP)	98,55
63.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Luwuk Banggai	98,50
64.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Yogyakarta	98,50
65.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tahuna	98,50
66.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan	98,25
67.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta	97,85
68.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bima	97,80
69.	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	97,60
70.	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	97,52
71.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	97,32
72.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan	97,31
73.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bengkulu	97,30

74.	Balai Riset Perikanan Budaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Maros	97,10
75.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palangkaraya	96,93
76.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam	96,85
77.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan	96,83
78.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Jambi	96,78
79.	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	96,32
80.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	96,05
81.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pangkal Pinang	95,82
82.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Entikong	95,68
83.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bau - Bau	95,58
84.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung	95,45
85.	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	95,40
86.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Lampung	95,40
87.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang	95,10
88.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Medan II	94,80
89.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kupang	94,65
90.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru Ambon	94,63
91.	Loka Riset Perikanan Tuna, Benoa	94,18
92.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pontianak	94,10
93.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	93,35
94.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Mamuju	93,35
95.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Manado	93,13
96.	Balai Uji Standar KIPM	93,05
97.	Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	92,90
98.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung	92,80
99.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	92,65
100.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Gorontalo	92,60
101.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon	92,42
102.	Balai Riset Perikanan Laut, Jakarta	92,17
103.	Loka Riset Budidaya Rumput Laut, Boalemo Gorontalo	92,15
104.	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, Gondol Buleleng Singaraja	92,10
105.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kupang	91,60
106.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo	91,41
107.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana	91,35

B. Menuju Informatif (Nilai 80 s.d. 89,9)

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Politeknik Ahli Usaha Perikanan	89,81
2.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Semarang	89,80
3.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual	89,02
4.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi	88,64
5.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Medan I	88,30
6.	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	86,57
7.	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung	85,81
8.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	84,75
9.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Surabaya II	84,62
10.	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	84,21
11.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palu	83,65
12.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone	82,85
13.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai	82,70
14.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	82,36
15.	Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman	82,19
16.	Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	82,17
17.	Balai Besar Penangkapan Ikan	81,98
18.	Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir Padang	80,11
19.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon	80,10

C. Cukup Informatif (Nilai 60 s.d. 79,9)

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Denpasar	79,80
2.	Akademi Komunitas Kelautan Perikanan Wakatobi	79,27
3.	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	79,02
4.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	76,10
5.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong Aceh	74,55
6.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	74,15
7.	Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan, Wakatobi	72,70
8.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Tanjung Pinang	71,25
9.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Pekanbaru	70,82
10.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman	70,19
11.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang	69,56
12.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong	69,18

13.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kendari	67,41
14.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jakarta I	67,35
15.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran	66,25
16.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Tanjung Balai Asahan	62,87
17.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Tahuna	62,10

D. Kurang Informatif (Nilai 40 s.d. 59)

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang	53,14
2.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	47,32

E. Tidak Informatif (Nilai < 39,9)

NO	UNIT ORGANISASI	NILAI
1.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang	0

KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
KERJA SAMA LUAR NEGERI
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,



Ditandatangani
Secara Elektronik

ZAKI MUBAROK



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR: B.1268/MEN-KP/XII/2025

Penghargaan diberikan kepada:

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

sebagai unit organisasi berpredikat

INFORMATIF

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Jakarta, 2 Desember 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR: B.1268/MEN-KP/XII/2025

Penghargaan diberikan kepada:

**BALAI BESAR PERIKANAN
BUDIDAYA LAUT LAMPUNG**

sebagai unit organisasi berpredikat

INFORMATIF

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Jakarta, 2 Desember 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR: B.1268/MEN-KP/XII/2025

Penghargaan diberikan kepada:

**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA
AIR PAYAU SITUBONDO**

sebagai unit organisasi berpredikat

INFORMATIF

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Jakarta, 2 Desember 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR: B.1268/MEN-KP/XII/2025

Penghargaan diberikan kepada:

**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA
AIR TAWAR SUNGAI GELAM**

sebagai unit organisasi berpredikat

INFORMATIF

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Jakarta, 2 Desember 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR: B.1268/MEN-KP/XII/2025

Penghargaan diberikan kepada:

BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM

sebagai unit organisasi berpredikat

INFORMATIF

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Jakarta, 2 Desember 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR: B.1268/MEN-KP/XII/2025

Penghargaan diberikan kepada:

**BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI
PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG**

sebagai unit organisasi berpredikat

INFORMATIF

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Jakarta, 2 Desember 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR: B.1268/MEN-KP/XII/2025

Penghargaan diberikan kepada:

**BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA
AIR PAYAU JEPARA**

sebagai unit organisasi berpredikat

INFORMATIF

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Jakarta, 2 Desember 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR: B.1268/MEN-KP/XII/2025

Penghargaan diberikan kepada:

**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA
AIR TAWAR TATELU**

sebagai unit organisasi berpredikat

INFORMATIF

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Jakarta, 2 Desember 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR: B.1268/MEN-KP/XII/2025

Penghargaan diberikan kepada:

**BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA
AIR TAWAR SUKABUMI**

sebagai unit organisasi berpredikat

INFORMATIF

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Jakarta, 2 Desember 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR: B.1268/MEN-KP/XII/2025

Penghargaan diberikan kepada:

**BALAI PERIKANAN
BUDIDAYA LAUT AMBON**

sebagai unit organisasi berpredikat

INFORMATIF

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Jakarta, 2 Desember 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR: B.1268/MEN-KP/XII/2025

Penghargaan diberikan kepada:

BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG

sebagai unit organisasi berpredikat

INFORMATIF

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Jakarta, 2 Desember 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR: B.1268/MEN-KP/XII/2025

Penghargaan diberikan kepada:

**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA
AIR TAWAR MANDIANGIN**

sebagai unit organisasi berpredikat

INFORMATIF

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Jakarta, 2 Desember 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR: B.1268/MEN-KP/XII/2025

Penghargaan diberikan kepada:

**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA
AIR PAYAU UJUNG BATEE**

sebagai unit organisasi berpredikat

INFORMATIF

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Jakarta, 2 Desember 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR: B.1268/MEN-KP/XII/2025

Penghargaan diberikan kepada:

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

sebagai unit organisasi berpredikat

INFORMATIF

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Jakarta, 2 Desember 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR: B.1268/MEN-KP/XII/2025

Penghargaan diberikan kepada:

**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA
AIR PAYAU TAKALAR**

sebagai unit organisasi berpredikat

INFORMATIF

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Jakarta, 2 Desember 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR: B.1268/MEN-KP/XII/2025

Penghargaan diberikan kepada:

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM

sebagai unit organisasi berpredikat

INFORMATIF

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Jakarta, 2 Desember 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan RI



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

16. Persentase Layanan Perkantoran Satker BPBL Lombok

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

MEMORANDUM
NOMOR 3/BPBL-L/TU.210/I/2026

Yth. : Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
Dari : Ketua Tim Dukungan Managerial
Hal : IKU Persentase Layanan Perkantoran BPBL Lombok
Tanggal : 12 Januari 2026

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok TA. 2025, bersama ini kami sampaikan capaian IKU Persentase Layanan Perkantoran Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok TA. 2025 dengan rincian sebagai berikut:

NILAI IKU LAYANAN PERKANTORAN

No	JENIS LAYANAN	PERMINTAAN	REALISASI	KETERANGAN
1.	Layanan Pemeliharaan Kendaraan	7	7	Layanan TW IV
2.	Layanan Rapat	14	14	Layanan TW IV
3.	Layanan Perbaikan Peralatan dan Mesin	8	8	Layanan TW IV
		29	29	

Dengan Perhitungan :

Prosentase Layanan = $\frac{\text{Jumlah Permintaan Layanan Perkantoran}}{\text{Jumlah Layanan yang telah terselesaikan}} \times 100\%$

Berdasarkan hasil evaluasi prosentase layanan perkantoran pada Tahun 2025 sebesar 100% melebihi target yang ditetapkan yaitu 80%

Demikian disampaikan , atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Nadia Fathannisa

**17. Persentase Rencana
Umum Pengadaan PBJ
yang diumumkan pada
SIRUP Satker BPBL Lombok**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR : 41/SJ.7/PL.410/I/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 13 Januari 2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki 149 Satuan kerja (satker) pengelola DIPA Aktif Tahun Anggaran 2025 yang tersebar di 9 unit kerja eselon I. Seluruh satuan kerja tersebut telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen kertas kerja dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi atau kurang dari 100%. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai Pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam rekap RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP.

Berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Saat ini telah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025. Sebagai informasi, sampai dengan waktu *cut off* data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan pada tanggal 11 Januari 2026 pukul 23:59 WIB, dan dilanjutkan dengan OLAP (*Online Analytical Processing*) dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak akses terakhir inputan data pada SIRUP selesai dilakukan oleh satuan kerja. Dari hasil perhitungan dan olah data, dapat disampaikan secara keseluruhan satuan kerja lingkup KKP telah mencapai persentase RUP Terumumkan 100,00% pada periode penilaian capaian IKU Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran 1

Nomor : 41/SJ.7/PL.410/I/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 4 TAHUN ANGGARAN 2025 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kode E1	Nama Unit Eselon 1	Σ SATKER	Persentase RUP Terumumkan				% Target IKU TW 4	% Capaian Target IKU TW 4	Keterangan
			Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Keterangan			
01	Sekretariat Jenderal	3	357,549,859,996	448,763,141,996	91,213,282,000	Sesuai	76.00%	91.19%	Capaian Target Maksimal
02	Inspektorat Jenderal	1	3,868,642,000	3,868,642,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	3,092,504,918,600	3,092,504,918,600	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,461,299,259,718	1,461,299,259,718	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	1,404,052,006,574	1,404,052,006,574	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	62,082,313,281	62,082,313,281	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9	2,377,171,057,536	2,377,171,057,536	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	42	208,693,653,108	208,693,653,108	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	37	100,936,435,522	100,936,435,522	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
TOTAL		149	9,068,158,146,335	9,159,371,428,335	91,213,282,000			99.02%	



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teguh Wibowo

Lampiran 2

Nomor : 41/SJ.7/PL.410/I/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TRIWULAN 4 TAHUN ANGGARAN 2025 PER SATUAN KERJA

Sekretariat Jenderal

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	9,069,898,000	-	9,069,898,000			9,069,898,000	9,069,898,000	0	100.00%
2	BIRO UMUM dan PBJ SETJEN KKP	422,159,781,996	14,006,635,000	436,166,416,996			344,953,134,996	344,953,134,996	91,213,282,000	126.44%
3	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,526,827,000		3,526,827,000			3,526,827,000	3,526,827,000	0	100.00%
TOTAL		434,756,506,996	14,006,635,000	448,763,141,996	-	-		357,549,859,996	91,213,282,000	108.81%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
									NILAI CAPAIAN 91.19%	

Inspektorat Jenderal

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	INSPEKTORAT JENDERAL	3,868,642,000	-	3,868,642,000			3,868,642,000	3,868,642,000	0	100.00%
TOTAL		3,868,642,000	-	3,868,642,000	-	-		3,868,642,000	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
									NILAI CAPAIAN 100.00%	

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	4,654,763,000	450,642,000	5,105,405,000		109,857,000	4,995,548,000	5,105,405,000	0	100.00%
2	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	2,500,368,000	1,726,822,000	4,227,190,000		173,053,000	4,054,137,000	4,227,190,000	0	100.00%
3	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	6,299,090,000	-	6,299,090,000		208,227,000	6,090,863,000	6,299,090,000	0	100.00%
4	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	5,026,187,000	-	5,026,187,000		216,547,000	4,809,640,000	5,026,187,000	0	100.00%
5	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	463,513,809,000	-	463,513,809,000		457,069,402,000	6,444,407,000	463,513,809,000	0	100.00%
6	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	4,000,680,000	-	4,000,680,000		269,268,000	3,731,412,000	4,000,680,000	0	100.00%
7	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	3,066,333,000	-	3,066,333,000		107,070,000	2,959,263,000	3,066,333,000	0	100.00%
8	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	4,391,089,000	-	4,391,089,000		686,480,000	3,704,609,000	4,391,089,000	0	100.00%
9	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2,338,592,000	-	2,338,592,000		44,900,000	2,293,692,000	2,338,592,000	0	100.00%
10	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	1,160,369,582,000	-	1,160,369,582,000		1,156,224,800,000	4,144,782,000	1,160,369,582,000	0	100.00%
11	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	3,096,535,000	-	3,096,535,000		143,086,000	2,953,449,000	3,096,535,000	0	100.00%
12	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	2,174,331,000	2,026,728,000	4,201,059,000		149,001,000	4,052,058,000	4,201,059,000	0	100.00%
13	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	2,103,023,000	6,400,000	2,109,423,000		7,744,000	2,101,679,000	2,109,423,000	0	100.00%
14	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	1,017,529,000	2,082,335,000	3,099,864,000		201,385,000	2,898,479,000	3,099,864,000	0	100.00%
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	4,871,854,000	-	4,871,854,000		611,181,000	4,260,673,000	4,871,854,000	0	100.00%
16	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	3,309,753,000	51,637,000	3,361,390,000		40,946,000	3,320,444,000	3,361,390,000	0	100.00%
17	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,956,661,000	-	2,956,661,000		56,249,000	2,900,412,000	2,956,661,000	0	100.00%
18	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	3,045,920,000	2,346,994,000	5,392,914,000		444,154,000	4,948,760,000	5,392,914,000	0	100.00%
19	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	61,243,950,000	31,000,000	61,274,950,000		55,630,617,000	5,644,333,000	61,274,950,000	0	100.00%
20	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	2,358,509,000	-	2,358,509,000		0	2,358,509,000	2,358,509,000	0	100.00%
21	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	6,382,333,600	-	6,382,333,600		548,134,000	5,834,199,600	6,382,333,600	0	100.00%
22	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	38,627,180,000	-	38,627,180,000		31,472,039,000	7,155,141,000	38,627,180,000	0	100.00%
23	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	20,507,865,000	-	20,507,865,000		3,614,615,000	16,893,250,000	20,507,865,000	0	100.00%
24	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1,259,136,398,836	16,790,025,164	1,275,926,424,000		1,252,038,840,210	23,887,583,790	1,275,926,424,000	0	100.00%
TOTAL		3,066,992,335,436	25,512,583,164	3,092,504,918,600	-	2,960,067,595,210	132,437,323,390	3,092,504,918,600	-	100.0000%
FORMULA PERHITUNGAN										
Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%		Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.								

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	14,153,419,615	118,921,000	14,272,340,615		6,523,696,615	7,748,644,000	14,272,340,615	0	100.00%
2	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	23,779,406,000	-	23,779,406,000		18,389,599,000	5,389,807,000	23,779,406,000	0	100.00%
3	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	14,509,226,000	1,101,106,000	15,610,332,000		11,268,723,000	4,341,609,000	15,610,332,000	0	100.00%
4	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	42,758,045,000	11,655,239,000	54,413,284,000		24,328,660,000	30,084,624,000	54,413,284,000	0	100.00%
5	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	4,388,427,000	-	4,388,427,000		1,128,953,000	3,259,474,000	4,388,427,000	0	100.00%
6	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	17,324,561,000	7,151,046,000	24,475,607,000		5,342,752,000	19,132,855,000	24,475,607,000	0	100.00%
7	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	10,819,324,000	976,321,000	11,795,645,000		6,766,620,000	5,029,025,000	11,795,645,000	0	100.00%
8	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	9,244,294,000	-	9,244,294,000		5,564,366,000	3,679,928,000	9,244,294,000	0	100.00%
9	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	6,885,546,000	3,379,211,000	10,264,757,000		7,134,462,000	3,130,295,000	10,264,757,000	0	100.00%
10	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	9,742,232,000	5,638,145,000	15,380,377,000		10,457,450,000	4,922,927,000	15,380,377,000	0	100.00%
11	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	5,054,907,000	2,061,297,000	7,116,204,000		5,387,502,000	1,728,702,000	7,116,204,000	0	100.00%
12	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	9,787,646,000	4,338,000	9,791,984,000		6,646,293,000	3,145,691,000	9,791,984,000	0	100.00%
13	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	4,507,731,000	4,183,662,000	8,691,393,000		4,424,860,000	4,266,533,000	8,691,393,000	0	100.00%
14	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	5,293,648,000	2,703,818,000	7,997,466,000		6,797,648,000	1,199,818,000	7,997,466,000	0	100.00%
15	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	3,761,994,000	1,942,249,000	5,704,243,000		2,157,558,000	3,546,685,000	5,704,243,000	0	100.00%
16	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	1,236,302,182,103	2,071,318,000	1,238,373,500,103		1,218,838,384,103	19,535,116,000	1,238,373,500,103	0	100.00%
TOTAL		1,418,312,588,718	42,986,671,000	1,461,299,259,718	-	1,341,157,526,718	120,141,733,000	1,461,299,259,718	-	100.00%

FORMULA PERHITUNGAN

Note :

= (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100%

= (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

NILAI CAPAIAN INDIKATOR menjadi

100.00%

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	29,445,819,000	-	29,445,819,000		25,192,451,000	4,253,368,000	29,445,819,000	0	100.00%
2	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	12,662,396,999	-	12,662,396,999		7,770,543,000	4,891,853,999	12,662,396,999	0	100.00%
3	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	21,896,368,000	-	21,896,368,000		16,792,289,000	5,104,079,000	21,896,368,000	0	100.00%
4	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM	17,612,902,000	-	17,612,902,000		13,374,397,000	4,238,505,000	17,612,902,000	0	100.00%
5	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA	19,452,293,500	-	19,452,293,500		17,312,873,500	2,139,420,000	19,452,293,500	0	100.00%
6	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO	16,739,797,500	-	16,739,797,500		14,367,938,500	2,371,859,000	16,739,797,500	0	100.00%
7	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SDKP	1,202,705,796,575	-	1,202,705,796,575		1,191,786,130,000	10,919,666,575	1,202,705,796,575	0	100.00%
8	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	14,929,268,000	-	14,929,268,000		11,918,715,000	3,010,553,000	14,929,268,000	0	100.00%
9	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	18,169,047,000	-	18,169,047,000		15,535,927,000	2,633,120,000	18,169,047,000	0	100.00%
10	STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON	9,104,332,000	-	9,104,332,000		7,403,801,000	1,700,531,000	9,104,332,000	0	100.00%
11	STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK	9,355,502,000	-	9,355,502,000		7,660,581,000	1,694,921,000	9,355,502,000	0	100.00%
12	STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	6,463,175,000	-	6,463,175,000		3,524,502,000	2,938,673,000	6,463,175,000	0	100.00%
13	STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG	9,899,835,000	-	9,899,835,000		8,610,962,000	1,288,873,000	9,899,835,000	0	100.00%
14	STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA	8,415,150,000	-	8,415,150,000		7,097,827,000	1,317,323,000	8,415,150,000	0	100.00%
15	STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN	7,200,324,000	-	7,200,324,000		4,931,464,000	2,268,860,000	7,200,324,000	0	100.00%
TOTAL		1,404,052,006,574	-	1,404,052,006,574	-	1,353,280,401,000	50,771,605,574	1,404,052,006,574	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN										
Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%		Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.								
		NILAI CAPAIAN INDIKATOR menjadi 100.00%								

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	13,499,025,000	-	13,499,025,000	5,947,202,000		7,551,823,000	13,499,025,000	0	100.00%
2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KP	48,583,288,281	-	48,583,288,281	36,065,535,000		12,517,753,281	48,583,288,281	0	100.00%
TOTAL		62,082,313,281	-	62,082,313,281	42,012,737,000	-	20,069,576,281	62,082,313,281	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN										
Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%		Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.								
		NILAI CAPAIAN INDIKATOR 100.00%								

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	815,181,000	1,030,758,000	1,845,939,000	576,115,000		1,269,824,000	1,845,939,000	0	100.00%
2	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN BBRBLPP	2,534,284,000	-	2,534,284,000	-		2,534,284,000	2,534,284,000	0	100.00%
3	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP	6,063,515,000	-	6,063,515,000			6,063,515,000	6,063,515,000	0	100.00%
4	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BBRSEKP	114,882,000	-	114,882,000	-		114,882,000	114,882,000	0	100.00%
5	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	630,829,000	1,492,437,000	2,123,266,000	47,589,000		2,075,677,000	2,123,266,000	0	100.00%
6	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	3,716,863,000	5,714,647,000	9,431,510,000	5,753,200,000		3,678,310,000	9,431,510,000	0	100.00%
7	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	2,313,249,000	-	2,313,249,000	289,374,000		2,023,875,000	2,313,249,000	0	100.00%
8	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	2,124,597,000	-	2,124,597,000	276,203,000		1,848,394,000	2,124,597,000	0	100.00%
9	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	19,799,969,000	-	19,799,969,000	16,630,596,000		3,169,373,000	19,799,969,000	0	100.00%
10	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	1,453,775,000	-	1,453,775,000			1,453,775,000	1,453,775,000	0	100.00%
11	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS BRBIH	2,579,025,000	-	2,579,025,000			2,579,025,000	2,579,025,000	0	100.00%
12	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN BRPI	3,697,213,000	-	3,697,213,000			3,697,213,000	3,697,213,000	0	100.00%
13	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN BRPSDI	2,085,628,000	-	2,085,628,000			2,085,628,000	2,085,628,000	0	100.00%
14	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	7,756,209,000	197,855,000	7,954,064,000	1,611,115,000		6,342,949,000	7,954,064,000	0	100.00%
15	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	4,935,402,000	-	4,935,402,000	-		4,935,402,000	4,935,402,000	0	100.00%
16	BALAI RISET PERIKANAN LAUT BRPL	904,514,000	-	904,514,000			904,514,000	904,514,000	0	100.00%
17	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	5,671,292,000	543,937,000	6,215,229,000	-		6,215,229,000	6,215,229,000	0	100.00%
18	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN LPTK	219,049,000	1,237,094,000	1,456,143,000			1,456,143,000	1,456,143,000	0	100.00%
19	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT LRBR	1,223,254,000	74,096,000	1,297,350,000			1,297,350,000	1,297,350,000	0	100.00%
20	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	442,411,000	483,225,000	925,636,000			925,636,000	925,636,000	0	100.00%
21	LOKA RISET PERIKANAN TUNA LRPT	1,941,830,000	-	1,941,830,000			1,941,830,000	1,941,830,000	0	100.00%
22	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR LRSDKP	1,035,654,000	1,053,546,000	2,089,200,000			2,089,200,000	2,089,200,000	0	100.00%
23	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	15,571,107,000	-	15,571,107,000	5,777,684,000		9,793,423,000	15,571,107,000	0	100.00%
24	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	2,209,869,000	-	2,209,869,000	1,086,997,000		1,122,872,000	2,209,869,000	0	100.00%
25	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	1,538,411,000	3,197,761,000	4,736,172,000	1,451,020,000		3,285,152,000	4,736,172,000	0	100.00%
26	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	2,539,286,000	2,389,850,000	4,929,136,000	3,316,996,000		1,612,140,000	4,929,136,000	0	100.00%
27	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	711,207,000	1,923,054,000	2,634,261,000	1,156,133,000		1,478,128,000	2,634,261,000	0	100.00%
28	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	27,426,832,644	-	27,426,832,644	24,892,476,044		2,534,356,600	27,426,832,644	0	100.00%
29	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	799,005,000	2,064,944,000	2,863,949,000	530,979,000		2,332,970,000	2,863,949,000	0	100.00%
30	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	1,438,446,000	-	1,438,446,000	220,898,000		1,217,548,000	1,438,446,000	0	100.00%
31	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	9,709,402,000	-	9,709,402,000	6,378,092,000		3,331,310,000	9,709,402,000	0	100.00%
32	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	2,966,563,000	5,209,960,000	8,176,523,000	6,240,852,000		1,935,671,000	8,176,523,000	0	100.00%
33	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7,486,312,000	-	7,486,312,000	1,860,000		7,484,452,000	7,486,312,000	0	100.00%
34	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	1,296,505,000	-	1,296,505,000	229,198,000		1,067,307,000	1,296,505,000	0	100.00%
35	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	910,955,000	1,088,140,000	1,999,095,000	755,610,000		1,243,485,000	1,999,095,000	0	100.00%
36	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	2,989,553,000	16,902,000	3,006,455,000	902,105,000		2,104,350,000	3,006,455,000	0	100.00%
37	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	851,173,000	-	851,173,000			851,173,000	851,173,000	0	100.00%
38	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	1,049,687,000	-	1,049,687,000			1,049,687,000	1,049,687,000	0	100.00%
39	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	1,580,550,000	-	1,580,550,000	436,305,000		1,144,245,000	1,580,550,000	0	100.00%
40	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	754,234,000	1,209,683,000	1,963,917,000	507,390,000		1,456,527,000	1,963,917,000	0	100.00%
41	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KP	25,694,351,464	-	25,694,351,464	10,527,303,000		15,167,048,464	25,694,351,464	0	100.00%
42	PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP	183,690,000	-	183,690,000	50,650,000		133,040,000	183,690,000	0	100.00%
TOTAL		179,765,764,108	28,927,889,000	208,693,653,108	89,646,740,044	-	119,046,913,064	208,693,653,108	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
										NILAI CAPAIAN 100.00%

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR KIPM dan KHP MAKASSAR	3,242,871,000	-	3,242,871,000	181,118,000		3,061,753,000	3,242,871,000	0	100.00%
2	BALAI KIPM dan KHP BALIKPAPAN	1,323,545,000	-	1,323,545,000	202,275,000		1,121,270,000	1,323,545,000	0	100.00%
3	BALAI KIPM dan KHP LAMPUNG	945,341,324	-	945,341,324	9,638,000		935,703,324	945,341,324	0	100.00%
4	BALAI KIPM dan KHP AMBON	254,838,000	373,548,000	628,386,000	8,000,000		620,386,000	628,386,000	0	100.00%
5	BALAI KIPM dan KHP BANJARMASIN	1,490,331,000	-	1,490,331,000	182,390,000		1,307,941,000	1,490,331,000	0	100.00%
6	BALAI KIPM dan KHP DENPASAR	3,244,319,000	-	3,244,319,000	576,640,000		2,667,679,000	3,244,319,000	0	100.00%
7	BALAI KIPM dan KHP JAKARTA II	1,164,584,000	-	1,164,584,000	559,584,000		605,000,000	1,164,584,000	0	100.00%
8	BALAI KIPM dan KHP JAYAPURA	917,913,000	-	917,913,000	29,000,000		888,913,000	917,913,000	0	100.00%
9	BALAI KIPM dan KHP MANADO	2,969,998,000	-	2,969,998,000	266,630,000		2,703,368,000	2,969,998,000	0	100.00%
10	BALAI KIPM dan KHP MATARAM	1,082,514,000	-	1,082,514,000	96,044,000		986,470,000	1,082,514,000	0	100.00%
11	BALAI KIPM dan KHP MEDAN I	4,870,920,000	-	4,870,920,000	528,745,000		4,342,175,000	4,870,920,000	0	100.00%
12	BALAI KIPM dan KHP SEMARANG	1,787,939,000	-	1,787,939,000	143,680,000		1,644,259,000	1,787,939,000	0	100.00%
13	BALAI KIPM dan KHP SURABAYA I	7,981,344,000	-	7,981,344,000	606,896,000		7,374,448,000	7,981,344,000	0	100.00%
14	BALAI KIPM dan KHP TARAKAN	154,755,800	-	154,755,800	-		154,755,800	154,755,800	0	100.00%
15	BALAI UJI STANDAR KIPM dan KHP	5,422,320,000	-	5,422,320,000	2,221,352,000		3,200,968,000	5,422,320,000	0	100.00%
16	SEKRETARIAT BPPMHKP	42,257,224,000	-	42,257,224,000	34,136,701,000		8,120,523,000	42,257,224,000	0	100.00%
17	STASIUN KIPM dan KHP KENDARI	418,991,000	-	418,991,000	82,330,000		336,661,000	418,991,000	0	100.00%
18	STASIUN KIPM dan KHP MAMUJU	35,000,000	-	35,000,000	-		35,000,000	35,000,000	0	100.00%
19	STASIUN KIPM dan KHP SORONG	673,546,000	-	673,546,000	88,620,000		584,926,000	673,546,000	0	100.00%
20	STASIUN KIPM dan KHP ACEH	2,008,035,000	-	2,008,035,000	77,270,000		1,930,765,000	2,008,035,000	0	100.00%
21	STASIUN KIPM dan KHP BATAM	1,351,261,698	-	1,351,261,698	1,874,000		1,349,387,698	1,351,261,698	0	100.00%
22	STASIUN KIPM dan KHP BENGKULU	436,771,000	-	436,771,000	24,978,000		411,793,000	436,771,000	0	100.00%
23	STASIUN KIPM dan KHP CIREBON	3,140,934,000	-	3,140,934,000	450,880,000		2,690,054,000	3,140,934,000	0	100.00%
24	STASIUN KIPM dan KHP GORONTALO	599,785,000	-	599,785,000	-		599,785,000	599,785,000	0	100.00%
25	STASIUN KIPM dan KHP JAMBI	190,000,000	-	190,000,000	73,000,000		117,000,000	190,000,000	0	100.00%
26	STASIUN KIPM dan KHP KUPANG	142,659,700	58,810,000	201,469,700	21,550,000		179,919,700	201,469,700	0	100.00%
27	STASIUN KIPM dan KHP MERAK	778,352,000	-	778,352,000	120,000,000		658,352,000	778,352,000	0	100.00%
28	STASIUN KIPM dan KHP MERAUKE	768,055,000	-	768,055,000	13,500,000		754,555,000	768,055,000	0	100.00%
29	STASIUN KIPM dan KHP PADANG	1,671,509,000	-	1,671,509,000	168,960,000		1,502,549,000	1,671,509,000	0	100.00%
30	STASIUN KIPM dan KHP PALANGKARAYA	1,819,998,000	-	1,819,998,000	385,950,000		1,434,048,000	1,819,998,000	0	100.00%
31	STASIUN KIPM dan KHP PALEMBANG	1,474,110,000	-	1,474,110,000	181,490,000		1,292,620,000	1,474,110,000	0	100.00%
32	STASIUN KIPM dan KHP PALU	474,690,000	-	474,690,000	61,720,000		412,970,000	474,690,000	0	100.00%
33	STASIUN KIPM dan KHP PANGKAL PINANG	1,006,732,000	-	1,006,732,000	18,000,000		988,732,000	1,006,732,000	0	100.00%
34	STASIUN KIPM dan KHP PEKANBARU	866,989,000	-	866,989,000	8,000,000		858,989,000	866,989,000	0	100.00%
35	STASIUN KIPM dan KHP PONTIANAK	2,041,312,000	-	2,041,312,000	379,255,000		1,662,057,000	2,041,312,000	0	100.00%
36	STASIUN KIPM dan KHP TERNATE	152,919,000	-	152,919,000	-		152,919,000	152,919,000	0	100.00%
37	STASIUN KIPM dan KHP YOGYAKARTA	1,341,671,000	-	1,341,671,000	105,837,000		1,235,834,000	1,341,671,000	0	100.00%
TOTAL		100,504,077,522	432,358,000	100,936,435,522	42,011,907,000	-	58,924,528,522	100,936,435,522	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
										NILAI CAPAIAN 100.00%

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	40,994,400,000	-	40,994,400,000	36,836,599,000	272,130,000	3,885,671,000	40,994,400,000	0	100.00%
2	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT BPSPL PADANG	7,576,678,000	-	7,576,678,000	174,516,000	4,673,911,000	2,728,251,000	7,576,678,000	0	100.00%
3	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	27,424,390,000	-	27,424,390,000	21,447,885,000	1,027,302,000	4,949,203,000	27,424,390,000	0	100.00%
4	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	26,488,912,000	-	26,488,912,000	19,886,050,000	3,418,731,000	3,184,131,000	26,488,912,000	0	100.00%
5	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	16,024,348,000	-	16,024,348,000	11,832,138,000	2,225,040,000	1,967,170,000	16,024,348,000	0	100.00%
6	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	14,006,000,985	-	14,006,000,985	10,488,817,000	994,620,000	2,522,563,985	14,006,000,985	0	100.00%
7	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	7,133,555,000	-	7,133,555,000	263,002,000	3,953,616,000	2,916,937,000	7,133,555,000	0	100.00%
8	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	33,127,842,000	-	33,127,842,000	28,419,306,000	3,247,674,000	1,460,862,000	33,127,842,000	0	100.00%
9	SETDITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	2,153,460,465,551	50,934,466,000	2,204,394,931,551	1,322,441,260,000	861,749,091,551	20,204,580,000	2,204,394,931,551	0	100.00%
TOTAL		2,326,236,591,536	50,934,466,000	2,377,171,057,536	1,451,789,573,000	881,562,115,551	43,819,368,985		-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
									NILAI CAPAIAN INDIKATOR 100.00%	



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

18. Nilai pengawasan kearsipan internal Satker BPBL Lombok



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
GEDUNG MINA BAHARI IV LANTAI 5, 6, 7 DAN 8
TELEPON (021) 3519070 (2325), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.210/DJPB.1/TU.140/I/2026 12 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Dua Lembar
Hal : Capaian IKU “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Budi Daya”

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan IV Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian IKU “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Budi Daya” sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh dari hasil pengawasan kearsipan internal KKP Tahun 2025 berupa jumlah nilai aspek pengelolaan arsip dinamis ditambah nilai aspek sumber daya kearsipan yang telah diverifikasi pada tahun 2025.
2. Adapun Direktorat Prasarana dan Sarana belum menjadi objek penilaian pengawasan kearsipan internal KKP Tahun 2025 sehingga belum terdapat target dan capaian.
3. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan internal KKP Tahun 2025, nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 96,21, melebihi target yang ditetapkan sebesar 80.
4. Rincian capaian nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya dari masing-masing Satker disampaikan pada halaman 3.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Lampiran Surat

Nomor : B.210/DJPB.1/TU.140/I/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT PENERIMA SURAT

1. Direktur Ikan Air Tawar
2. Direktur Ikan Air Payau
3. Direktur Ikan Air Laut
4. Direktur Rumput Laut
5. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
6. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
7. Plt. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
8. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
9. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
10. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi
11. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
12. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
13. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
14. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
15. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
16. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
17. Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
18. Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem
19. Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
20. Ketua Tim Kerja Program Dan Kerja Sama

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tinggal Hermawan

Lampiran Surat

Nomor : B.210/DJPB.1/TU.140/I/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

**Data Capaian IKU “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Budi Daya”
Tahun 2025**

No	Unit Kerja	Target (Nilai)	Capaian (Nilai)
1	Direktorat Ikan Air Laut	70	84.27
2	Direktorat Rumput Laut	80	73.52
3	Direktorat Ikan Air Tawar	70	79.18
4	Direktorat Ikan Air Payau	70	83.13
5	BBPBAP Jepara	80	99.33
6	BBPBL Lampung	80	96.86
7	BBPBAT Sukabumi	80	75.27
8	BPBAP Situbondo	70	88.50
9	BPBAP Takalar	80	95.95
10	BPBAT Jambi	70	81.12
11	BPBAT Mandiangin	70	86.16
12	BPBL Batam	70	90.72
13	BPBL Lombok	70	80.86
14	BPBL Ambon	70	61.05
15	BPBAP Ujung Batee	70	82.93
16	BPBAT Tatelu	70	76.38
17	BLUPPB Karawang	70	87.78
18	BPIUUK Karangasem	70	80.25
19	BPKIL Serang	80	98.13

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Tinggal Hermawan